



Organisasi
Perburuhan
Internasional

PEDOMAN INFORMASI

Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi dan Perlakuan Sewenang-wenang terhadap Pekerja Migran Perempuan

BUKU

5



Pulang:
Pemulangan
dan Penyatuan
Kembali

**MENCEGAH DISKRIMINASI,
EKSPLOITASI DAN PERLAKUAN
SEWENANG-WENANG TERHADAP
PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN**

Pedoman Informasi

Buku 5

Pulang: Pemulangan dan penyatuan kembali

**Progam Promosi Jender
Organisasi Perburuhan Internasional, Jenewa**

Hak Cipta © Kantor Perburuhan Internasional 2004

Pertama terbit tahun 2004

Publikasi Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 dari Konvensi Hak Cipta Dunia (*Universal Copyright Convention*). Walaupun begitu, kutipan singkat yang diambil dari publikasi tersebut dapat diperbanyak tanpa otorisasi dengan syarat agar menyebutkan sumbernya. Untuk mendapatkan hak perbanyakan dan penerjemahan, surat lamaran harus dialamatkan kepada Publications Bureau (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Kantor Perburuhan Internasional akan menyambut baik lamaran tersebut.

ISBN 92-2-818801-4 & 978-92-2-818801-1 (web pdf)

Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2004

Diterjemahkan dari "Preventing discrimination, exploitation and abuse of women migrant workers: an information guide." (ISBN 92-2-113763-5)

Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa-Bangsa, pencantuman informasi dalam publikasi-publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidak mencerminkan opini apapun dari Kantor Perburuhan Internasional (International Labour Office) mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukum pihak-pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuan batas-batas negara tersebut.

Dalam publikasi-publikasi ILO tersebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentuk kontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing-masing penulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung-jawab masing-masing penulis tersebut. Pemuatan atau publikasi opini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa Kantor Perburuhan Internasional menyetujui atau menyarankan opini tersebut.

Penyebutan nama perusahaan, produk dan proses yang bersifat komersil juga tidak berarti bahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk atau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutnya suatu perusahaan, produk atau proses tertentu yang bersifat komersil juga tidak dapat dianggap sebagai tanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional.

Publikasi-publikasi ILO dapat diperoleh melalui penyalur-penyalar buku utama atau melalui kantor-kantor perwakilan ILO di berbagai negara atau langsung melalui Kantor Pusat ILO dengan alamat ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland atau melalui Kantor ILO di Jakarta dengan alamat Gedung Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat diminta secara cuma-cuma pada alamat tersebut, atau melalui e-mail: pubvente@ilo.org ; jakarta@ilo.org.

Kunjungi website kami: www.ilo.org/publns ; www.ilo-jakarta.or.id

Dicetak di Jakarta, Indonesia



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum wr. wb.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mengucapkan terima kasih dan menyambut baik atas diterbitkannya buku dengan judul *"Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi dan Perlakuan Sewenang-wenang terhadap Pekerja Migran Perempuan"*.

Buku ini didedikasikan tidak hanya kepada masyarakat Indonesia tetapi juga kepada masyarakat Internasional karena pekerja migran telah menjadi isu global.

Kita prihatin dengan kenyataan bahwa pekerja migran perempuan sangat resisten terhadap perlakuan yang mengabaikan dan bahkan menghilangkan sama sekali hak-hak dasar mereka.

Mudah-mudahan, dengan diterbitkannya buku ini, berbagai masalah tersebut di atas dapat direduksi sekaligus meningkatkan harkat dan martabat setiap pekerja migran perempuan.

Wassalamu'allaikum wr.wb.

Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia

Fahmi Idris



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MERDEKA BARAT 15, TELP. 3805563 - 3842638, FAX. 3805562 - 3805559
JAKARTA 10110

**SAMBUTAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salah satu misi dari Pemberdayaan Perempuan adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan serta politik. Perempuan yang merupakan komponen terbesar dari penduduk merupakan aset bangsa yang potensial dan kontributor yang signifikan di dalam pembangunan bangsa, baik sebagai agen perubahan maupun sebagai obyek pembangunan. Hal ini menjadi mungkin apabila hak dan kebutuhannya dipenuhi serta kualitasnya ditingkatkan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa isu kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan memang masih ada, dan hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor budaya patriarki yang selama ini berkembang dan telah memposisikan perempuan sebagai kelompok marjinal, tingkat pendidikan maupun ketrampilan rendah, tingkat kesehatan rendah, sehingga berdampak negatif terhadap perempuan pada umumnya. Partisipasi perempuan terhadap dunia kerja merupakan sikap budaya perempuan Indonesia sebagai bagian rasa tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Sikap perempuan Indonesia seperti ini terlihat dengan semakin meningkatnya perempuan Indonesia ke dalam pasar kerja, termasuk pasar kerja di luar negeri (Pekerja Migran). Akan tetapi dalam pemenuhan kesempatan kerja ke luar negeri umumnya perempuan kurang mendapatkan informasi secara jelas dan memadai mengenai prosedur dan persyaratan untuk bekerja ke luar negeri sehingga berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan sejak dari rekrutmen, penempatan sampai dengan purna tugas pulang ke daerah asal.

Dengan kondisi demikian pekerja migran perempuan, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat, sangat rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang bahkan sangat kental dengan tindak kekerasan.

Untuk itulah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kantor ILO Jakarta melalui Proyek Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dari Kerja Paksa dan Trafiking, yang telah menterjemahkan dan mencetak Pedoman Informasi

tentang Persiapan Bekerja ke Luar Negeri yang tentunya akan sangat bermanfaat dalam penyebaran informasi secara tepat pada masyarakat pencari kerja, khususnya perempuan untuk bekerja ke Luar Negeri.

Mudah-mudahan Penerbitan Buku Pedoman ini yang merupakan Pedoman Informasi bagi pekerja migran akan bermanfaat bagi kalangan luas yang memerlukan, dan semoga Allah SWT akan memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menteri Pemberdayaan Perempuan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meutia Hatta Swasono', written in a cursive style.

Dr. Meutia Hatta Swasono

Pedoman Informasi:
**Mencegah diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang
terhadap pekerja migran perempuan**

Kata Pengantar

Dalam era globalisasi, pekerja migran merupakan bagian yang senantiasa berkembang pada angkatan kerja di semua negara. ILO memperkirakan 86 juta pekerja migran bekerja di luar negeri di seluruh dunia, dan dari jumlah ini, 32 juta bekerja di negara-negara berkembang.

Jumlah pekerja perempuan mencapai setengah dari jumlah seluruh pekerja migran dari seluruh dunia, termasuk Asia, dan terdapat sekitar 800.000 perempuan Asia melakukan migrasi/ bermigrasi setiap tahun. Jumlah ini terus meningkat karena kebutuhan akan jasa pekerjaan migran perempuan juga meningkat dengan cepat.

Pada dekade terakhir ini, Indonesia telah menjadi salah satu pengirim pekerja migran 'tanpa keahlian', dan saat ini menjadi pengeksport terbesar kedua setelah Filipina. Sekitar 76% pekerja migran Indonesia adalah perempuan, dan lebih dari 90% bekerja sebagai pekerja rumah tangga di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan dan semenanjung Arab. Dua negara sebagai tujuan utama adalah Malaysia (40%) dan Arab Saudi (37%).

Pemasukkan tahunan dari penggantian mata uang asing yang diperoleh dari pekerja migran Indonesia diperkirakan mencapai 2,2 miliar dollar. Pengiriman uang dari pekerja migran tahun 2003 saja mencapai jumlah 1,86 miliar dollar, menjadikan mereka sebagai penyumbang terbesar mata uang asing di Indonesia kedua setelah minyak dan gas.

Sebagian besar pekerja migran Indonesia mencari kesempatan kerja dan pendapatan lebih besar di luar negeri. Walaupun tenaga kerja migran Indonesia termasuk dalam berbagai golongan keahlian, tapi tetap yang terbanyak bekerja dalam kelompok pekerjaan '3-D' (dirty, dangerous and difficult) yaitu kotor, berbahaya dan sulit.

Bahwa bekerja di luar negeri dapat menjadi pengalaman bermanfaat bagi banyak orang, sejumlah besar pekerja migran menderita eksploitasi dan siksaan baik di negara sendiri maupun daerah tujuan, dan berakhir dalam situasi kerja paksa dan perdagangan orang. Situasi mereka diperburuk karena faktanya mereka tidak memiliki sumber daya menuntut keadilan di negara orang, tidak berhak untuk berorganisasi atau berganti majikan, dan penegakan hukum bagi hak-hak mereka sangat lemah. Kecenderungan mendapat penyiksaan dan eksploitasi senantiasa berlangsung dalam siklus bermigrasi – dari perekrutan dan pada tahap pemberangkatan, saat tiba di tempat kerja, berakhirnya kontrak dan tahap pemulangan, seperti yang tertuang dalam dokumen ini.

Pekerja migran tanpa dokumen adalah yang paling rentan, karena mereka bekerja di bawah ancaman konstan sanksi dan deportasi, dan karena itu bergantung sepenuhnya pada niat baik majikannya, aparat penegak hukum setempat dan lainnya untuk tidak melaporkan keberadaan mereka. Ketergantungan ini menjadikan pekerja migran rentan pada eksploitasi dan penyiksaan, dan akhirnya mereka tidak mempunyai jalan untuk memperjuangkan pembayaran gaji mereka.

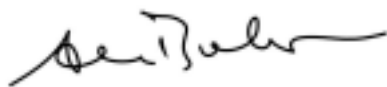
Indonesia baru saja menetapkan UU bagi Pekerja Migran sebagai indikasi bahwa Indonesia bermaksud menguatkan peraturan dalam sistem penempatan bagi pekerja migran. Ketentuan pelaksanaan UU ini sedang dalam persiapan dan akan segera ditetapkan.

Indonesia juga berinisiatif dalam dialog bilateral dengan negara-negara tujuan untuk bersepakat tentang kondisi pekerja migran.

Untuk mendukung pemerintah Indonesia dan mitra-mitra-nya dalam menyampaikan permasalahan pekerja migran Indonesia secara umum, dan pekerja rumah tangga migran secara khusus, sub regional proyek ILO mengenai Penggalangan Aksi Perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga dari Kerja Paksa dan Trafiking di kawasan Asia Tenggara yang didanai oleh DFID-UK, telah dimulai sejak Mei 2004. Proyek ini dimaksudkan untuk menguatkan perlindungan bagi pekerja rumah tangga Indonesia di dalam dan luar negeri.

Sebagai bagian dari pekerjaannya di Indonesia, kantor sub-regional ILO dalam proyek Penggalangan Aksi Perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga dari Kerja Paksa dan Trafiking di kawasan Asia Tenggara, telah mendanai penerbitan bahan-bahan mengenai buruh migran perempuan, yang awalnya diterbitkan oleh GENPROM, ILO Jenewa. Bahan-bahan ini melingkupi 6 volume referensi dan juga materi lain yang secara khusus relevan bagi mitra dan kelompok yang terkait berkisar dari referensi sampai standar internasional sebagai dokumen acuan seperti pedoman model-model kontrak dan bentuk-bentuk praktek terbaik lainnya.

Kami berharap penerbitan ini bisa menjadi alat yang berguna bagi mitra-mitra sosial dan kelompok terkait di Indonesia dalam merespon kebutuhan akan perbaikan kebijakan dan juga pelayanan, dan karenanya dapat memberikan kontribusi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama memberikan perlindungan yang efektif terhadap buruh migran dari kerja paksa dan perdagangan manusia.



Alan Boulton
Direktur
ILO Indonesia



Lotte Keijser
Kepala Penasehat Teknis
Proyek Pekerja Rumah Tangga
se-Asia Tenggara
Di danai oleh DFID-UK

Ucapan Terima kasih

Pedoman Informasi ini mencerminkan usaha kolaborasi dari Program Promosi Jender (*Jender Promotion Programme*), Cabang Migrasi Internasional (*International Migration Branch*) dan Program Aksi Khusus Menentang Kerja Paksa (*Special Action Programme to Combat Forced Labour*) dari ILO (*International Labour Organisation* – Organisasi Perburuhan Internasional). Beberapa organisasi non-pemerintah (Ornop/LSM) internasional dan nasional, khususnya Pusat Migran Asia (*Asian Migrant Centre*), Forum Migran di Asia (*Migrant Forum in Asia*) dan Anti-Perbudakan Internasional (*Anti-Slavery International*) memberikan informasi yang berharga. Kantor-kantor ILO regional dan nasional juga membantu dalam persiapan studi kasus di negara masing-masing, yang sangat membantu sebagai materi latar-belakang untuk Pedoman ini. Riset dan koordinasi awal, termasuk 10 studi kasus, dipersiapkan dan disupervisi oleh Katherine Landuyt, dengan bantuan teknis dari Tanja Bastia.

Pedoman ini ditulis oleh Lin Lean Lim, dengan Katherine Landuyt, Mary Kavar, Minawa Ebisui, dan Sriani Ameratunga. Para penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada berbagai organisasi dan para kolega yang memberikan kontribusi mereka dalam berbagai bentuk dan cara demi terciptanya buku Pedoman ini. Ucapan terima kasih terutama kami sampaikan kepada Thetis Mangahas dan Roger Plant dari Program Aksi Khusus Menentang Kerja Paksa, dan Gloria Moreno Fontes-Chammartin, Patrick Taran dan Manolo Abella dari Cabang Migrasi Internasional. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Goran Hultin, Direktur Eksekutif Sektor Perburuhan, yang selama ini selalu memberikan dukungan penuh serta semangat untuk pekerjaan PROGRAM PROMOSI JENDER. Kami sangat berhutang budi kepada Tiina Eskola yang membantu dalam menyunting dan menyusun format pedoman ini, Joanna Jakckson yang turut menyunting, serta Nathalie Rousseau, Sergio Pilowsky dan Heidrun Kaiser atas bantuan besar mereka dalam disain kulit muka, tata letak dan cetak – adalah suatu kepuasan mendalam untuk bekerja sama dengan mereka semua. Kepada para kolega di Kantor Subregional ILO untuk Asia Tenggara dan Pasifik, serta para peserta lokakarya validasi subregional di Manila, terima kasih kami sampaikan pada komentar-komentar berharga dan usulan-usulan dalam proses penyelesaian Pedoman ini.

Penerbitan ini dapat terjadi karena bantuan sepenuhnya dari Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Program Kemitraan Belanda (*Netherlands Partnership Programme*).

Program Promosi Jender (GENPROM)
Organisasi Perburuhan Internasional
Jenewa

Buku 5

Pulang: Pemulangan dan penyatuan kembali

Daftar Isi	Hal
5.1. Tujuan dan struktur Pedoman ini	1
5.2. Bagaimana menggunakan Pedoman ini	5
5.3. Jenis pemulangan	9
5.4. Masalah-masalah dan kesulitan penyatuan kembali: Bagaimana para migran yang kembali dapat menanggulangnya	13
5.5. Bantuan dan dukungan bagi pekerja migran yang kembali	23
5.5.1. Peran pemerintah	26
5.5.2. Peran dari organisasi-organisasi pemberdayaan diri, mitra sosial dan Ornop/LSM	35
5.5.3. Bantuan logistik	40
5.5.4. Bantuan hukum	44
5.5.5. Konseling sosio-psikologis dan pelayanan medis	45
5.5.6. Bantuan yang terkait dengan pekerjaan dan ketrampilan	48
5.5.7. Pelayanan keuangan: pengelolaan pengiriman uang, tabungan dan investasi	51
Bahan rujukan dan bacaan tambahan	57
Beberapa situs web yang bermanfaat	59
Catatan akhir	63
Presentasi <i>PowerPoint</i>	66

5.1. Tujuan dan struktur pedoman ini

Pedoman informasi ini dimaksudkan untuk:

- **Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai kerentanan pekerja migran, khususnya perempuan, terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang yang terjadi sepanjang semua tahapan proses migrasi tenaga kerja internasional, termasuk perdagangan manusia.**
- **Mempromosikan dan memperbaiki perundang-undangan, kebijakan-kebijakan dan tindakan- untuk mencegah diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, serta untuk melindungi para pekerja migran perempuan yang rentan dengan lebih baik; dan**
- **Menegaskan serta menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana pencegahan diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, termasuk perdagangan manusia yang dialami oleh pekerja migran, harus ditanggulangi didalam kerangka kerja yang ditujukan untuk mempromosikan migrasi tenaga kerja yang teratur dan tertib dan sebagai hal yang menyangkut:**

Kotak 5.1. Fokus pada migran perempuan dari sudut pandang gender berbasis hak

Walaupun fokusnya adalah migran perempuan (dan anak perempuan), pedoman Informasi ini bukan khusus untuk perempuan. Pedoman ini mengadopsi sudut pandang berdasarkan hak dan peka-jender yang:

- Mengakui persamaan dan perbedaan dalam pengalaman migrasi dari berbagai kategori migran perempuan dan laki-laki dalam hubungannya dengan berbagai kerentanan, pelanggaran dan akibat-akibat;
- Menghubungkan perbedaan-perbedaan dalam pengalaman-pengalaman migrasi ini dengan gender – dengan cara membedakan perbedaan biologis (jenis kelamin) dan perbedaan yang ditentukan secara sosial (“gender”) antara perempuan dan laki-laki. Mengkaitkan perbedaan-perbedaan dalam pengalaman migrasi dengan perbedaan peran, atribut dan tingkah laku untuk perempuan dan laki-laki yang dianggap layak secara sosial oleh masyarakat, serta dengan pembagian pekerjaan, akses ke dan kontrol terhadap sumberdaya dan pembuatan keputusan, serta halangan-halangan, kesempatan-kesempatan dan kebutuhan yang dihadapi oleh migran perempuan dan laki-laki;
- Memusatkan perhatian pada dampak-dampak yang berbeda dan seringkali bersifat diskriminatif dari peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan dan program-program terhadap berbagai kelompok migran perempuan dan laki-laki yang berbeda.
- Mempertimbangkan interaksi antara gender dan kategori-kategori sosial lainnya, seperti asal negara, kelas sosial, latar belakang etnik dan usia;
- Memberikan perhatian khusus kepada kelompok migran perempuan dan laki-laki yang sangat rentan;
- Menangani isu-isu perempuan tidak hanya dari sudut pandang perpindahan, pekerjaan dan kehidupan di negara lain, tetapi juga dari sudut pandang peran sosio-ekonomi mereka yang biasanya kurang dihargai, dan posisi mereka yang kurang menguntungkan dibandingkan rekan laki-laki mereka.
- Menegaskan perlunya kebijakan-kebijakan yang tidak hanya memusatkan perhatian pada sisi persediaan dan kebutuhan akan migran tetapi juga memusatkan perhatian pada diskriminasi dan ketidak-setaraan gender.
- Berpegang bahwa penghapusan ketidaksetaraan dan diskriminasi gender adalah isu HAM dan akar dari upaya-upaya untuk menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan;
- Bertujuan memberdayakan, bukan hanya melindungi migran perempuan (dan, dimana perlu, juga laki-laki), sehingga mereka dapat menuntut hak-hak mereka, dan membuat keputusan tentang hidup mereka berdasarkan informasi yang utuh yang mereka terima.

- ☑ Penegakan HAM yang mendasar, termasuk hak-hak pekerja dan migran;
- ☑ Promosi kesetaraan jender dan pengakhiran segala bentuk diskriminasi, rasisme dan xenophobia (rasa takut tanpa alasan terhadap orang atau barang asing);
- ☑ Promosi pekerjaan yang layak dan produktif bagi semua pekerja , perempuan dan laki-laki, dalam kondisi yang merdeka, setara, aman dan memiliki harga diri sebagai manusia;
- ☑ Pengentasan kemiskinan dan pengucilan sosial.

Pedoman ini menunjukkan bahwa perubahan lapangan kerja sejalan dengan arus globalisasi telah meningkatkan kesempatan sekaligus tekanan pada perempuan untuk bermigrasi. Kaum perempuan bermigrasi untuk pekerjaan dalam

Bagi sebagian besar perempuan, juga bagi laki-laki, migrasi menunjukkan pengalaman positif dan dapat membuahkan dampak emansipasi dan pemberdayaan yang penting. Tetapi fokus dari Panduan ini adalah pada para pekerja migran perempuan yang terutama sekali rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, termasuk perdagangan.

skala yang sama dengan laki-laki, yakni sekitar separuh jumlah total pekerja migran di seluruh dunia. Untuk sebagian besar perempuan, sama halnya bagi laki-laki, migrasi adalah pengalaman positif, menghantarkan ke kehidupan yang lebih baik dan peningkatan kedudukan ekonomi dan sosial mereka. Proses migrasi pekerjaan ini dapat meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, otonomi serta pemberdayaan mereka, dan dengan demikian mengubah peran dan tanggung jawab jender dan berkontribusi pada kesetaraan jender. Para migran perempuan dapat mencapai tujuan mereka, dan mungkin mendapatkan lebih banyak dibanding dengan migran laki-laki, bukan dalam hal pendapatan tetapi dalam hal status dan kedudukan ketika mereka pulang kembali ke tempat asal mereka. Meskipun mungkin penghasilan mereka kurang dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka, dan biasanya mereka ini bekerja di sektor tenaga kerja yang tidak teratur, tetapi mereka sering mampu meningkatkan kedudukan ekonomi keluarga mereka. Mereka pun meningkatkan status dan kemandirian mereka sendiri, disamping juga kekuasaan dalam pengambilan keputusan dalam keluarga mereka. Mereka juga mungkin dapat memiliki kesempatan lebih baik di lapangan kerja lokal pada saat mereka kembali, serta memiliki modal untuk memulai usaha mereka sendiri.

Tetapi migrasi untuk pekerjaan dapat juga menempatkan migran perempuan pada pelanggaran serius terhadap HAM mereka, termasuk hak-hak mereka sebagai pekerja. Baik dalam tahap perekrutan,

Keprihatinannya adalah bahwa keseluruhan proses feminisasi dalam migrasi internasional tampaknya akan terus berlangsung, dan kerentanan migran perempuan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang juga tampaknya akan meningkat.

perjalanan melintasi batas-batas negara, transit atau tinggal dan bekerja di negara lain, para pekerja migran perempuan, khususnya yang berada dalam situasi tidak teratur, akan lebih rentan. Mereka berada pada situasi pelecehan, intimidasi atau ancaman-ancaman baik terhadap diri mereka sendiri maupun keluarga mereka, eksploitasi ekonomi dan seksual, diskriminasi rasial dan xenofobia, kondisi tempat kerja yang buruk, meningkatnya risiko kesehatan dan berbagai bentuk perlakuan sewenang-wenang atau kekejaman lainnya, termasuk diperdagangkan untuk kerja paksa, perbudakan atau perhambaan karena hutang (*debt-bondage*) atau diluar kemauan, dan dalam situasi tahanan. Yang menjadi keprihatinan adalah bahwa keseluruhan proses feminisasi dalam migrasi internasional tampaknya akan terus

berlangsung, dan kerentanan migran perempuan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang juga tampaknya akan meningkat – karena sikap yang makin keras terhadap migran pada umumnya¹ dan karena sikap dan sudut pandang berbasis gender tetap lamban-perubahannya. Ketidaksetaraan gender tetap terjadi, dan lapangan-lapangan kerja tetap tersegmentasi dan tersegregasi baik di negara asal maupun negara tujuan.

Pekerja migran perempuan, baik yang tercatat maupun tidak tercatat, sangat lebih rentan terhadap diskriminasi,

Diskriminasi berdasarkan gender bersilangan dengan diskriminasi berdasarkan bentuk lain dari “sesuatu yang berbeda”

eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang - tidak hanya dibandingkan dengan para pekerja migran laki-laki tetapi juga dengan pekerja perempuan penduduk asli. Migran perempuan dan anak perempuan juga lebih berada dalam risiko untuk diperdagangkan dibanding laki-laki dan anak laki-laki. Diskriminasi berdasarkan gender bersilangan dengan diskriminasi berdasarkan bentuk lain dari “sesuatu yang berbeda” – seperti status bukan warga negara, ras, latar belakang etnik, agama, status ekonomi – menempatkan migran perempuan dalam situasi diskriminasi, merugikan, marginalisasi dan/atau kerentanan ganda, atau bahkan berlipat ganda.

Walaupun fokusnya adalah pekerja migran perempuan, banyak dari keprihatinan dan isu yang dimunculkan, serta analisa dan garis pedoman yang diberikan melintasi gender dan, terkadang, usia. Dengan demikian, pedoman Informasi ini dapat relevan bagi semua migran, baik perempuan ataupun laki-laki, agar mereka dapat memahami dengan lebih baik berbagai risiko yang ada dalam migrasi tenaga kerja, mengetahui hak-hak mereka dan lebih mampu melindungi diri mereka sendiri. Pedoman ini juga menunjukkan mengapa diantara anak-anak, anak perempuan lebih sering rentan dibanding anak laki-laki terhadap eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang. Namun, isu kerentanan yang lebih besar yang dihadapi anak-anak terhadap eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, khususnya penderitaan fisik, psikologis dan psiko-sosial yang dialami oleh anak-anak yang diperdagangkan membutuhkan pembahasan yang terpisah. Pedoman ini tidak membahas solusi khusus anak-anak, yang mana juga harus spesifik untuk anak perempuan dan anak laki-laki.²

Pedoman ini terdiri dari enam buku yang saling terkait namun dapat dipakai secara terpisah. Buku 1 memberikan introduksi umum tentang dinamika dalam migrasi pekerja perempuan. Buku 2 sampai 5 membahas berbagai tahap proses migrasi dan hal-hal yang terkait dengan proses tersebut: kegiatan-kegiatan, kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek yang dilakukan oleh para pelaku lainnya - pemerintah, pengusaha, sektor swasta, kelompok masyarakat sipil dan keluarga-keluarga - yang mempengaruhi mobilitas dan pekerjaan perempuan dan laki-laki didalam dan diluar negara-negara asal mereka. Buku 6 memfokuskan pada perdagangan manusia, khususnya migran perempuan dan anak perempuan.

Buku 1 *Pendahuluan: Mengapa fokus pada pekerja migran perempuan internasional?*

Menyoroti kerentanan pekerja migran perempuan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang dalam berbagai tahapan proses migrasi. Situasi-situasi lapangan kerja, dimana pekerja migran perempuan menempatkan diri mereka dalam risiko lebih besar terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM, dibandingkan dengan pekerja migran laki-laki dan perempuan setempat. Untuk melindungi para pekerja migran perempuan, Buku 1 memperkenalkan kerangka kerja multidisipliner dan komprehensif - yang memusatkan perhatian pada faktor permintaan dan persediaan, serta menginkorporasikan promosi HAM, kesetaraan gender, pekerjaan yang layak dan pengentasan kemiskinan; dan melibatkan berbagai rangkaian para pelaku sosial dalam instrumen-instrumen, peraturan dan kebijakan, serta tindakan praktis di tingkat internasional, regional, nasional dan masyarakat.

Buku 2 *Pembuatan keputusan dan persiapan untuk pekerjaan di luar negeri*

Menguraikan proses pembuatan keputusan dan persiapan untuk pindah dan bekerja di negara asing. Buku ini menyoroti jenis informasi yang akurat dan realistis, serta pelayanan-pelayanan bantuan yang harus dimiliki oleh para calon pekerja migran dalam membuat keputusan yang benar untuk bekerja di luar negeri. Buku ini juga mengidentifikasi para pelaku lain dalam proses pembuatan keputusan, terutama keluarga-keluarga dari para migran perempuan tersebut, dan menegaskan perlunya untuk menjangkau serta membuat peka para pelaku ini. Bagi mereka yang telah memutuskan untuk menjadi pekerja migran, buku ini menjelaskan informasi yang akan membantu mengarahkan mereka dalam proses perekrutan dan perjalanan ke tempat tujuan, termasuk informasi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum mereka, dan bagaimana menuntut hak mereka, serta apa yang harus dilakukan dalam situasi krisis. Buku ini juga menekankan pentingnya langkah-langkah yang menjamin para pekerja migran memiliki akses perlindungan sosial.

Buku 3 *Perekrutan dan perjalanan untuk pekerjaan di luar negeri*

Membedakan berbagai model-model perekrutan dan menekankan bahwa praktek-praktek seperti penipuan dan eksploitatif adalah sangat umum terjadi dalam tahap perekrutan. Buku ini menerangkan tentang perekrutan tidak resmi dan memusatkan perhatian pada berbagai bahaya-bahaya dan risiko yang dapat dialami oleh perempuan dalam proses perekrutan. Perdagangan adalah satu bentuk dari perekrutan tidak resmi. Buku ini juga menguraikan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah, para pelaku sosial lain dan para pekerja yang bersangkutan untuk mencegah terjadinya malpraktek ini.

Buku 4 *Bekerja dan tinggal di luar negeri*

Meningkatkan kesadaran mengenai kondisi-kondisi kerja dan kehidupan para migran perempuan di negara-negara tujuan, dan memberikan garis pedoman mengenai bagaimana memperbaiki situasi mereka, terutama untuk mencegah dan menuntut ganti rugi atas kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak mendasar mereka, juga untuk mempermudah penyesuaian dan penyatuan mereka di negara tujuan. Buku ini menunjukkan bahwa dimana para pekerja migran perempuan diorganisir, dan memiliki jejaring informasi serta dukungan sosial, maka kecil kemungkinan eksploitasi akan terjadi. Fokusnya adalah pada para migran yang menjadi pembantu rumah tangga (PRT), karena mereka yang paling rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, dan juga, karena pekerjaan sebagai PRT adalah satu kategori pekerjaan yang paling banyak tersedia untuk migran perempuan.

Buku 5 *Pulang: Pemulangan dan Penyatuan Kembali*

Menggambarkan masalah-masalah spesifik yang dihadapi migran perempuan ketika pulang kembali ke negara asal dan keluarga mereka. Buku ini mengidentifikasi berbagai jenis bantuan - logistik, hukum, sosio-psikologis, pekerjaan, ketrampilan yang terkait, dan keuangan - yang mereka perlukan agar erhasil bersatu kembali dengan keluarga dan mencegah kepergian kembali atau diperdagangan kembali. Buku ini menekankan bahwa kesempatan mendapatkan pekerjaan menguntungkan adalah kunci keberhasilan untuk bersatu kembali dengan keluarga.

Buku 6 *Perdagangan perempuan dan anak perempuan*

Memfokuskan pada masalah global yang makin memprihatinkan: perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak perempuan. Buku ini mengidentifikasi penyebab-penyebab, baik dari sisi suplai maupun sisi-permintaan, menguraikan mekanisme-mekanisme perdagangan manusia dan menjelaskan mengapa perempuan dan anak perempuan lebih rentan untuk menjadi korban.

5.2. Bagaimana menggunakan Pedoman ini

Buku-buku pedoman ini dimaksudkan sebagai **informasi/sumber rujukan untuk berbagai macam pembaca:**

- Kelompok sasaran utama pedoman adalah para advokat dan aktivis, para pembuat dan pelaksana kebijakan mengenai isu migrasi dan hak-hak pekerja perempuan di negara asal, negara transit dan negara tujuan. Termasuk diantaranya adalah para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab untuk administrasi keadilan, para pejabat peradilan dan para pemberi pelayanan - a.l. pegawai migrasi, personil kedutaan, atase tenaga kerja, pengawas ketenagakerjaan, polisi dan aparat penegak hukum, hakim, jaksa, petugas peradilan, pegawai- dinas kesejahteraan, sosial dan kesehatan masyarakat, serta para pejabat dari kantor wanita dan departemen tenaga kerja, departemen kehakiman dan imigrasi/emigrasi;
- Pedoman ini secara lebih luas juga ditujukan untuk organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha, asosiasi-asosiasi pekerja migran (termasuk asosiasi-asosiasi pekerja rumah tangga), agen-agen perekrutan dan penempatan tenaga kerja pemerintah dan swasta, serta organisasi-organisasi non-pemerintah (Ornop), organisasi-organisasi berbasis masyarakat (LSM) dan berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya yang peduli pada isu HAM;
- Informasi dalam pedoman ini jelas sangat berguna bagi masing-masing migran, baik perempuan maupun laki-laki. Namun demikian, pedoman ini disusun untuk digunakan oleh para pelaku yang langsung berhubungan dengan masing-masing migran, misalnya serikat pekerja, badan pemerintah atau Ornop/LSM, untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran diantara para calon migran atau dalam menyelenggarakan orientasi pra-keberangkatan untuk para migran. Mungkin materi-materi yang ada disini perlu diadaptasi dan bahasa dan presentasi yang ada perlu disederhanakan agar cocok untuk para migran.

Pemakai perseorangan atau kelembagaan mungkin harus memilih satu atau beberapa buku, dari pedoman ini dan memanfaatkan, menyesuaikan, serta mengadaptasi bahan-bahan yang tertulis sesuai dengan konteks, kebutuhan dan tujuan masing-masing negara dan sosial-budayanya. Untuk membantu para pembaca, informasi yang ada telah disusun sedapat mungkin dalam format yang “ramah-pemakai”. Simbol, jenis huruf dan warna-warna yang berbeda menggambarkan jenis informasi yang berbeda. Pada bagian akhir setiap buku, disediakan catatan, daftar pustaka dan daftar situs web yang membantu para pembaca yang tertarik untuk mendapatkan penjelasan lebih terinci atau tambahan dan bahan-bahan rujukan lainnya.³ Materi presentasi *PowerPoint* memberikan ringkasan atas poin-poin utama yang dibahas dalam buku yang bersangkutan. Rujukan silang disediakan untuk bidang-bidang yang saling meliputi yang dibahas dalam berbagai buku yang berbeda, atau dimana isu-isu dibahas di lebih dari satu bab atau buku. Informasi penting diulang-ulang, sehingga setiap buku disusun selengkap mungkin.

Contoh-contoh “baik” dan “buruk” yang disediakan tidak dimaksudkan untuk mengkhususkan suatu negara. Contoh-contoh ini hanya mencerminkan informasi yang ada (yang juga untuk membantu menjelaskan mengapa sepertinya lebih banyak contoh dari kawasan Asia-Pasifik). Walau negara-negara daricontoh itu disebutkan, praktek-praktek “baik” atau “buruk” tidak berarti spesifik terjadi hanya di negara-negara tersebut saja.

Pedoman Informasi ini dapat digunakan secara fleksibel untuk:

- **Meningkatkan Kesadaran atau Menumbuhkan Kepekaan:** Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kerentanan yang dihadapi oleh pekerja migran terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, termasuk perdagangan manusia, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha, Ornop/LSM dan para pelaku masyarakat sipil lainnya dalam menghadapi kerentanan-kerentanan tersebut, melindungi HAM dan mempromosikan pekerjaan yang layak bagi para pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan. Akses ke informasi semacam ini dapat memberdayakan para perempuan untuk meningkatkan harga diri mereka dan membangun percaya diri untuk mempertahankan hak-hak mereka sebagai perempuan, sebagai migran dan sebagai pekerja.
- **Advokasi dan Publisitas:** Pedoman ini dimaksudkan untuk meletakkan diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang yang dialami oleh para pekerja migran perempuan pada “layar radar” komunitas HAM, lembaga-lembaga pembangunan dan donor internasional. Badan-badan pemerintah, Ornop/LSM dan para pelaku sosial lainnya dapat juga menggunakan pedoman ini untuk kampanye-kampanye media, mobilisasi dan penjangkauan masyarakat untuk memberikan informasi atau mendidik masyarakat awam dan para pelaku lainnya yang peduli, termasuk tenaga kerja migran sendiri, mengenai apa yang dapat mereka lakukan dan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi para pekerja migran perempuan yang rentan, serta secara umum meningkatkan situasi migran, baik perempuan maupun laki-laki.
- **Alat untuk aksi:** Pedoman ini mengindikasikan kerangka kerja normatif yang dapat digunakan dalam menghadapi diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang yang dialami oleh para pekerja migran perempuan. Para pembuat peraturan dan kebijakan dapat merujuk ke standar internasional dan regional yang relevan, serta beberapa contoh skala nasional dalam mengadopsi pendekatan berbasiskan hak, dan merumuskan atau meninjau ulang peraturan. Pedoman ini juga menyajikan garis-pedoman, *checklist* (daftar petunjuk) dan contoh-contoh praktis untuk bertindak. Para pemakai buku dapat belajar dari berbagai pengalaman para pelaku di negara-negara asal, transit dan tujuan, serta dapat lebih mengetahui akan apa yang dapat dilakukan atau efektif untuk membantu para perempuan yang rentan ini dalam proses migrasi. Namun karena keadaan berbeda dari satu negara dengan negara lainnya, maka informasi yang ada disini tidak dimaksudkan sebagai penggambaran praktek-praktek “terbaik” atau “baik” yang harus diadopsi dalam semua situasi, atau digunakan secara pasti.
- **Tujuan pelatihan dan pendidikan:** Informasi dalam buku-buku ini dapat juga berguna sebagai materi penunjang/latar belakang dalam seminar-seminar pelatihan (seperti untuk pejabat migrasi, atase tenaga kerja, pejabat penegak hukum dan agen penempatan tenaga kerja), sebagai topik-topik yang dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah atau program-program pendidikan umum yang ditujukan pada para calon pekerja migran perempuan, dan yang terpenting, dalam kursus-kursus persiapan sebelum mereka berangkat ke luar negeri.
- **Alat untuk Jejaring:** Pedoman ini menawarkan gagasan-gagasan untuk memperbaiki jejaring dan kolaborasi antar dan diantara sesama pemerintah dan para pelaku sosial, serikat-serikat pekerja, Ornop/LSM serta agen-agen tenaga kerja; untuk menggiatkan diskusi dan merangsang tindakan diantara pemegang kepentingan; dan membangun aliansi antara berbagai organisasi dengan masing-masing perempuan pekerja didalam dan antar negara-negara asal, transit dan tujuan.

Untuk membantu pemakai pedoman ini, informasi yang ada didalamnya diatur dalam berbagai cara:

-  Tujuan-tujuan dari berbagai buku dan masing-masing bagian dari pedoman Informasi
-  *Kotak Teks dalam garis miring berwarna, tema utama dan pokok-pokok yang disoroti dalam berbagai bagian dari pedoman Informasi*
-  *Kotak teks dalam garis miring tebal, perangkat internasional*
-  Kotak teks berwarna, penjelasan penting atau contoh-contoh kebijakan atau tindakan
-  *Poin kunci untuk diingat*
-  *Uraian/rincian dari poin kunci, checklist (daftar petunjuk) atau garis-pedoman*
-  Praktek-praktek yang baik
-  Praktek-praktek yang buruk
-  Hikmah yang dapat diambil
-  Merujuk, rujukan-silang

5.3. Jenis pemulangan



Tahap akhir dari proses migrasi sementara adalah ketika para pekerja migran pulang kembali ke negara asal mereka. Pemulangan para pekerja migran ke negara asal mereka dapat secara sukarela atau dipaksa, secara perseorangan atau masal

☑ *Pemulangan yang dipaksakan atau di luar kemauan:*

Pemulangan di luar kemauan termasuk keadaan-keadaan yang menyangkut pengakhiran kontrak kerja secara tidak sah atau pengakhiran kontrak kerja yang tiba-tiba dan tidak adil yang dilakukan oleh majikan. Pemulangan di luar kemauan dapat terjadi karena pekerja migran telah diperlakukan sewenang-wenang atau dieksploitasi oleh majikan atau agen, kehilangan pekerjaannya atau diabaikan oleh majikannya, ijin kerjanya atau ijin tinggalnya telah kadaluwarsa dan tidak dapat diperbaharui lagi. Juga terdapat situasi-situasi dimana seorang pekerja migran mungkin telah habis kontraknya dan berkeinginan untuk memperpanjang kontrak tersebut, atau tinggal dengan kontrak lain, tetapi tidak dapat melakukannya karena negara tuan rumah mensyaratkan seorang pekerja migran untuk pertama-tama kembali ke negara asalnya dulu sebelum diperbolehkan memperpanjang kontrak atau berganti majikan.

☑ *Deportasi:*

Migrasi balik dapat diakibatkan oleh perintah pengusiran. Negara-negara tujuan sering mendeportasi migran secara perseorangan dan, kadang-kadang, secara massal. Pada tingkat perseorangan, deportasi biasanya dikarenakan oleh migrasi tidak terdaftar atau karena si migran telah melakukan suatu kejahatan. Walaupun berlawanan dengan standar internasional, seorang migran yang menjadi korban perdagangan dapat kadang-kadang dideportasi [📖Bagian 6.8 dalam Buku 6]. Pemulangan masal para pekerja migran dari negara-negara tujuan mungkin terjadi karena berbagai macam alasan, ³ termasuk [📖Kotak 5.2]:

- Perang dan konflik-konflik;
- Masalah diplomatik antara negara-negara pengirim dan penerima migran;
- Deportasi masal terhadap para migran tidak terdaftar;
- Kemerosotan atau krisis ekonomi, meningkatnya pengangguran di negara penerima;
- Program-program lokalisasi atau nasionalisasi untuk menggantikan para migran dengan para pekerja setempat;
- Perubahan-perubahan lainnya dalam bidang politik atau kebijakan oleh pemerintah tuan rumah.

☑ *Pemulangan sukarela:*

Kembali ke kampung halaman hanya dapat menjadi suatu pilihan yang benar jika pemulangan adalah sukarela. Pulang kampung untuk selama-lamanya adalah tujuan dari mereka yang pergi ke luar negeri untuk “berpenghasilan baik, menabung dan memberikan masa depan yang lebih cerah bagi keluarga mereka”. Para migran juga dapat membuat keputusan untuk pulang ke negara asal dengan membandingkan kondisi di negara tujuan dan negara asal mereka. Contohnya, krisis ekonomi di Argentina telah menggerakkan arus

balik ke Italia dan Spanyol. Banyak orang Amerika yang berasal dari Irlandia telah mengambil keuntungan dari dinamika ekonomi yang baru di Irlandia dengan pulang kembali ke negara tersebut. Ada juga program-program Pemulangan Sukarela yang dibantu (*Assisted Voluntary Return* – AVR) [☞ Kotak 5.11 dalam Bagian 5.5.1 di bawah]

Kotak 5.2. Pemulangan para pekerja migran secara massal

Krisis Keuangan Asia pada tahun 1990an memiliki dampak besar pada pola-pola migrasi di kawasan ini. Dalam beberapa dekade sebelum krisis, Asia telah menjadi salah satu simpul migrasi, dengan arus masal antara negara-negara pengirim dan penerima. Namun demikian, dengan meletusnya krisis, proses ini secara mendadak berhenti, dan pada umumnya langsung menjadi terbalik. Bahkan sebelum krisis, pekerja migran cenderung disalahkan oleh orang-orang setempat untuk berbagai masalah sosial, dan bersamaan dengan melonjaknya pengangguran selama akhir tahun 1990an, migran menjadi kambing hitam yang mudah untuk kejatuhan ekonomi. Banyak pemerintah tuan rumah melakukan langkah-langkah mengutamakan pekerja setempat dibandingkan dengan pekerja asing, termasuk pengawasan impor tenaga kerja, penawaran amnesti, repatriasi dan pengerahan kembali. Lebih dari satu juta pekerja asing dipaksa pulang kembali ke negara-negara asal mereka pada puncak krisis. Menurut perkiraan ILO, 117.000 pekerja direpatriasi dari Korea Selatan, 400.000 dari Malaysia dan 460.000 dari Thailand.

Sumber: Asian Migrant Centre, Asia-Pacific Bureau for Adult Education dan Migrant Forum in Asia, *Clearing a Hurried Path: Study on Education Programmes for Migrant Workers in Six Asian Countries*, Hong Kong, Asian Migrant Centre, 2001, hal. 17-19

Mereka yang kembali dan tinggal untuk selama-lamanya di negara asal mereka cenderung memiliki ciri tertentu yang sama: mereka telah meraih tujuannya (berkaitan dengan migrasi), mereka memiliki pasangan dan anak, mereka lebih tua, mereka telah mengarahkan-ulang rencana hidup mereka atau mengambil kegiatan lain sesudah kepulangan mereka. Mereka yang ingin bermigrasi kembali cenderung memiliki ciri-ciri lain—mereka secara ekonomis miskin sebelum migrasi dan secara ekonomis tetap rentan ketika mereka pulang, mereka adalah penghibur ketika di luar negeri dan mengalami stigmatisasi di kampung halaman mereka, mereka menikmati kemandirian ketika bekerja di luar negeri dan merasa norma-norma sosial budaya di kampung mereka bersifat membatasi.⁴

ILO selalu menganjurkan untuk pemulangan sukarela para pekerja migran. Masa tinggal di

ILO selalu menganjurkan untuk pemulangan sukarela para pekerja migran.

luar negeri harus secara jelas dirumuskan bagi para pekerja migran yang diberi kontrak kerja sebelum keberangkatan. Kontrak kerja harus memasukkan klausul mengenai ketentuan-ketentuan untuk pemulangan para pekerja migran setelah kontrak kerja mereka selesai. Pengusiran para pekerja migran harus dihindari. Tetapi jika seandainya Pemerintah yang melaksanakan pengusiran, HAM para pekerja migran harus dihargai selama proses pengusiran. *Konvensi ILO No 143 mengenai Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), 1975* mengatur bahwa:

Konvensi ILO No. 143 mengenai Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), 1975

Pasal 8:

- 1. Dalam keadaan bahwa ia telah tinggal secara sah di dalam wilayah untuk suatu pekerjaan, para pekerja migran tidak boleh diperlakukan sebagai berada dalam situasi tidak sah atau tidak teratur hanya karena kenyataan telah kehilangan pekerjaannya, yang tidak boleh dengan sendirinya diartikan secara tidak langsung pencabutan otoritasnya untuk tinggal, atau, sebagaimana mungkin kasusnya adalah, ijin kerja [...]*

Pasal 9

3. Dalam hal pengusiran si pekerja atau keluarganya, biaya tidak boleh dibebankan pada mereka.
4. Tidak satupun dalam Konvensi ini yang mencegah para Anggota untuk memberikan pada orang-orang yang tinggal dan bekerja secara tidak resmi di dalam suatu negara hak untuk tinggal dan mengambil pekerjaan yang sah.

Komite Ahli ILO tentang Penerapan Konvensi dan Rekomendasi menegaskan bahwa:⁵

“Pembedaan yang tegas harus dibuat antara (a) keadaan dimana si pekerja migran berada dalam situasi tidak beraturan karena alasan-alasan yang tidak dapat dipertalikan dengan dia (seperti menganggur sebelum akhir kontrak kerja yang diharapkan, dalam kasus dimana majikan gagal memenuhi formalitas yang diperlukan untuk melibatkan seorang pekerja asing, dsb.), maka biaya pemulangan si migran dan juga anggota keluarganya, termasuk biaya transport, tidak boleh dibebankan kepada migran, dan (b) kasus pekerja migran berada dalam situasi tidak beraturan karena alasan-alasan yang dapat dipertalikan dengan dia, maka, hanya biaya pengusiran tidak dapat dibebankan pada si migran”.

Dalam kasus korban-korban perdagangan, *Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Para Pelaku Perdagangan Manusia, terutama terhadap Perempuan dan Anak-anak, Tambahan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir, 2000, menyerukan langkah-langkah repatriasi khusus untuk menjamin bahwa “pemulangan yang sedemikian seharusnya dilakukan dengan pertimbangan untuk keamanan orang yang bersangkutan dan untuk status dari proses-pengadilan yang berkaitan dengan fakta bahwa si orang yang bersangkutan adalah korban perdagangan dan sebaiknya bersifat sukarela” (Pasal 8) [Buku 6, Bagian 6.8]*

5.4. Masalah-masalah dan kesulitan penyatuan kembali: Bagaimana para migran yang kembali dapat menanggulanginya



Pemulangan dan penyatuan kembali sering lebih problematis dibandingkan dengan keberangkatan awal untuk bermigrasi:

- Pemulangan dan penyatuan kembali adalah bagian dari siklus migrasi yang paling kurang mendapatkan intervensi kebijakan;
- Minimnya pemantauan yang dilakukan dalam menelusuri para migran yang kembali, dan penelitian biasanya kurang mengemukakan kebutuhan, kesulitan dan keterbatasan mereka;
- Harapan untuk “pulang untuk selama-lamanya” dapat membawa banyak perempuan (dan laki-laki) rentan ke skema-skema curang yang menawarkan janji-janji investasi, andil dalam bisnis, dan sejenisnya;
- Program-program penyatuan kembali untuk membantu para migran yang kembali untuk menyesuaikan ulang dan untuk kembali ke lapangan kerja, masyarakat dan keluarga cenderung bersifat khusus dan dalam skala yang begitu terbatas sehingga mereka tidak dapat menyentuh jumlah besar migran yang kembali. Selain itu, kesadaran terhadap program-program diantara para migran adalah buruk dan, kebanyakan migran memiliki sedikit informasi mengenai jenis-jenis pelayanan yang tersedia ketika mereka pulang;
- Para perempuan migran yang kembali sering menghadapi masalah yang lebih besar dalam penyatuan kembali dibandingkan para migran laki-laki karena faktor-faktor pendorong - yang penting adalah faktor-faktor sosial budaya dibalik ketidak-setaraan jender - belum berubah atau berubah secara perlahan, meskipun para perempuan migran yang bersangkutan mungkin telah mengalami emansipasi ketika bekerja di luar negeri;
- Banyak migran yang kembali berpaling ke siklus baru migrasi - yang mencerminkan sebagian dari kegagalan intervensi terhadap penyatuan sosial dan ekonomi mereka serta kurangnya kesempatan untuk mata pencaharian yang berkelanjutan [☞ **Kotak 5.3**];
- Karena tidak mendapatkan pekerjaan, maka para migran yang kembali dapat menjadi agen perekrut yang berhubungan dengan para pedagang manusia atau mereka sendiri terlibat dalam perdagangan perempuan dan anak-anak perempuan lainnya;
- Para korban eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, terutama perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan, menghadapi kesulitan terbesar dalam penyatuan kembali, termasuk stigmatisasi dan perlakuan sewenang-wenang lebih lanjut. Sering terjadi fenomena “pintu putar”, dimana perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan jatuh kembali ke tangan pedagang yang sama atau yang lain dan kemudian diperdagangkan ulang.

Proses pemulangan dan penyatuan kembali mungkin tampaknya menjadi bagian yang paling langsung dari siklus migrasi. Para pembuat kebijakan (dan bahkan para migran sendiri)

Migrasi demi pekerjaan yang berulang-ulang dapat dilihat sebagai kegagalan dari kebijakan penggabungan kembali yang ada saat ini di banyak negara, dan kurangnya dukungan yang memungkinkan perempuan untuk menemukan pekerjaan yang produktif dan menghasilkan

menganggap bahwa para migran yang kembali akan mampu menginvestasikan tabungan mereka atau mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan, menyesuaikan perubahan apapun yang terjadi dalam kehidupan pribadi dan keluarga, dan dengan bantuan minimal untuk melanjutkan kehidupan mereka yang terhenti ketika mereka berangkat bermigrasi. Kenyataan yang ada sangatlah berbeda, dan sesungguhnya, meskipun proses pemulangan dianggap sebagai tahap akhir dari migrasi sementara, banyak perempuan dipaksa kembali masuk ke siklus migrasi, mencari kontrak kerja baru di luar negeri, karena mereka berhadapan dengan masalah yang bertumpuk pada saat kepulangan mereka. Migrasi untuk pekerjaan yang berulang-ulang dapat dilihat sebagai kegagalan dari kebijakan penyatuan kembali yang ada saat ini di banyak negara dan kurangnya dukungan yang memungkinkan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang produktif dan menghasilkan.⁵

*“Konsep penyatuan kembali sebagai proses dimana migran yang kembali dapat menuntut semacam kontrol atas kehidupan mereka melalui penghasilan mereka adalah hal yang tidak terbayangkan oleh para migran laki-laki dan perempuan yang kembali. Mereka mengungkapkan pandangan mereka bahwa Pemerintah telah gagal dalam menyediakan bantuan apapun untuk merubah keadaan yang mendorong mereka bekerja di luar negeri, dan oleh karena itu, mereka tidak mengharapkan Pemerintah dapat membantu mereka pada saat pemulangan mereka. Bagi kebanyakan dari mereka, proses pemulangan adalah pengalaman yang traumatik, mengalami pelecehan oleh petugas imigrasi dan bea cukai serta oleh para pemeras yang berkeliaran di sekitar areal bandara”.*⁶

Kotak 5.3. Proses migrasi ulang





Masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan utama yang dihadapi para migran perempuan pada saat pemulangan ke negara asal mereka dapat dibahas dari segi:⁷

- ☑ *Efek-efek sosio-psikologis, termasuk dalam beberapa kasus, trauma yang timbul dari pengalaman migrasi dan masalah-masalah kesehatan serta medis;*
- ☑ *Masalah-masalah penyatuan kembali dengan keluarga dan masyarakat: putusnya hubungan dengan pasangan dan keluarga; stigmatisasi dan penolakan oleh keluarga dan masyarakat, terutama mereka yang pernah diperdagangkan;*
- ☑ *Kesulitan-kesulitan keuangan, termasuk pulang ke rumah dengan tangan hampa, tabungan yang tidak cukup atau pemborosan tabungan dan kurangnya kesempatan investasi yang berkesinambungan;*
- ☑ *Masalah-masalah yang terkait dengan pekerjaan dan ketrampilan: kurangnya pekerjaan alternatif yang menguntungkan; kurangnya kesempatan dan dukungan untuk memulai dan menyokong usaha yang berkesinambungan; kurangnya ketrampilan atau penghilangan ketrampilan (de-skilling);*
- ☑ *Pengajuan pengaduan atas eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang.*



Dalam hal proses migrasi yang melibatkan pelacuran dan/atau perdagangan, para perempuan menghadapi sejumlah masalah tambahan lainnya pada saat mereka kembali, seperti stigmatisasi, penolakan oleh keluarga dan masyarakat, kerentanan terhadap kemungkinan diperdagangkan-ulang, ketakutan atas balas dendam dari para pedagang dan jaringan kejahatan, hutang-piutang, masalah-masalah medis termasuk infeksi HIV/AIDS, masalah psikologis dan trauma. Kadang-kadang, pada saat kembali ke negara asal mereka, para korban perdagangan dijatuhi hukuman karena penggunaan dokumen palsu, meninggalkan negara secara tidak sah atau karena bekerja di industri seks. [Buku 6]

- ☑ *Efek-efek sosio-psikologis:*

Migrasi menyangkut pengambilan dari rumah dan pemindahan, dan banyak dari migran perempuan yang kembali tidak siap atas perubahan yang sangat banyak terjadi ketika mereka tidak ada. Tidak semua perubahan ini negatif, tetapi semuanya ini meliputi banyak hal, mulai dari perubahan dalam peran dan status mereka, sampai ke perubahan dalam hubungan mereka dengan anak-anak dan suami, dalam kekuasaan pengambilan keputusan di dalam rumah tangga mereka, dan perubahan dalam kesadaran atas identitas pribadi mereka sendiri.

Bukti-bukti tentang sampai sejauh mana migrasi merupakan suatu proses yang memberdayakan adalah sangat bertentangan. Migrasi dapat memperkuat baik kerentanan maupun pemberdayaan perempuan.

Bukti-bukti tentang sampai sejauh mana migrasi merupakan suatu proses yang memberdayakan sangat bertentangan. Migrasi dapat memperkuat baik kerentanan maupun pemberdayaan perempuan.⁸ Contohnya, setelah pengalaman migrasi banyak migran perempuan yang kembali jatuh lagi ke kerentanan ekonomi karena mereka kehilangan atau menghabiskan semua tabungan mereka, atau usaha mereka gagal. Di pihak lain, banyak juga yang melaporkan adanya perasaan rasa percaya diri dan ketegasan yang lebih besar dibandingkan sebelum mereka bermigrasi. Mereka memiliki peran lebih besar dalam pembuatan keputusan di rumah tangga — termasuk dalam keputusan ekonomi dan keuangan — dan percaya bahwa keluarga dan komunitas mereka lebih menghargai mereka. Dapat juga terjadi perubahan dalam

peran jender dan pembagian kerja di dalam keluarga dalam konteks budaya tertentu, tetapi tidak di lainnya. Contohnya, salah satu penelitian menunjukkan bahwa laki-laki Thailand berperan lebih besar dalam pengasuhan anak ketika istri mereka bermigrasi, tetapi tidak demikian halnya dengan laki-laki Indonesia. Kendati demikian sedikit penelitian telah dilakukan untuk menilai perubahan jangka panjang dalam status perempuan.⁹

Proses pemulangan melibatkan sejumlah besar penyesuaian psikologis dan sosial, dan ini diperbesar secara berlipat ganda jika si perempuan adalah korban dari perdagangan dan/atau

Proses Pemulangan melibatkan sejumlah besar penyesuaian psikologis dan sosial, dan ini diperbesar secara berlipat ganda jika si perempuan adalah korban dari perdagangan dan/atau pelacuran.

pelacuran. Ada konsekuensi-konsekuensi yang besar pada ekonomi, emosional, psikologis dan fisik yang besar tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan kawan-kawan mereka. Trauma khususnya berat jika si perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual, pengguguran kandungan yang dipaksakan, hubungan seks tidak aman, dan kekejaman psikologis. Masalah-masalah ini ditambah dengan kenyataan bahwa pada saat kepulangannya, si migran perempuan mungkin mengalami penolakan dari keluarga dan komunitas, pelecehan, tes HIV/AIDS, tidak adanya dukungan — membuat dia rentan terhadap perdagangan dan/atau pelacuran selanjutnya. [👁 Buku 6]

Kotak 5.4. Bagaimana mengatasi masalah-masalah sosio-psikologis 🙌

Jika anda memberikan nasehat kepada seorang migran perempuan yang kembali, di bawah ini adalah beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh yang bersangkutan:

- ☑ *Perasaan terkucil, kesepian, kecemasan, depresi pada saat pemulangan adalah hal yang biasa. Adalah penting bagi anda untuk mencari bantuan. Carilah pelayanan-pelayanan konseling yang tersedia dengan menghubungi organisasi-organisasi pemerintah dan non-pemerintah di negara anda yang terlibat dalam memberikan bantuan bagi para migran. Anda mungkin berada dalam suatu negara yang tidak memberikan banyak pelayanan konseling, dalam hal demikian anda harus berbicara pada kawan/anggota keluarga yang dipercaya atau pada tokoh agama dalam komunitas anda.*
- ☑ *Ingatlah, mungkin banyak perempuan lain yang pernah mengalami pengalaman migrasi yang sama dalam komunitas anda. Memulai suatu kelompok pemberdayaan-diri dalam komunitas anda adalah suatu kesempatan baik bagi anda untuk berbagi pengalaman-pengalaman anda dan membahas kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan pulang kampung.*
- ☑ *Jika memungkinkan, cobalah berbicara dengan keluarga anda — pasangan, anak, dan keluarga besar anda sehingga mereka mengerti apa yang anda alami dan penyesuaian-penyesuaian yang harus anda hadapi ketika datang kembali setelah jauh dari rumah.*
- ☑ *Jika anda mengalami eksploitasi atau perlakuan sewenang-wenang, ini bahkan semakin lebih penting bagi anda untuk mencari bantuan. Apa yang telah terjadi bukanlah salah anda dan hal ini banyak dialami oleh perempuan yang bermigrasi. Anda mungkin merasa takut atau malu, tetapi penting bagi anda untuk segera mencari bantuan dengan berbicara pada seseorang yang anda percayai. Sekali lagi, memulai atau bergabung dengan kelompok pemberdayaan-diri adalah salah satu cara terbaik untuk menanggulangi apa yang pernah terjadi pada diri anda, dan pada banyak perempuan lain yang pernah bekerja di luar negeri.*
- ☑ *Banyak serikat pekerja memberikan bantuan dan dukungan bagi para pekerja migran yang kembali. Kadang-kadang mereka memiliki pusat-pusat pertemuan bagi para pekerja migran yang kembali, dan juga pelayanan konseling dan hukum.*

- ☑ **Masalah-masalah dalam penyatuan kembali dengan keluarga dan masyarakat**

Dampak dari ketidak-hadiran seorang perempuan dapat dilihat dari berbagai tingkat, mulai dari hubungan jender sampai ke hubungan antar-generasi.

Ketika seorang perempuan bermigrasi untuk pekerjaan sementara, rumah tangga yang dia tinggalkan membutuhkan pengaturan-ulang yang cukup banyak, dan pada saat

kepulungannya dia mungkin akan menghadapi sejumlah besar masalah dan perubahan yang tidak diduga sebelumnya. Banyak perempuan tidak siap untuk kenyataan-kenyataan baru ini dan kebingungan bagaimana berhadapan dengan semuanya. Penyesuaian mungkin adalah suatu proses yang panjang dan rumit, dimana para perempuan harus dapat menerima hubungan keluarga yang berubah, perbedaan dalam hal bagaimana keluarga dan komunitasnya memandang dia, identitas dirinya yang berubah, status ekonomi yang baru dari keluarganya dan bagaimana dia memandang dirinya sendiri. Dampak dari ketidak-hadiran seorang perempuan dapat dilihat dari berbagai tingkat, mulai dari hubungan jender sampai ke hubungan antar-generasi.

Struktur keluarga dan tanggungjawab dipaksa untuk berubah untuk mengakomodasi ketidak-hadiran si perempuan. Dalam beberapa keadaan, suami mungkin mengambil peran lebih besar dalam pengasuhan anak, tetapi yang lebih sering terjadi adalah anggota keluarga besar—orang tua, saudara kandung dan sanak saudara lainnya, yang mengambil tanggung jawab pengasuhan anak. Di Filipina, sebagai contoh, hal ini berakibat pada pembalikan dari tren menuju keluarga nuklir, karena keluarga besar sekarang berperan lebih besar dalam pengasuhan anak dan tanggungjawab keluarga.¹⁰ Perubahan peran ini dapat juga memberikan beban tambahan pada generasi yang lebih tua karena mereka yang mengambil alih tanggung jawab keluarga atas anak-anak dan cucu-cucu mereka.

Para migran perempuan yang kembali mungkin sulit untuk melanjutkan perannya di dalam keluarga, dan di dalam hubungan dia dengan berbagai anggota keluarga yang lain. Hal ini terutama mungkin terjadi ketika para pekerja migran pada saat bekerja di luar negeri tidak dapat berkomunikasi dengan keluarganya di rumah. Para perempuan yang mengalami perlakuan sewenang-wenang dan tidak dapat memelihara hubungan dengan keluarga mereka yang sering mendapatkan diri mereka sangat sulit untuk bersatu kembali kedalam keluarga mereka ketika mereka kembali.

Para migran perempuan yang kembali mungkin kadang-kadang mendapatkan bahwa ketidak-hadiran dia berakibat buruk bagi perkawinannya. Perpisahan dalam jangka waktu lama menimbulkan ketegangan dalam perkawinan. Ketidaksetiaan, keterasingan dan perceraian bukanlah sesuatu yang tidak umum. Dalam suatu penelitian mengenai para migran perempuan yang kembali, banyak yang melaporkan kejadian-kejadian kecanduan alkohol, kemalasan dan keengganan para suami untuk melanjutkan kembali peran tradisional laki-laki sebagai pencari nafkah. Beberapa melaporkan bahwa pengiriman uang yang mereka kirim telah dibelanjakan di barang-barang konsumsi yang menyolok atau bahkan untuk perempuan lain.

Migrasi para ibu dibandingkan dengan migrasi para ayah dapat memiliki akibat lebih buruk pada anak-anak yang ditinggalkan. Banyak migran perempuan dipaksa untuk pulang lebih dini karena anak-anak mereka mengalami masalah-masalah psikologis, emosional dan masalah-masalah penyesuaian lainnya selama mereka tidak ada, seperti kehamilan dini yang tidak dikehendaki, penyalahgunaan obat bius, kenakalan remaja, putus sekolah atau prestasi buruk di sekolah, mengalami kekejaman fisik atau seksual.¹¹

Para ibu yang kembali sering menghadapi masalah dalam hubungan mereka dengan anak-anak yang mereka tinggalkan. Banyak perempuan kecewa karena kurangnya keakraban dengan anak mereka pada saat mereka kembali, dan mendapatkan kesulitan menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa anak-anak mereka telah tumbuh tanpa mereka dan jauh dari mereka. Meskipun dalam beberapa kasus, anak-anak mengerti pengorbanan yang dibuat oleh ibu mereka untuk mereka, tetapi kurangnya rasa hormat dari anak-anak adalah keluhan yang sangat umum dari para ibu yang kembali.

Kotak 5.5. Bagaimana mengatasi masalah-masalah penyatuan kembali dengan keluarga dan dengan masyarakat 👍

Jika anda memberikan nasehat kepada para migran perempuan yang kembali, di bawah ini adalah beberapa hal yang anda dapat dipertimbangkan oleh yang bersangkutan:

- ☑ *Anak-anak anda telah berkembang dengan pesat ketika anda tidak ada. Anda mungkin masih berpikir tentang mereka sebagaimana ketika anda meninggalkan mereka. Tetapi telah banyak perubahan dalam kehidupan mereka, dan mereka mungkin telah terikat dengan dan dipengaruhi oleh anggota keluarga anda yang lain. Mungkin menyakitkan bagi anda karena mereka tidak dekat dengan anda sebagaimana yang anda harapkan. Jangan khawatir, ada cukup banyak waktu untuk menjadi akrab kembali dengan mereka dan menjalin hubungan dengan mereka.*
- ☑ *Memanjakan anak anda dengan berbagai hadiah bukanlah jawaban—ini adalah cara menghabiskan tabungan anda dan menjamin bahwa anda harus pergi ke luar negeri lagi. Jika mereka sudah cukup dewasa, jelaskan pada mereka bahwa kepergian anda adalah untuk mencari uang demi mereka dan masa depan mereka, dan jika keluarga cukup hati-hati dengan keuangan maka anda tidak perlu lagi harus pergi ke luar negeri untuk mencari uang.*
- ☑ *Adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari bahwa hubungan anda dengan suami anda telah berubah. Adalah penting untuk meluangkan waktu bersama, membicarakan perubahan-perubahan yang ada dan membangun kembali hubungan anda.*
- ☑ *Keluarga besar anda mungkin telah membantu suami dan anak-anak anda ketika anda pergi. Pastikan bahwa mereka mengerti betapa besar penghargaan anda atas bantuan mereka, dan mencari jalan bersama untuk membuat masa peralihan yang akan membuat anda mampu melanjutkan atau membangun kembali peran dan tanggung jawab anda.*
- ☑ *Jangkaulah perempuan lain dalam komunitas anda yang telah kembali dari bekerja di luar negeri. Mereka mengalami masalah-masalah dan penyesuaian-penyesuaian yang sama dengan anda, dan akan mengerti apa yang tengah anda alami. Pertemuan-pertemuan biasa dengan kelompok-kelompok pendukung untuk membahas pengalaman anda akan membantu anda menghadapi perubahan-perubahan dalam hidup anda.*

☑ **Kesulitan-kesulitan keuangan:**

Para migran yang kembali yang pernah menjadi korban perlakuan sewenang-wenang dan/atau eksploitasi sering juga berada dalam jeratan hutang yang berat. Ketika

Mungkin tampaknya mengejutkan bahwa begitu banyak perempuan migran yang pulang jatuh kembali ke dalam kemiskinan, mengingat bahwa tujuan dari migrasi adalah untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan mengumpulkan tabungan. Namun para migran sementara sering tidak dapat menabung sebanyak yang biasanya diharapkan

dipaksa untuk kabur dari seorang majikan, dalam banyak kasus para migran dilarang oleh undang-undang untuk mengambil pekerjaan yang dibayar di majikan lain, dan sering kemudian diusir dari negara tersebut. Mereka mungkin pulang ke negara asal mereka sebelum menerima gaji mereka atau sebelum menutupi jumlah hutang yang dipinjam untuk membiayai perjalanan mereka semula, dan dalam beberapa kasus, mereka mungkin telah dipaksa untuk membayar biaya repatriasi mereka sendiri. Mereka juga mungkin berhutang pada perekrut (atau pedagang) mereka yang pertama, keluarga atau orang lainnya. Dalam beberapa kasus, seorang migran yang kembali mungkin pulang dengan tangan hampa—terutama sebagai akibat deportasi setelah diperdagangkan, dan mungkin tidak akan pernah dapat melunasi hutang-hutang mereka.

Kesulitan-kesulitan keuangan mempengaruhi banyak migran yang kembali, tidak hanya mereka yang pernah mengalami eksploitasi, perlakuan sewenang-wenang atau

yang telah diusir dan dideportasi. Mungkin tampaknya mengejutkan bahwa begitu banyak perempuan migran yang pulang jatuh kembali ke dalam kemiskinan, mengingat bahwa tujuan dari migrasi adalah untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan mengumpulkan tabungan. Tetapi mereka yang kembali sering mengalami kesulitan keuangan karena:

- Mereka tidak dapat menabung sebanyak yang biasanya diharapkan oleh pemerintah dan keluarga mereka sendiri;
- Uang kiriman yang mereka kirim ke rumah telah dibelanjakan oleh keluarga mereka untuk barang-barang konsumsi semata;
- Mereka membelanjakan uang hasil jerih payah mereka untuk berbagai hadiah dan barang-barang konsumsi untuk keluarga;
- Mereka sendiri telah terbiasa dengan tingkat belanja yang lebih tinggi;
- Mereka masih berhutang atas biaya-biaya migrasi mereka;
- Mereka kehilangan tabungan hasil jerih payah mereka melalui investasi yang tidak bijaksana, usaha bisnis yang tidak berhasil, dsb.

Hal ini sebagian dapat dipandang sebagai kegagalan dari pelatihan dalam proses pra-keberangkatan—para migran tidak secara memadai disadarkan mengenai pentingnya menabung, tidak hanya melalui pengiriman uang ke kampung tetapi juga untuk diri mereka sendiri dan untuk saat kepulangan mereka. Ini juga jelas sebagai konsekuensi dari pelayanan dan sarana keuangan yang tidak memadai, baik di negara asal maupun negara tujuan.

Penelitian mengenai penggunaan uang kiriman dan dampaknya pada ekonomi lokal telah menunjukkan bahwa para migran yang kembali sering menggunakan tabungan dan uang kiriman mereka untuk barang-barang konsumsi.¹² Meski standar kesehatan dan kehidupan mungkin meningkat, namun sering investasi yang kecil untuk tujuan-tujuan yang produktif. Konsumerisme tingkat tinggi ini menciptakan gaya hidup yang semu dan tidak berkesinambungan yang sering memaksa para migran yang kembali untuk memulai siklus baru migrasi ke luar negeri. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa uang kiriman telah merubah penampilan kampung-kampung—dimana rumah para pekerja migran dapat dikenali dari antena televisi dan barang-barang konsumsi rumah tangga lainnya atau bangunan baru. Penelitian lain menunjukkan perbedaan antara migran yang berhasil dan tidak berhasil, dimana migran yang berhasil tidak mengalami masalah dengan keluarga mereka, sedangkan mereka yang tidak membawa uang yang diharapkan mengalami ketegangan yang meningkat dengan keluarga. Banyak migran yang kembali juga menemukan bahwa komunitas mereka menganggap mereka kaya dan sering menekan mereka untuk memberikan pinjaman atau hadiah.

Kotak 5.6. Bagaimana menanggulangi persoalan keuangan 🍷

Jika anda memberikan nasehat kepada para migran perempuan yang kembali, di bawah ini adalah beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh yang bersangkutan:

- ☑ *Pertama-tama, dan yang penting, ketika bekerja di luar negeri janganlah mengirim seluruh penghasilan anda ke rumah untuk belanja keluarga. Pastikan bahwa anda memegang sejumlah uang sebagai tabungan anda sendiri. Keluarga anda mungkin membelanjakan semua uang kiriman sehingga ketika anda kembali tidak ada uang untuk bertumpu. Anda harus menanamkan dalam keluarga anda mengenai pentingnya berbelanja secara bijaksana dan menabung demi masa depan.*
- ☑ *Ketika mengirimkan uang ke rumah, gunakanlah saluran keuangan yang benar dan aman. Selalu cari tahu nilai kurs mata uang yang wajar — terutama jika anda menggunakan saluran tidak resmi, sehingga anda tidak rugi dalam transaksi dan keluarga anda akhirnya mendapatkan kurang dari semestinya.*
- ☑ *Cobalah menabungkan sebagian dari penghasilan anda secara teratur. Carilah nasehat mengenai bagaimana anda dapat menjamin bahwa tabungan anda aman baik di lembaga keuangan di negara dimana anda bekerja atau di negara asal anda. Bukalah rekening bank di negara anda sebelum anda pergi ke luar negeri dan kirimkanlah uang anda ke rekening tersebut secara teratur. Mungkin juga terdapat koperasi tabungan yang dibentuk oleh para pekerja migran di negara tujuan anda. [👁 Kotak 5.20 sampai 5.22 di bawah]*
- ☑ *Jika anda dapat menabung sejumlah uang dari pekerjaan anda di luar negeri, ingatlah godaannya adalah menghabiskan tabungan anda untuk hadiah dan belanja. Tetapi ini adalah salah satu cara yang membuat tabungan anda sama sekali tidak akan bertahan lama.*
- ☑ *Jika anda berniat untuk membeli barang-barang konsumsi yang besar untuk dibawa pulang, pertama-tama cari tahu mengenai kebijakan perpajakan di negara anda—apa saja barang-barang bebas bea yang diperbolehkan dibawa dan berapa mahal bea yang harus anda bayar.*
- ☑ *Anda perlu mulai berpikir tentang bagaimana anda akan menggunakan uang anda untuk menghasilkan pendapatan ketika anda pulang kampung. Sering instansi-instansi pemerintah dan non-pemerintah memberikan pelayanan pelatihan untuk membantu anda memulai suatu usaha. Cari tahu apa yang tersedia dan daftarkan diri untuk mengikuti suatu kursus. Bicaralah pada mereka yang telah berhasil menjalankan usaha mereka tentang bagaimana anda dapat belajar dari mereka. Ini mungkin adalah jawaban untuk menjamin bahwa anda tidak harus lagi mencari pekerjaan di luar negeri.*
- ☑ *Cari tahu tentang skema tabungan dan koperasi tabungan bersama yang mungkin beroperasi di lingkungan anda. Hal ini akan membantu menjamin bahwa uang anda tidak akan dibelanjakan seketika.*
- ☑ *Hati-hati dengan tabungan anda. Ada saja orang-orang yang akan mencoba mengelabui anda karena uang anda yang berharga. Jangan sekali-kali memberikan tabungan anda kepada siapapun kecuali jika anda benar-benar yakin bahwa hal ini adalah skema tabungan yang resmi. Juga waspada terhadap orang asing yang mungkin mendekati anda di pusat-pusat pertemuan, bandara, dan sejenisnya.*
- ☑ *Jelaskan pada anggota keluarga anda dan orang-orang dalam lingkungan anda yang mungkin memberikan tekanan pada anda, katakanlah pada mereka bahwa tabungan anda terbatas dan tidak akan awet*
- ☑ *Mulailah melakukan perencanaan keuangan. Pikirkanlah berapa banyak uang yang anda perlukan untuk beberapa tahun mendatang dan bagaimana menganggarkan tabungan anda agar awet. Ada serikat pekerja dan Ornop/LSM yang dapat membantu anda dalam perencanaan semacam ini.*
- ☑ *Jika anda tidak dapat menabung, jangan putus asa. Anda mungkin tidak perlu lagi mencari pekerjaan di luar negeri. Cari tahu dari teman-teman dan relasi anda tentang pekerjaan yang mungkin tersedia di lingkungan sekitar anda. Atau berpikir untuk bekerja-mandiri. Pikirkanlah pelayanan-pelayanan dalam komunitas anda yang mungkin dapat anda berikan — mungkin sesuatu berdasarkan pada pengalaman anda bekerja di luar negeri. Cari tahu tentang kesempatan pelatihan. Mungkin juga ada bantuan keuangan yang tersedia yang tidak anda ketahui keberadaannya. Ada organisasi-organisasi yang dapat membantu anda dengan jenis-jenis informasi yang anda butuhkan.*
- ☑ *Jika anda mengalami eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, atau mungkin anda juga berada dalam hutang yang besar. Cari tahu mengenai hak-hak anda. Ornop/LSM dan serikat pekerja dapat membantu anda untuk menemukan bantuan hukum untuk menuntut kembali uang yang diambil baik oleh majikan anda maupun oleh perusahaan jasa perekrutan.*
- ☑ *Periksa kontrak kerja anda dan cari tahu mengenai hukum. Kemungkinan besar, anda seharusnya tidak membayar biaya kepulangan anda. Jika seseorang mengenakan biaya ini pada anda, cari tahu bagaimana anda dapat memperoleh uang anda kembali. Ornop/LSM dan serikat pekerja dapat memberikan nasehat pada anda mengenai hal ini.*
- ☑ *Ingatlah anda mempunyai hak berdasarkan undang-undang - cari tahu apa saja dan bagaimana anda dapat menuntut uang tersebut.*

☑ **Masalah-masalah yang terkait dengan pekerjaan dan ketrampilan:**

Tidak akan terjadi proses penyatuan kembali jika hal ini tidak menciptakan mata pencaharian alternatif dan sarana keberlangsungan hidup bagi para migran yang kembali.

Para pekerja bermigrasi untuk mencari penghasilan yang lebih baik. Titik berat dari agenda ekonomi mereka harus diakui. Tidak akan terjadi proses penyatuan hal ini tidak menciptakan mata pencaharian alternatif dan sarana keberlangsungan hidup bagi para migran yang kembali".¹³ Migran yang kembali berhadapan dengan sejumlah masalah yang berkaitan dengan pekerjaan dan ketrampilan. Keadaan lapangan kerja yang pada awalnya mendorong mereka untuk bermigrasi sering tidak berubah; tingkat pengangguran di tempat asal mereka tetap tinggi dan sering terjadi mereka tidak dapat menemukan pekerjaan yang memberikan penghasilan sebanyak pekerjaan mereka di luar negeri. Dengan demikian, pilihan penyatuan kembali ekonomi mereka adalah terbatas: mengambil pekerjaan apa saja yang tersedia ketika pulang dan/atau melakukan pekerjaan mandiri serta mendirikan usaha kecil dengan tabungan mereka.¹⁴ Namun demikian, tingkat kegagalan dari usaha semacam ini adalah tinggi, sebagian karena tidak adanya pelatihan yang memadai mengenai pengelolaan usaha dan kewirausahaan, serta kurangnya bimbingan dan dukungan. Seorang migran perempuan yang pulang ke rumah dengan tabungan tidak berarti dia seorang pebisnis perempuan.

Proses migrasi itu sendiri mungkin mengakibatkan *de-skilling* atau penghilangan ketrampilan. Banyak perempuan yang bekerja di luar negeri dalam pekerjaan-pekerjaan yang jauh dibawah pendidikan dan ijazah mereka, tetapi menawarkan upah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bekerja di negara asal mereka sendiri. Perempuan dengan ijazah perguruan tinggi berakhir bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga, penghibur, dan buruh pabrik di perusahaan manufaktur. Dalam beberapa kasus, pekerjaan mereka di luar negeri menghilangkan dari negara asal mereka ketrampilan-ketrampilan yang sangat dibutuhkan, seperti perawat terlatih atau guru terlatih.¹⁵

Tentu saja, tidak selalu terjadi penghilangan ketrampilan. Dalam beberapa kasus, terdapat perolehan ketrampilan dari pengalaman migrasi. Migran yang kembali mendapatkan ketrampilan di luar negeri — para PRT memperoleh ketrampilan dalam cara masak internasional atau mengurus manula, anak-anak dengan kebutuhan khusus atau orang cacat; penghibur menjadi trampil dalam bernyanyi dan menari (walau beberapa dari mereka mungkin berakhir di pelacuran); pekerja pabrik memperoleh ketrampilan menggunakan peralatan, teknologi baru atau ketrampilan tangan. Para pekerja migran mungkin juga mendapat ketrampilan lain, seperti pengelolaan waktu, membuat anggaran dan kesanggupan untuk dapat akrab dengan berbagai macam orang.¹⁶ Tetapi mereka memerlukan bantuan dan dukungan teknis dalam menentukan bagaimana mereka dapat memanfaatkan ketrampilan-ketrampilan yang diperoleh ini secara produktif.

☑ **Mengajukan pengaduan atas eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang:**

Para pekerja migran yang menderita eksploitasi atau perlakuan sewenang-wenang mungkin tidak dapat mengajukan pengaduan atau mencari ganti rugi secara hukum ketika bekerja di luar negeri. Mereka seharusnya masih dapat melakukan ini ketika mereka kembali ke negara mereka. Para pekerja migran perempuan terutama perlu sadar akan hak-hak mereka berdasarkan hukum dan tahu bagaimana menuntut hak-hak tersebut. Di beberapa negara, hukum menetapkan bahwa perusahaan jasa perekrutan secara bersama-sama bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh para majikan terhadap para pekerja.

Kotak 5.7. Bagaimana mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan pekerjaan dan ketrampilan: 🤝

Jika anda memberikan nasehat kepada para migran perempuan yang kembali, di bawah ini adalah beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh yang bersangkutan:

- ☑ *Pergi ke kantor pelayanan tenaga kerja setempat untuk mencari tahu tentang kesempatan kerja yang ada. Kantor pelayanan tenaga kerja setempat mungkin dapat membantu anda untuk menemukan pekerjaan bergaji yang cocok.*
- ☑ *Kajilah ketrampilan-ketrampilan yang anda pelajari di luar negeri. Walaupun anda mengerjakan pekerjaan di bawah kualifikasi anda, mungkin saja anda mempelajari beberapa ketrampilan yang baru. Jika anda melakukan pekerjaan rumah tangga, misalnya, anda mungkin telah belajar mengelola keuangan, memasak, mengurus anak, dan sejenisnya. Apakah ketrampilan-ketrampilan ini dapat membantu anda menyediakan suatu jasa pelayanan dalam komunitas anda?*
- ☑ *Anda barangkali dapat menggunakan beberapa ketrampilan yang anda peroleh di luar negeri untuk memulai suatu usaha. Jika anda memulai suatu usaha, ingatlah bahwa penting untuk mendapatkan bantuan dan nasehat sebanyak mungkin. Jangan tergoda untuk memulai usaha yang sudah terlalu banyak dilakukan orang. Kesempatan pasar harus disimak dengan teliti. Tingkat kegagalan dari usaha kecil sering sekali sangat tinggi.*
- ☑ *Cari tahu tentang jenis-jenis program yang ditawarkan oleh organisasi-organisasi pemerintah dan non-pemerintah untuk pelatihan ketrampilan atau kewirausahaan, program-program pinjaman dan investasi serta menyelenggarakan koperasi.*
- ☑ *Bimbingan dan dukungan juga penting. Banyak orang memulai usaha hanya untuk gagal karena mereka tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul. Bicaralah dengan orang-orang dalam lingkungan anda yang mempunyai usaha yang berhasil, dan belajar dari pengalaman mereka. Banyak masyarakat juga memiliki berbagai jejaring pemilik usaha kecil. Cari tahu tentang pertemuan-pertemuan mereka dan ikut terlibat.*
- ☑ *Cari tahu tentang kesempatan-kesempatan pembiayaan-mikro. Di beberapa negara ada skema tabungan kelompok dan kesempatan investasi bagi migran yang kembali.*
- ☑ *Periksalah lembaga-lembaga pemerintah setempat, organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha, Ornop/LSM yang dapat membantu anda mendapatkan kesempatan pelatihan untuk memperoleh ketrampilan baru untuk masuk ke pekerjaan yang lain.*

Kotak 5.8. Bagaimana mengajukan pengaduan atas eksploitasi 🤝

Jika anda memberikan nasehat kepada para migran perempuan yang kembali, di bawah ini adalah beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh yang bersangkutan:

- ☑ *Jika anda pernah menjadi korban eksploitasi atau perlakuan sewenang-wenang tetapi tidak dapat mencari ganti rugi ketika bekerja di luar negeri, anda masih dapat melakukannya di negara asal anda — cari tahu apa saja hak-hak anda berdasarkan undang-undang.*
- ☑ *Cari bantuan hukum untuk mengajukan pengaduan dan tuntutan anda terhadap majikan dan/atau agen perekrut anda. Pelayanan bantuan hukum akan dapat membantu anda mempersiapkan affidavit pengaduan dan persyaratan-persyaratan lainnya untuk mengajukan kasus anda.*
- ☑ *Berikan fotokopi kontrak kerja anda dan semua dokumen-dokumen pendukung (kwitansi, laporan medis) untuk menunjang pengaduan anda.*
- ☑ *Anda mungkin dapat mengajukan permintaan ganti rugi — mengajukan tuntutan uang — dengan alasan-alasan berikut:*
 - *Pelanggaran kontrak: jika majikan tidak mengikuti syarat-syarat kontrak seperti pembayaran gaji di bawah nilai yang disetujui atau gaji yang tidak dibayar;*
 - *Pengakhiran kontrak secara tidak resmi: jika anda diberhentikan tanpa alasan dan pembelaan diri;*
 - *Pemberhentian yang dibuat: jika anda dipaksa untuk mengakhiri kontrak karena praktek-praktek pweburuhan yang tidak adil atau perlakuan tidak manusiawi;*
 - *Kerusakan moral: jika anda mengalami berbagai macam bentuk perlakuan sewenang-wenang, pelecehan atau ancaman yang mempengaruhi masa depan dan harga diri anda sebagai seseorang;*
 - *Kerusakan yang sesungguhnya: jika anda mengalami cedera atau kerusakan fisik yang sesungguhnya.*

5.5. Bantuan dan dukungan bagi para pekerja migran yang kembali



Penyatuan kembali perlu dihadapi:

- ☑ *Dari tahap pra-keberangkatan, sampai ke seluruh siklus migrasi. Para migran perempuan perlu memulai persiapan kepulangan mereka mulai dari awal proses migrasi;*
- ☑ *Baik oleh negara asal maupun negara tujuan;*
- ☑ *Tidak hanya pada tingkat perseorangan tetapi juga pada tingkat makro;*
- ☑ *Dengan memberikan perhatian khusus kepada para migran yang kembali yang menjadi korban perdagangan, perlakuan sewenang-wenang dan eksploitasi.*
- ☑ *Penyatuan kembali dimulai dari tahap pra-keberangkatan:*

Penyatuan kembali atau reintegrasi adalah proses yang tidak boleh dimulai pada tahap akhir dari kontrak pekerjaan sementara di luar negeri, tetapi harus dimulai bahkan sebelum emigrasi. Sistem pendaftaran dan pelatihan pra-keberangkatan yang benar dapat menjadi persiapan tidak hanya untuk emigrasi tetapi juga untuk kepulangan. Dalam proses pra-keberangkatan, informasi dan pelatihan yang memadai harus digabungkan untuk memungkinkan para calon migran merencanakan kepulangan mereka dalam hal seperti:

 - Bagaimana agar kontrak kerja mereka secara jelas menyebutkan siapa yang bertanggungjawab atas pemulangan dan repatriasi mereka setelah akhir jangka waktu kontrak;
 - Bagaimana mengirimkan uang melalui saluran yang aman ketika bekerja di luar negeri;
 - Bagaimana menabung selama masa migrasi;
 - Bagaimana agar tabungan mereka digunakan untuk investasi yang produktif dan bukan hanya untuk tujuan-tujuan konsumsi;
 - Bagaimana memelihara hubungan dengan negara asal melalui surat-menyurat yang teratur dengan keluarga, mengikuti berita tentang apa yang terjadi di negara asal, dan sejenisnya;
 - Bagaimana menyiapkan diri untuk berbagai jenis perubahan dan penyesuaian di keluarga dan masyarakat dimana mereka nanti akan kembali;
 - Bagaimana mencari tahu tentang jenis-jenis pelayanan dan sumber daya yang disediakan oleh Pemerintah, organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha serta organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk membantu proses penyatuan kembali mereka dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan mata pencaharian yang berkelanjutan di negara asal mereka;
 - Bagaimana menyiapkan diri secara lebih baik untuk kepulangan dan bersatu kembali pada saat masih berada di negara penerima, melalui kelompok-kelompok tabungan penyatuan kembali dan menyelenggarakan/menanamkan modal di proyek-proyek ekonomi di negara asal [👁 Kotak 5.20 dan 5.21 di bawah ini]
- ☑ *Baik negara-negara asal maupun negara-negara tujuan perlu memberikan struktur pendukung yang memadai agar pemulangan dan penyatuan kembali para migran dapat berhasil:*

Pemerintah negara-negara asal maupun negara-negara tujuan, organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha, Ornop dan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya yang bekerja dengan

para migran harus melaksanakan berbagai macam langkah untuk membantu para migran agar berhasil pulang ke rumah, komunitas dan keluarga mereka. Langkah-langkah ini termasuk kesempatan untuk pekerjaan mandiri, akses ke pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan ketrampilan baru, informasi tentang pelayanan dan hak-hak hukum, sarana yang benar untuk tabungan dan pengiriman uang, jaminan untuk mengalih namakan sumbangan jaminan sosial dan hak-hak lain yang diperoleh ketika berada di luar negeri, pelayanan perawatan kesehatan dan konseling serta bantuan hukum.

Sehubungan dengan repatriasi, khususnya mereka yang diperdagangkan dan dieksploitasi, negara-negara asal dan tujuan harus menentukan standar minimum pertanggungjawaban dan bertekad untuk menghukum para pedagang dan pelaku eksploitasi.

Perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral antara negara-negara asal dan tujuan dapat juga membantu menjamin dimana pada saat repatriasi diperlukan, proses yang terjadi berjalan sedapat mungkin mulus dan tak bermasalah [👁 **Bagian 5.5.3 tentang Bantuan Logistik**]. Ornop/LSM dan kelompok-kelompok masyarakat sipil di negara tujuan juga sering memberikan dukungan yang tidak ternilai kepada para migran yang sedang dalam proses pemulangan, khususnya dalam keadaan dimana para migran yang pernah mengalami perlakuan sewenang-wenang dan eksploitasi.

Negara-negara tujuan dapat juga mempermudah proses pemulangan dan penyatuan kembali dengan membentuk struktur yang memungkinkan para migran untuk tetap mengikuti perkembangan nasional dan lokal terbaru di negara asal mereka, menganjurkan para pekerja migran untuk mengembangkan jejaring sosial dengan sesama yang berasal dari negara asal mereka, dan juga menjamin agar para migran untuk dapat menjaga hubungan yang teratur dengan keluarga mereka.

☑ *Cakupan dari kebijakan penyatuan kembali tidak hanya pada tingkat perseorangan tetapi juga pada tingkat makro:*

Tidaklah cukup hanya sekedar menghadapi proses penyatuan kembali pada tingkat

migran perseorangan. Negara-negara asal perlu memiliki kebijakan makro yang efektif untuk menanggulangi akar penyebab migrasi dan re-migrasi — yang terpenting, kemiskinan, pengangguran dan diskriminasi gender. Ketergantungan pada pekerjaan di luar negeri adalah jalan yang tidak stabil untuk ekonomi nasional sehingga pemerintah perlu menemukan solusi jangka panjang untuk memecahkan masalah-masalah ini. Banyak migran yang kembali dipaksa untuk masuk ke siklus migrasi oleh kurangnya alternatif ekonomi di komunitas asal mereka. Ini menandakan kegagalan tidak hanya dalam program kembali tetapi kebijakan makro ekonomi yang lebih luas.

Negara asal perlu memiliki kebijakan makro yang efektif untuk menanggulangi akar penyebab migrasi dan re-migrasi - yang terpenting, kemiskinan, pengangguran dan diskriminasi gender. Ketergantungan pada pekerjaan di luar negeri adalah jalan yang tidak stabil untuk ekonomi nasional sehingga pemerintah perlu menemukan solusi jangka panjang untuk memecahkan masalah-masalah ini

“Program penyatuan kembali yang ada saat ini cenderung memfokuskan pada orang-orang yang diperdagangkan dan berorientasi korban atau ‘victim-oriented’. Program-program yang lebih komprehensif dan berorientasi pembangunan sosial perlu dijelajahi, khususnya sejak Thailand secara teratur mendeportasi puluhan ribu migran tidak tercatat, termasuk orang-orang Kamboja. Terutama ada kebutuhan yang segera dan strategis untuk menciptakan kesempatan kerja di desa-desa dimana migran yang kembali dapat melibatkan diri. Program-program mata pencaharian setempat/ alternatif ekonomi dapat memasukkan akses ke pinjaman darurat dengan bunga yang masuk akal, tabungan migran untuk kewirausahaan sosial, [...] bantuan mata pencaharian, pelatihan dan bantuan teknis. Prakarsa-prakarsa saat ini dalam pengembangan

*masyarakat dan pembangunan kembali sistem pendukung masyarakat (terutama bagi mereka yang mengalami masalah-masalah keluarga, keuangan dan keberlangsungan hidup) perlu ditingkatkan dan diperkuat. Agenda-agenda pengembangan masyarakat dan pembangunan sosial nasional perlu secara tegas berorientasi jender karena pola-pola migrasi mengikuti, dan memperkuat, penindasan dan prasangka jender yang ada”.*¹⁷

- ☑ *Para Migran yang kembali yang menjadi korban perdagangan, perlakuan sewenang-wenang dan eksploitasi memerlukan perhatian khusus:*

Mereka mungkin memerlukan bantuan hukum, konseling sosio-psikologis, pelayanan kesehatan, bantuan ekonomi — yang kesemuanya harus ditangani secara peka dan menghormati kerahasiaan mereka. Tiadanya dukungan dan kesempatan yang memadai pada saat kepulangan mereka menempatkan mereka pada risiko yang lebih tinggi terhadap perlakuan sewenang-wenang dan eksploitasi yang berulang, termasuk diperdagangkan kembali.

Ada beberapa kelompok migran yang kembali yang memerlukan perhatian khusus, terutama mereka yang pernah diperdagangkan, diperlakukan sewenang-wenang dan dieksploitasi. Bantuan Pemulangan dan repatriasi serta langkah-langkah penunjang bagi para korban perdagangan akan dibahas dalam Buku 6 [👁 **Buku 6, Bagian 6.8**]. Tetapi para migran terdaftar yang diperlakukan sewenang-wenang atau dieksploitasi ketika bekerja di luar negeri juga memerlukan perhatian khusus untuk membantu mereka dalam pemulangan mereka serta rehabilitasi sosial dan ekonomi mereka.

Pertama-tama, para pekerja migran yang diperdagangkan, diperlakukan sewenang-wenang atau dieksploitasi memerlukan bantuan untuk pulang kembali ke negara mereka atau untuk dapat tinggal di negara tujuan pada saat mereka menuntut ganti rugi. Di beberapa negara tujuan, pegawai kedutaan negara asal secara teratur terlibat dalam repatriasi warga negara mereka yang telah diperlakukan sewenang-wenang atau mereka yang menjadi migran tidak terdaftar. Di negara-negara tujuan dimana kurang perwakilan diplomatik atau campur tangan oleh negara asal, maka eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang lebih banyak terjadi dan langkah-langkah yang sifatnya menghukum lebih mungkin dilakukan terhadap para korban.

Banyak migran perempuan yang kembali pernah melalui berbagai macam trauma, mulai dari kekerasan seksual, kekerasan fisik dan teror psikologis. Mereka mungkin mengalami gangguan kesehatan, kehilangan rasa percaya diri dan kemampuan untuk mempercayai. Dalam beberapa keadaan, begitu diselamatkan dari situasi eksploitatif, mereka diperlakukan sebagai migran tidak resmi dan penjahat, dan dengan demikian mengorbankan korban lebih lanjut. Selain itu, mereka sering menghadapi penolakan dan pengasingan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan mereka. Korban perlakuan sewenang-wenang yang dapat pulang kembali ke negara asal atau lingkungan mereka, baik secara sukarela atau sebagai akibat dari deportasi, berhadapan dengan masalah yang berlipat ganda. Untuk menghadapi masalah-masalah ini, para migran perempuan yang kembali mungkin memerlukan bantuan hukum, konseling sosio-psikologis, pelayanan kesehatan, bantuan ekonomi — yang kesemuanya harus ditangani secara peka dan menghormati kerahasiaan mereka. Tiadanya dukungan dan kesempatan yang memadai pada saat pemulangan mereka menempatkan mereka dalam risiko yang lebih tinggi terhadap perlakuan sewenang-wenang dan eksploitasi yang berulang, termasuk diperdagangkan kembali.

5.5.1. Peran pemerintah

T a n g g u n g j a w a b pemerintah untuk menyediakan kebijakan dan program penggabungan kembali yang efektif tidak dapat terlalu dibesar-

Peran pemerintah—terutama pemerintah negara-negara asal—adalah sangat penting, karena untuk program kembali apapun agar berhasil, pemerintah perlu menjangkau massa pekerja migran yang kembali.

besarkan, terutama karena banyak pemerintah yang secara aktif menganjurkan migrasi sementara sebagai bagian dari kebijakan lapangan kerja dan ekonomi mereka untuk mendapatkan mata uang asing yang berharga dan untuk mengatasi masalah pengangguran. Migran yang kembali tidak harus mengatasi sendiri masalah-masalah penyatuan kembali mereka.

Peran pemerintah—terutama pemerintah negara-negara asal—adalah sangat penting, karena untuk program penyatuan kembali apapun agar berhasil, pemerintah perlu menjangkau massa pekerja migran yang kembali. Meskipun organisasi-organisasi swasta dan non-pemerintah lainnya, serikat pekerja, kelompok pengusaha, kelompok keagamaan dan organisasi-organisasi perempuan memberikan bantuan yang berharga kepada para migran yang kembali, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau kelompok sasaran yang besar. Dan sesungguhnya, organisasi swasta, Ornop/LSM dan badan amal sering turutan karena kurangnya prakarsa pemerintah. Tetapi mereka tidak mempunyai sumber daya untuk memberikan sesuatu selain campur-tangan yang bersifat sementara atau berskala kecil, juga tidak mampu menyediakan lingkungan kebijakan yang menunjang.



Program pemulangan dan penyatuan kembali bantuan pemerintah harus memiliki beberapa unsur kunci tertentu:

- dilaksanakan dan dikoordinasikan pada tingkat nasional;
- dapat diakses baik oleh migran yang kembali secara sukarela maupun secara paksa;
- melibatkan peran serta aktif dan inklusif dari para migran yang kembali;
- peka jender dan memperhitungkan bahwa para pekerja migran perempuan dan laki-laki mungkin tidak menghadapi jenis masalah pemulangan dan penyatuan kembali yang sama;
- memberikan perhatian khusus, termasuk bantuan dan dukungan yang bersasaran khusus, kepada para migran yang mengalami eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang atau diperdagangkan.



Untuk mendukung dan mempermudah pemulangan dan penyatuan kembali para pekerja migran, pemerintah negara-negara asal harus:¹⁸ [☞ Kotak 5.9 dan 5.10]

- Menyusun undang-undang dan peraturan-peraturan yang jelas mengenai tanggung jawab untuk repatriasi. Peraturan semacam ini harus menyebutkan dengan jelas tanggung jawab perusahaan-perusahaan jasa tenaga kerja dan syarat-syarat atas perijinan mereka, dan juga dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh majikan dan para pekerja migran;
- Menempatkan atase-atase tenaga kerja di negara-negara tujuan untuk mencegah perlakuan sewenang-wenang dan eksploitasi, dan, jika eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang atau perdagangan telah terjadi, menjamin repatriasi yang aman bagi para korban yang ingin pulang ke kampung halaman, serta memberikan informasi tentang hak-hak dan prosedur hukum untuk menuntut kompensasi.



Suatu penelitian mendapat keterangan bahwa para pekerja migran perempuan Nigeria sangat prihatin atas ketidak-terlibatan pemerintah mereka dalam merepatriasi korban-korban perlakuan sewenang-wenang dan eksploitasi. Mereka yang telah diperdagangkan melaporkan bahwa mereka merasa diabaikan oleh Pemerintah Nigeria. Meskipun pejabat kedutaan mereka sadar atas keadaan mengenaskan para perempuan ini, mereka tidak menganggap ini sebagai tugas mereka untuk turun tangan tanpa kewenangan langsung dari Ibu kota Nigeria. Para migran menyatakan bahwa kepulangan ke Nigeria dapat dipermudah jika pemerintah mereka memberikan bantuan keuangan kepada kantor-kantor kedutaan Nigeria di seluruh dunia untuk merepatriasi mereka yang berada dalam kesulitan. Mereka juga meminta pemerintah untuk melengkapi kedutaan-kedutaan dan misi-misi negara dengan dana khusus untuk mempermudah campur tangan yang efektif dan logistik yang memadai untuk memantau kegiatan dan keadaan mengenaskan para pekerja Nigeria di negeri asing.¹⁹



Para migran Ethiopia yang kembali mempunyai data terperinci berapa banyak perempuan Ethiopia yang tinggal di Negara-negara Teluk sebagai pelarian setelah mengalami perlakuan sewenang-wenang dari para majikan mereka. Begitu sesudah mereka meninggalkan rumah majikan mereka, mereka digolongkan sebagai pendatang haram dan menghadapi sanksi besar untuk setiap harinya selama mereka digolongkan seperti itu. Keadaan ini membuat mereka tidak memiliki perlindungan, tidak memiliki akses ke perawatan medis dan kemungkinan tipis untuk pulang ke kampung halaman mereka. Banyak migran yang kembali yang berasal dari Ethiopia menyatakan bahwa suatu kebijakan yang lebih bersifat campur tangan dari negara mereka akan membantu mencegah eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang.²⁰

- Memberikan insentif bagi para pekerja migran yang kembali ke kampung halaman setelah kontrak kerja mereka selesai, sehingga mengurangi kemungkinan bagi para pekerja migran tetap tinggal di negara tujuan dalam keadaan tidak beraturan yang membuat mereka terbuka terhadap resiko untuk dieksploitasi dan diperlakukan sewenang-wenang;
- Memberikan bantuan repatriasi dengan sumber daya yang memadai dalam kasus-kasus khusus. Ini termasuk kasus para pekerja miskin yang telah kehilangan pekerjaan mereka atau telah ditelantarkan oleh majikan mereka, para pekerja yang ingin melarikan diri dari pelecehan fisik dan seksual yang dilakukan oleh majikan atau pedagang, dan kasus-kasus medis bagi mereka yang kembali dimana para majikan mereka tidak bersedia mengambil tanggungjawab. Juga ada keadaan-keadaan darurat dari waktu ke waktu, dimana warga negara mungkin perlu untuk dievakuasi karena perang atau keadaan-keadaan gawat lainnya, yang membuat kehidupan mereka berada dalam resiko.²¹
- Mengadakan/membuat pendaftaran dan database dari para migran yang kembali dan menggunakannya untuk memantau masalah dan kemajuan mereka, dan juga untuk mengarahkan bantuan penggabungan kembali;
- Mengembangkan kemitraan dengan Ornop/LSM, organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha, serta organisasi-organisasi akar rumput untuk menilai kebutuhan-kebutuhan dalam penyatuan kembali dan untuk mengarahkan bantuan; menyediakan forum untuk mendiskusikan persoalan-persoalan dan kebutuhan-kebutuhan para migran yang kembali;
- Memberikan bantuan hukum, konseling dan rujukan untuk pelayanan sosial bagi para migran yang kembali yang membutuhkan, khususnya mereka yang pernah diperdagangkan, dieksploitasi dan diperlakukan sewenang-wenang;
- Mengadakan program-program penerimaan untuk membantu mereka yang kembali memanfaatkan seoptimal mungkin ketrampilan baru yang mereka peroleh di luar negeri

atau tabungan yang telah mereka kumpulkan. Ini dapat dilakukan bersama dengan pelayanan-pelayanan yang ada, misalnya, kantor-kantor lapangan kerja;

- Memperluas bantuan dan pelayanan-pelayanan yang disediakan bagi para migran yang kembali untuk para penduduk setempat di daerah asal para migran untuk mencegah penolakan dari masyarakat setempat dan mempermudah penerimaan dan penyatuan kembali mereka;
- Melalui perjanjian bilateral dengan negara-negara tujuan, menyediakan saluran yang dapat dipercaya melalui lembaga-lembaga keuangan bagi pekerja migran untuk mengirimkan uang ke tempat asal mereka untuk menjamin agar mereka tidak ditipu habis uang hasil jerih payah mereka;
- Memberikan nasehat dan kesempatan investasi bagi para migran yang kembali untuk menginvestasikan tabungan mereka;
- Meningkatkan akses ke jaminan sosial bagi para pekerja migran, termasuk memperhitungkan fakta bahwa biasanya para pekerja migran perempuan kurang memiliki akses ke jaminan sosial dibandingkan dengan para mitra kerja laki-laki mereka. Perjanjian bilateral dengan negara-negara tujuan harus meliputi hal-hal mengenai perlindungan sosial. Dalam kaitannya dengan hal ini, beberapa prinsip-prinsip dasar dari Konvensi ILO layak untuk disoroti.²²
- Perlakuan yang sama, yang berarti bahwa seorang pekerja imigran memiliki akan memperoleh, sebanyak mungkin, hak-hak dan kewajiban yang sama sebagaimana dengan penduduk biasa yang berjenis kelamin sama, berumur sama, berstatus sosial sama dan kualifikasi jaminan sosial yang relevan yang sama [*☛Konvensi ILO No. 118 mengenai Perlakuan yang Sama (Jaminan Sosial), 1962*]
- Pemeliharaan dari hak-hak dan pemberian tunjangan-tunjangan yang diperoleh di luar negeri, ini berarti bahwa hak apapun atau hak prospektif yang dibayarkan harus dijamin kepada migran di wilayah manapun, bahkan jika hak-hak tersebut diperoleh di negara lain, dan seharusnya tidak ada pembatasan mengenai pembayaran dari tunjangan yang berhak diperoleh oleh para migran di negara manapun yang berkepentingan, [*Konvensi ILO No. 157 mengenai Pemeliharaan Hak Jaminan Sosial, 1982*]
- Pemeliharaan hak-hak yang sedang dalam proses perolehan, ini berarti dimana suatu hak adalah kondisional pada saat penyelesaian jangka waktu yang sudah ditentukan, perhitungan harus dilakukan atas jangka waktu yang dihabiskan oleh pekerja migran di setiap negara;
- Memusatkan perhatian pada masalah-masalah ekonomi makro dan masalah lapangan kerja yang lebih besar yang menggaris bawahi migrasi dan migrasi-ulang, serta kerentanan khusus dari para pekerja migran perempuan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang [*☛Buku 1, Bagian 1.4.1*];
- Memberikan pelayanan dan dukungan khusus bagi para korban perdagangan, termasuk memberikan mereka dokumen perjalanan dan identitas yang diperlukan serta mengatur dengan negara-negara tujuan untuk kepulangan yang aman dan repatriasi mereka. Jangan memperlakukan mereka sebagai penjahat; mereka telah menjadi korban kejahatan. Para pelaku perdagangan yang perlu dihukum, sedangkan para perempuan dan anak perempuan yang rentan harus dilindungi dari kemungkinan diperdagangkan kembali [*☛Buku 6*];
- Mengembangkan perjanjian bilateral dan multilateral dengan negara-negara penerima yang menguraikan peran dan tanggungjawab semua pihak dalam proses kepulangan.

Kotak 5.9. Program-program Pemerintah untuk pemulangan dan penyatuan kembali para migran

Sri Lanka:

Sri Lankan Bureau of Foreign Employment (SLBFE—Biro Sri Lanka untuk Pekerjaan Orang Asing) mempunyai pendaftaran wajib bagi para migran sebelum mereka berangkat. Pendaftaran termasuk asuransi untuk jiwa, cacat, sakit dan biaya perjalanan. Walaupun ada sedikit keengganan untuk membayar biaya pendaftaran, para migran akhirnya menghargai manfaat dari pendaftaran, khususnya perlindungan asuransi. SLBFE telah merundingkan Nota Kesepakatan (MoU) dengan negara tuan rumah, termasuk Negara-negara Teluk, Singapura dan Hong Kong, yang mengikat para agen untuk memenuhi kewajiban, membayar upah minimum dan mencegah eksploitasi. Melalui model kontrak antara majikan dan pekerja, majikan diharapkan untuk membayar tiket pulang pada saat kontrak selesai. Sri Lanka juga telah membentuk suatu Pusat Bantuan Migran di dekat bandara yang mempunyai mandat untuk membantu mereka yang kembali khususnya mereka yang berada dalam situasi krisis.

Sumber: M. Dias dan R. Jayasundere, *Sri Lanka: Good Practices to Prevent Women Migrant Workers from Going into Exploitative Forms of Labour*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002, hal.14.

Filipina:

Philippines Overseas Employment Administration (POEA—Administrasi Pekerjaan Luar Negeri Filipina) dari Departemen Perburuhandan Pengarahan adalah instansi pemerintah yang bertanggungjawab untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dari industri pekerjaan luar negeri. Operasinya mencakup pelayanan-pelayanan pra-pekerjaan, perijinan dan pengaturan, bertindak selaku hakim dan pelayanan kesejahteraan. Mandatnya juga termasuk “pemantauan yang efektif atas para pekerja kontrak yang kembali, mempromosikan pelatihan ulang dan pengerahan mereka kembali, maupun penyatuan mereka kembali secara mulus ke dalam arus utama ekonomi nasional, dalam koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah lainnya.” Namun demikian, bagian dari mandat ini belum menjadi prioritas dari operasi POEA. Sebaliknya, para migrasi balik diperlakukan lebih dari sebagai “persoalan kesejahteraan”. Adalah *Overseas Workers Welfare Administration* (OWWA — Administrasi Kesejahteraan Pekerja Luar Negeri) yang menangani persoalan paska-migrasi secara lebih ke pokok permasalahannya. OWWA adalah dana kesejahteraan yang bersumber dari sumbangan wajib para pekerja kontrak luar negeri dan para majikan mereka. Dana ini dikelola oleh badan perwalian yang independen tetapi dipekerjakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Pengerahan. OWWA terutama bertanggungjawab atas pemulangan terorganisir dan penyatuan yang produktif atau pengerahan kembali para pekerja migran, menghadapi baik komponen ekonomi maupun sosial. Melalui Dana OWWA, para pekerja migran diberikan bantuan dan tunjangan ekonomi dan sosial pada saat pemulangan mereka. ELP (*Expanded Livelihood Programme*—program mata pencaharian yang diperluas, sebelumnya disebut *Expanded Livelihood Development Programme*, atau Program Perkembangan Mata pencaharian yang Diperluas) menawarkan pelayanan kredit kepada para migran yang kembali dan keluarganya. Antara tahun 1990 – 1996, 3,522 migran yang kembali dan keluarganya mendapatkan pinjaman.

Sekitar 45 persen pemohon pinjaman adalah perempuan dan lebih dari setengahnya adalah warga negara dari wilayah ibukota. Sebagian besar dari proyek-proyek mata pencaharian dimana perempuan terlibat adalah perdagangan. Sekitar separuh menginvestasikannya dalam toko-toko “sari-sari” (toko barang kelontong) dan sekitar sepertiganya terlibat dalam pelayanan-pelayanan. Sejak bulan Juni 2000, jumlah pinjaman maksimum telah meningkat dari 50 ribu Peso sampai ke 100 ribu Peso, dan bunga berkurang dari 15 persen menjadi 9 persen per tahunnya. Jangka waktu pinjaman juga diperpanjang dari tiga ke lima tahun. Bersama dengan perubahan dalam program kredit ini, kursus-kursus pelatihan yang baru serta seminar perencanaan bisnis juga terjadi.

Pusat Penempatan dan Pemantauan (*Replacement and Monitoring Centre*) menyediakan pelatihan dan pelatihan-ulang untuk persiapan pengeralahan kembali atau penyatuan kembali para pekerja migran yang kembali. Pusat ini merujuk mereka yang kembali ke TESDA (*Technical and Skills Development Authority* - Otorita Pengembangan Teknis dan Ketrampilan) dan TLRC (*Technology and Livelihood Resource Centre* - Pusat Data Teknologi dan Mata pencaharian) untuk kursus-kursus khusus dalam ketrampilan kejuruan dan kewirausahaan. Konseling bisnis juga ditawarkan. Paket Tunjangan Sosial adalah satu jenis bantuan dan jaminan sosial yang menyertakan perlindungan asuransi jiwa dan pribadi yang bersifat wajib, fasilitasi untuk persyaratan-persyaratan dokumen bagi para pekerja migran kontrak yang direpatriasi yang berada dalam kesulitan, serta bantuan untuk tunjangan sakit dan cacat. Bantuan senilai 10 ribu Peso diberikan untuk penguburan pekerja migran yang miskin.

Sumber: Villalba, M.A.M.C., Philippines: *Good Practices for the Protection of Filipino Women Migrant Workers in Vulnerable Jobs*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002, hal.37-38; dan ILO, POEA dan the Commission of European Communities, *Entrepreneurship on Migrant Earnings in the Philippines Results and Experiences from an ILO Project*, Geneva, ILO, 1991.

Guatemala:

Suatu program pemulangan dan penyatuan kembali yang dilaksanakan oleh *International Organization for Migration* (IOM) memukimkan kembali sekitar 45 ribu orang-orang Guatemala pada tahun 1998-1999 yang telah lari ke daerah Meksiko selatan di tahun 1980an. Orang-orang Guatemala yang kembali disediakan tanah di dalam kampung asal mereka dan program pemulangan membantu menyelesaikan konflik-konflik tanah yang tak mau selesai. Orang-orang Guatemala terorganisir baik di Meksiko, yang mempermudah kepulangan mereka. Orang-orang Guatemala telah membentuk koperasi-koperasi demi mendapatkan uang dan mereka sanggup melanjutkan kegiatan dan peran non-tradisional mereka setelah kepulangan mereka ke Guatemala. Kunci dari keberhasilan program ini adalah sifat sukarelanya, kehadiran mediator atau penengah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tanah dan kerjasama pemerintah Meksiko dan Guatemala.

Sumber: International Organization for Migration, *Best Practices Concerning Migrant Workers and their Families* Workshop Internasional dengan bantuan dari Pemerintah Amerika Serikat, memenuhi Rencana Kerja dari KTT Amerika, Santiago de Chile, 19 – 20 Juni 2000.

El Salvador:

Program “*Bienvenido a Casa*” (Selamat kembali ke rumah) yang dibiayai oleh Amerika Serikat dan dilaksanakan oleh IOM, memberikan pelayanan penerimaan kepada orang-orang Salvador yang pulang atau keluar dari Amerika Serikat. Dari kantor-kantor di bandara San Salvador, program ini memberikan pelayanan kepada 5.000 migran Salvador yang kembali antara bulan Februari 1998 sampai Mei 2000. Pelayanan yang diberikan termasuk 3 hari penginapan, telpon ke rumah asal mereka, dan tiket ke daerah-daerah di Salvador dimana sanak-saudara mereka tinggal. Sekitar 65 persen dari mereka yang menerima pelayanan selamat datang ini adalah mereka yang tidak sah di Amerika Serikat, 35 persen keluar karena alasan-alasan lain, termasuk 15 persen karena tindak kejahatan di Amerika Serikat. Program percontohan ini telah membantu pemerintah El Salvador untuk mengetahui siapa yang dipulangkan dari Amerika Serikat, dan meningkatkan penerimaan para migran yang kembali ke negara mereka. Program ini juga mencatat bahwa bantuan bagi para migran yang kembali harus diperluas ke para penduduk setempat di daerah asal migran demi mencegah penolakan masyarakat setempat dan mempermudah penerimaan serta penggabungan kembali mereka.

Sumber: International Organization for Migration, *Best Practices Concerning Migrant Workers and their Families* Workshop Internasional dengan bantuan dari Pemerintah Amerika Serikat, memenuhi Rencana Kerja dari KTT Amerika, Santiago de Chile, 19 – 20 Juni 2000

Kotak 5.10. Rencana untuk penyatuan kembali para pekerja migran perempuan yang kembali

Rencana Filipina untuk Pembangunan Tanggap-Jender, *Philippine Plan for Gender-Responsive Development*, 1998-2025, memusatkan perhatian pada strategi-strategi untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan ekonomi para perempuan migran yang kembali. Beberapa dari strategi ini adalah:

- Pengembangan program komprehensif untuk membantu penyatuan kembali para pekerja migran perempuan yang kembali kedalam arus utama sosial;
- Membantu perempuan untuk mengambil proyek-proyek mata pencaharian yang bersifat kewirausahaan di dalam lingkungan masyarakat mereka sendiri;
- Mempromosikan program-program yang akan mendorong para migran perempuan untuk menggunakan ketrampilan yang diperoleh ketika bekerja di luar negeri untuk memulai dan mengelola industri-industri skala kecil yang berbasis masyarakat;
- Mengajukan dan membantu para migran yang kembali agar berkumpul dalam jejaring dan saling tukar secara formal atau informal, dan untuk memberikan bimbingan kepada mereka yang baru kembali mengenai berbagai masalah-masalah penyesuaian.

Walapun Rencana ini memperkenalkan strategi-strategi tersebut di atas, ia tidak dengan tegas menyebutkan bagaimana hal tersebut sesungguhnya dilaksanakan dan dipantau, siapa yang bertanggung jawab atau darimana datangnya sumberdaya untuk pelaksanaan.

Sumber: Villalba, M.A.M.C., *Philippines: Good Practices for the Protection of Filipino Women Migrant Workers in Vulnerable Jobs*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002, hal.19.



Negara-negara tujuan juga berperan penting agar proses pemulangan kembali berhasil. Negara-negara tujuan harus:²³

- Merencanakan sistem penerimaan migrasi tenaga kerja yang penuh pemahaman, transparan, teratur dan terkelola [**Buku 1, Bagian 1.4.1**] yang akan menerima para pekerja migran berdasarkan pada penilaian yang sistematis dan realistis atas situasi lapangan kerja, dan menjamin kontrak kerja yang benar bagi para pekerja migran yang menyebutkan dengan jelas kondisi kerja, lamanya kontrak dan pengurusan untuk pemulangan migran ke negara asal mereka [**Buku 3**];
- Menyediakan struktur-struktur yang mendorong dan memungkinkan para pekerja migran untuk menabung. Pengurusan dan struktur tabungan kelompok mungkin berguna untuk proses pemulangan. Para migran harus mengelola tabungan kelompok mereka sendiri agar mereka belajar bekerja secara berkelompok, mengembangkan jejaring, mengelola keuangan mereka, dan sejenisnya;
- Bekerja sama dengan negara-negara asal melalui perjanjian bilateral untuk menyediakan bagi para pekerja migran saluran-saluran yang benar dan aman untuk pengiriman uang ke kampung halaman;
- Dimana pekerja migran telah menyumbang untuk skema jaminan sosial, menjamin bahwa sumbangan dan tunjangan mereka dapat dipindahkan ke negara asal mereka ketika mereka pulang;
- Membuka akses pekerja migran ke pendidikan dan program pelatihan. Ini akan membangun kemampuan mereka, mempersiapkan mereka secara lebih baik untuk pemulangan, serta mengembangkan kesadaran tentang persoalan-persoalan yang mungkin akan dihadapi para migran pada saat kepulangan mereka;
- Memungkinkan kebebasan berserikat agar para pekerja migran dapat

mengorganisir dan membentuk struktur-struktur kelompok bantuan mereka sendiri. Organisasi-organisasi pemberdayaan-diri semacam ini dapat mewakili bagian penting dari proses kepulangan dan penggabungan kembali;

- Mengembangkan perjanjian-perjanjian bilateral antara negara-negara pengirim dan penerima. Perjanjian-perjanjian ini harus secara khusus membahas proses pemulangan, menjamin bahwa proses ini berjalan sejujurnya dan HAM para migran dihormati sepenuhnya;
- Bertanggungjawab untuk memperlakukan pekerja tidak resmi atau tidak terdaftar semanusiawi mungkin, dengan jaminan repatriasi yang aman;
- Mengajukan dan membantu pemulangan sukarela para pekerja migran [☞ Kotak 5.11];
- Menjamin perlindungan yang memadai bagi orang-orang yang diperdagangkan, termasuk tidak secara segera mengusir mereka karena status tinggal dan/atau pekerjaan mereka yang tidak beraturan, serta menyediakan mereka status tinggal sementara jika mereka memutuskan untuk memberikan kesaksian dalam proses pengadilan pidana terhadap para pedagang [☞ Buku 6];
- Mempromosikan kemitraan dengan Ornop/LSM dan organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha di negara-negara penerima dan pengirim. Membentuk jejaring lintas negara adalah penting untuk membangun proyek-proyek penyatuan kembali yang efektif;
- Mendukung program-program pembangunan di negara-negara asal untuk membantu menjamin keberlanjutan yang lebih besar dari proses pemulangan [☞ Kotak 5.12 dan 5.13].

Kotak 5.11. Program-program pemulangan sukarela yang dibantu (AVR)

Meski sebagian besar orang-orang yang tidak dapat tinggal di negara tuan rumah masih dipulangkan secara paksa oleh pemerintah, pemulangan Sukarela yang Dibantu, atau *Assisted Voluntary Return* (AVR), telah muncul sebagai strategi-kontra yang lebih efektif.

Sebagian besar diuji coba dan dibuktikan di Eropa, program AVR ini menawarkan pemerintah negara tuan rumah suatu alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dari segi biaya dibandingkan dengan tindakan pelaksanaan yang klasik. Migrasi balik akan mungkin menjadi sangat berkelanjutan dan efektif dari segi biaya jika dilakukan secara sukarela, dengan melindungi hak-hak migran dan dikaitkan dengan kesempatan-kesempatan pembangunan di negara asal. AVR telah terjadi, misalnya, dengan kepulangan massal dari 380.000 lebih migran asal Bosnia dan Kosovo dari 40 negara tujuan yang berbeda pada tahun 1996-2002 dibawah program AVR untuk Kosovo dari IOM (*International Organization for Migration* — Organisasi Internasional untuk Migrasi). Program multilateral yang mirip saat ini sedang berjalan di Afghanistan. Bosnia dan Kosovo menawarkan cetakan biru untuk skenario lainnya yang mirip dan dapat dipakai untuk berbagai orang yang ingin atau perlu untuk pulang ke kampung halaman, tetapi tidak mempunyai sarana untuk melakukannya, termasuk mereka para migran yang terdampar dan para mahasiswa, para korban perdagangan dan kelompok-kelompok rentan lainnya (minoritas etnik, anak-anak yang tidak dikawal/ditemani oleh keluarga mereka, orang tua dan orang sakit). Namun demikian, kebijakan-kebijakan di negara-negara tujuan tetap sangat beragam dalam penerapan AVR, khususnya berkenaan dengan sifat memenuhi syarat dari bantuan penempatan kembali atau penyatuan kembali, serta ukuran/sifat dari bantuan tersebut. IOM telah menentukan kepada negara-negara tuan rumah unsur-unsur berikut ini dalam Kebijakan dan Pedoman mengenai AVR:

- Informasi/konseling berdasarkan pada informasi negara asal;
- Pendidikan pra-keberangkatan dan pelatihan kejuruan (juga terbukti sangat efisien biaya dan membantu terhadap penyatuan kembali jika dilakukan di negara asal sesudah kedatangan kembali mereka);

- Kunjungan “sepintas” ke negara asal;
- Dukungan khusus bagi kelompok-kelompok yang rentan (e.g. konseling psiko-sosial/ perhatian medis bagi para korban perdagangan);
- Bantuan perjalanan (dokumen/surat-surat, tiket, bantuan transit, pengawasan jika diperlukan);
- Penerimaan di negara asal;
- Paket bantuan keuangan yang memadai (bantuan tunjangan untuk bagasi, uang saku, bantuan dana untuk penempatan kembali)
- Rujukan paska-kedatangan ke Ornop/LSM, kelompok-kelompok penunjang, bantuan medis;
- Program-program paska-kedatangan untuk menunjang penyatuan kembali (usaha kecil, tunjangan tambahan upah, skema-skema lain untuk penempatan kerja dan pembukaan lapangan kerja)

Sumber: International Organization for Migration, *World Migration 2003 Managing Migration Challenges and Responses for People on the Move*, Geneva, IOM, 2003, hal.278-279.

Kotak 5.12. Mempromosikan pembangunan di negara-negara asal: Perjanjian Cotonou

Ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2000, Perjanjian Cotonou bertujuan untuk membangun kemitraan antara Uni-Eropa dan 77 negara Afrika, Karibia dan Pasifik, atau dikenal sebagai ACP (*Africa, the Caribbean and the Pacific*) untuk menanggulangi dan akhirnya menghapus kemiskinan dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan, pengembangan kapasitas dan pembauran kedalam ekonomi dunia. Migrasi adalah unsur penting dari dialog politik yang ingin menjelajahi dimensi-dimensi berbeda dari kerjasama. Lebih lanjut lagi, pengelolaan migrasi adalah satu prioritas dalam bidang kerjasama teknis, yang membantu negara-negara ACP dalam mengembangkan sumber daya manusia secara nasional dan regional. Mengingat pentingnya skala migrasi demi pekerjaan antara negara-negara ACP dan Uni Eropa, maka pasal 13 dari Perjanjian ini mengajukan suatu kerangka untuk pengelolaan migrasi yang harus meliputi:

- Penghormatan atas hak-hak migran harus dijamin. Berakar pada hukum internasional dan kecondongan-kecondongan HAM, komponen penting dari hal ini adalah komitmen terhadap perlakuan yang sama (tidak adanya praktek-praktek yang bersifat diskriminatif) kepada para migran yang tinggal secara sah di wilayah dari pihak-pihak yang menandatangani perjanjian;
- Strategi-strategi untuk mengatasi akar penyebab arus migrasi besar-besaran — Ini harus ditujukan pada “mendukung pembangunan ekonomi dan sosial dari wilayah dimana para migran berasal.” Pelatihan warga negara ACP dan akses ke pendidikan di Uni Eropa bagi para mahasiswa ACP adalah dua unsur yang secara tegas disebutkan untuk strategi tersebut.
- Peraturan-peraturan untuk memerangi migrasi tidak teratur —Pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk pemulangan dan penerimaan kembali semua warganegaraanya yang berada dalam situasi tidak teratur. Untuk tujuan ini maka perjanjian-perjanjian bilateral mengenai penerimaan dan pemulangan kembali harus dibuat.
- Berasaskan pada prinsip-prinsip efisiensi biaya dan kepemilikan, kerjasama teknis harus memperkuat pengalihan pengetahuan, meningkatkan kapasitas manusia secara nasional dan regional, serta mempromosikan pertukaran antara para profesional dari negara-negara Uni Eropa dan ACP. Sebagai bagian yang termasuk dalam kerjasama teknis, Uni Eropa dengan sepenuh hati mendukung usaha-usaha negara-negara ACP untuk membalikkan *brain drain*, atau hijrahnya para sarjana ke luar negeri.

Sumber: International Organization for Migration, *World Migration 2003 Managing Migration Challenges and Responses for People on the Move*, Geneva, IOM, 2003, hal.260-261.

Kotak 5.13. Mempromosikan pemulangan berkelanjutan melalui promosi pembangunan di negara-negara tujuan

Bahkan pemulangan sukarela ke negara asal sering tidak berhasil karena kondisi-kondisi ekonomi yang pada awalnya mendorong orang-orang untuk bermigrasi masih belum berubah. Oleh karenanya, beberapa negara tujuan mencoba menggantikan keadaan ini dengan cara yang sangat praktis; misalnya dengan menginvestasikan dalam strategi-strategi pemulangan kembali di titik akhir pemulangan untuk menjamin keberhasilan dari proses pemulangan. Inilah yang dilakukan di Finlandia, Jerman, Belanda dan Swiss. Karena kementerian-kementerian pembangunan sebagian besar masih enggan untuk mencampurkan migrasi dan solusi-solusi pembangunan, semakin banyak kementerian imigrasi di negara-negara tujuan mendiversifikasikan anggaran mereka untuk mendanai solusi-solusi ekonomi-mikro yang sedemikian. Di negara-negara berkembang, hal ini dapat membantu menjembatani celah antara dukungan-pemulangan yang bersifat seketika dan pembangunan jangka panjang. Semakin banyak pemerintahan yang membuat kaitan antara migrasi dan pembangunan, dan menantang badan-badan pendanaan internasional yang relevan untuk mendukung solusi-solusi gabungan.

Sumber: International Organization for Migration, *World Migration 2003 Managing Migration Challenges and Responses for People on the Move*, Geneva, IOM, 2003, hal.280.

5.5.2. Peran dari organisasi-organisasi pemberdayaan diri, mitra sosial dan Ornop/LSM



Asosiasi-asosiasi para pekerja migran yang kembali yang berada pada di tingkat masyarakat setempat adalah salah satu cara efektif untuk mengorganisir dukungan bersama di antara sesama mereka yang kembali, untuk melibatkan anggota masyarakat lainnya dan anggota keluarga dalam proses pemulangan dan penyatuan kembali, serta untuk meningkatkan akses ke pelayanan dan prasarana. Organisasi-organisasi sedemikian ini dapat:

- Memberikan kesempatan pada para pekerja migran perempuan yang kembali untuk membuat jejaring dengan yang lainnya yang mengalami pengalaman yang sama, dan membantu satu sama lain dalam proses penyesuaian kembali dan penyatuan kembali;
- Saling memberikan dukungan, khususnya bagi mereka yang telah menderita perlakuan sewenang-wenang atau eksploitasi;
- Mendukung dan membangun rasa percaya diri para migran yang kembali yang mengalami masalah yang bertumpuk;
- Menjalankan skema tabungan dan kredit skala kecil untuk membantu mereka yang kembali dalam berbagai macam kegiatan yang menghasilkan pendapatan;
- Meningkatkan akses ke sumber daya dan dukungan keuangan untuk penyatuan kembali mereka secara ekonomi;
- Memperkuat pembagian informasi tentang jenis-jenis bantuan dan dukungan pemerintah dan non-pemerintah yang tersedia bagi para pekerja migran yang kembali;
- Meningkatkan kesadaran para migran potensial dan para migran masa depan dengan memberikan informasi dari tangan pertama tentang situasi-situasi tempat kerja, manfaat dan penderitaan serta mekanisme penanggulangan. Mereka dapat memperingatkan para migran potensial dan para migran masa depan tentang kemungkinan bahaya dan resiko yang akan mereka hadapi ketika mencari pekerjaan di luar negeri;
- Meningkatkan persiapan dalam hal migrasi selanjutnya. Jika seorang perempuan memutuskan untuk bermigrasi ulang, maka dengan terlibat dalam kelompok pendukung para migran yang kembali akan mampu mempersiapkan diri lebih baik lagi pada pengalaman migrasi yang selanjutnya;
- Melakukan advokasi dan melobi di tingkat masyarakat untuk tindakan pemerintah dalam menangani masalah-masalah migran yang kembali, termasuk langkah-langkah untuk menangani masalah-masalah khusus dari para perempuan yang pernah dieksploitasi atau diperlakukan sewenang-wenang.



Serikat-serikat pekerja, organisasi-organisasi pengusaha, Ornop/LSM, instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan, semuanya dapat berperan dalam membantu para pekerja migran yang kembali untuk membentuk organisasi mereka sendiri. Para pekerja migran yang bergabung dengan asosiasi migran ketika bekerja di luar negeri juga dapat berperan penting.



Organisasi-organisasi berbasis masyarakat seperti itu dapat menyertakan tidak hanya migran yang kembali tetapi juga anggota keluarga serta anggota masyarakat setempat yang memiliki perhatian, agar secara lebih langsung

melibatkan mereka dalam proses penyatuan kembali dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik lagi dari para anggota keluarga dan masyarakat setempat mengenai masalah-masalah yang dihadapi para migran yang kembali ini. Namun dalam situasi dimana para migran perempuan yang kembali, terutama mereka yang pernah menderita eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, tidak merasa nyaman untuk berbagi mengenai masalah mereka dengan orang lain yang tidak pernah mengalami masalah yang sama, atau takut akan stigmatisasi, penolakan atau diskriminasi lebih lanjut, maka adalah lebih baik untuk membatasi keanggotaan organisasi atau kelompok pemberdayaan-diri bersama.



Koperasi-koperasi dapat menjadi bentuk penting dari organisasi kelompok. Para pekerja migran yang kembali dan keluarganya di banyak negara telah berhasil mendirikan koperasi untuk tabungan, mengakses pelayanan keuangan, untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar, serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ekonomi kelompok.



Di Sri Lanka, suatu Ornop, Migrant Service Centre (Pusat Pelayanan Migran), telah membentuk asosiasi pekerja migran di beberapa tempat di dalam negeri untuk mengorganisir para pekerja migran yang kembali. Asosiasi-asosiasi pekerja migran ini adalah jaring pengaman sosial yang memberikan jawaban atas pertanyaan dan persoalan yang menghadang mereka yang kembali. Asosiasi-asosiasi ini adalah badan-badan sukarela dan Migrant Service Centre memperkenalkan hal ini kepada masyarakat hanya jika para migran perempuan, mereka yang kembali dan keluarganya ingin bersama-sama mendirikan asosiasi sedemikian rupa. Asosiasi-asosiasi ini disponsori oleh serikat pekerja, atau organisasi nirlaba, atau Ornop. Saat ini, lima asosiasi telah di bentuk, dua disponsori oleh serikat-serikat pekerja, satu oleh Ornop, satu oleh masyarakat perkebunan dan satu oleh para pekerja Katunayake Export Processing Zone (Zona Pemrosesan untuk Eksport Katunayake).²⁴



Di Filipina, beberapa pekerja migran yang kembali dan keluarganya telah mengorganisir diri mereka terutama untuk mengakses sumber daya dan bantuan keuangan untuk penyatuan mereka kembali. Faktor utama yang memotivasi mereka untuk mengorganisir diri menjadi koperasi adalah kebutuhan untuk mengakses pinjaman yang lebih besar untuk mata pencaharian mereka dari skema rabat-ulang milik Overseas Workers Welfare Administration (OWWA - Administrasi Kesejahteraan Pekerja luar negeri, yang merupakan instansi utama pemerintah yang bertanggungjawab untuk proses pemulangan yang terorganisir dan penyatuan kembali yang produktif dari para pekerja migran Filipina) yang dapat diakses oleh koperasi. Selain itu, koperasi-koperasi yang terdaftar di Cooperatives Development Authority (Otorita Pengembangan Koperasi) juga dapat memanfaatkan pelayanan-pelayanan seperti seminar pra-keanggotaan tentang koperasi dan pengecualian dari pajak-pajak usaha.²³



Di Nigeria, Ornop/LSM sering bekerja dengan para migran yang kembali yang pernah menjadi korban perlakuan sewenang-wenang atau eksploitasi untuk membantu mendidik masyarakat tentang resiko dan bahaya yang dapat menyertai migrasi demi pekerjaan.²⁶



Di Bangladesh, Welfare Association of Repatriated Bangladeshi Employees (WARBE —Asosiasi Kesejahteraan Pekerja Bangladesh yang Direpatriasi) menyelenggarakan berbagai kegiatan termasuk melobi untuk ratifikasi Konvensi Internasional PBB tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga mereka, dan untuk program-program penyatuan kembali yang lebih efektif bagi para migran yang kembali. Pada Hari Migran Internasional, 18 Desember, WARBE menyelenggarakan pawai untuk mendukung para migran yang kembali, termasuk membuat teater jalanan, dan sejenisnya.²⁷



Cara-cara berguna dan inovatif dimana serikat pekerja dapat membantu para pekerja migran yang kembali termasuk [☞ Kotak 5.14]:

- Memanfaatkan keahlian serikat-serikat pekerja dalam berorganisasi untuk membantu para pekerja migran yang kembali untuk mendirikan organisasi mereka sendiri atau bergabung dengan serikat-serikat pekerja yang sudah ada;
- Membantu para pekerja migran yang kembali untuk memiliki “suara” di tingkat lokal dan nasional, misalnya, dengan melakukan advokasi atas nama mereka dan membantu untuk menarik perhatian pemerintah atas masalah-masalah yang dihadapi oleh pekerja migran yang kembali;
- Memanfaatkan hubungan mereka dengan serikat-serikat pekerja di negara-negara tujuan untuk memberikan informasi kepada para migran yang ingin kembali mengenai keadaan-keadaan sosial ekonomi dan lapangan kerja serta kesempatan-kesempatan di negara asal;
- Menyediakan pelayanan-pelayanan dan prasarana-prasarana bagi para pekerja migran yang kembali, misalnya, dalam hal pusat-pusat penempatan kerja atau bantuan lewat telepon untuk membantu para pekerja migran yang kembali dalam pencarian kerja atau masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan; bantuan dalam berurusan dengan birokrasi seperti untuk mendapatkan surat-surat yang diperlukan; akses ke prasarana-prasarana misalnya agar dapat bergabung ke asuransi kesehatan atau dana kesehatan; pelatihan melek-hukum, dan sejenisnya. Migran yang kembali yang dibantu dengan cara yang praktis seperti ini akan sangat lebih mungkin menyadari manfaat-manfaat untuk menjadi anggota serikat pekerja.



Organisasi-organisasi pengusaha di negara-negara asal dapat juga membantu proses pemulangan dan penggabungan kembali melalui:

- Penyebaran informasi tentang kesempatan dan lowongan kerja di perusahaan-perusahaan. Penyebaran informasi seperti ini dapat dilakukan dalam kerjasama erat dengan program-program penerimaan bagi mereka yang kembali dan juga dengan kantor-kantor pelayanan tenaga kerja;
- Memanfaatkan hubungan mereka dengan organisasi-organisasi pengusaha di negara-negara tujuan, untuk memberikan informasi kepada para migran yang ingin kembali tentang kesempatan kerja di negara asal dan jenis kualifikasi serta ketrampilan yang diperlukan;
- Menyediakan pelayanan-pelayanan penasehat, prasarana-prasarana pendukung dan bimbingan para migran yang kembali yang ingin bekerja mandiri atau mendirikan usaha sendiri.

Kotak 5.14. Mengorganisir untuk pemulangan dan penyatuan kembali

Di Hong Kong, *Filipino Migrant Worker's Union* (FMWU—Serikat Pekerja Migran Filipina) didirikan pada tahun 1998, dengan keanggotaan sebagian besar pekerja rumah tangga migran perempuan. Semuanya menjadi anggota sekitar 20 *Reintegration and saving group* (RSG—kelompok penyatuan kembali dan tabungan) yang berada di bawah serikat. FMWU ini unik karena salah satu prinsip utamanya adalah promosi penyatuan kembali migran. Karena ia adalah serikat pekerja yang terdaftar, FMWU juga menjamin promosi hak-hak migran sebagai pekerja dan sebagai perempuan. Serikat hanya menerima anggota perseorangan, tetapi masing-masing disyaratkan untuk menjadi

anggota RSG. RSG ini mengumpulkan, mengelola dan melindungi tabungan dari kelompok. Mereka memutuskan kebijakan tabungan mereka sendiri, termasuk jumlah minimum untuk ditabungkan setiap bulannya. Setiap RSG biasanya terdiri dari anggota yang berasal dari tempat yang sama di Filipina, atau sekedar sekelompok teman-teman. FMWU mendapatkan dukungan dan bantuan pelatihan dari *Asian Migrant Centre* (AMC—Pusat Migran Asia). Serikat berhubungan dengan AMC dalam melakukan Kursus Dasar tentang Penyatuan Kembali, yang disyaratkan bagi semua anggota. Pelatihan lainnya (misalnya, kepemimpinan, *team-building*, teater, komputer, tata-buku) juga diberikan. Beberapa RSG dari FMWU ini telah memulai proyek penyatuan kembali di Filipina melalui *Unlad Kabayan*, Ornop/LSM mitra mereka. Serikat juga telah membantu pengorganisasian serikat-serikat dan organisasi-organisasi untuk migran Indonesia, Thailand dan migran-migran warga negara lainnya di Hong Kong.

Sumber: Molina, B. Jr. dan R. Varona, "*Migrant reintegration: towards a more empowering and liberating strategy*" di *Asian Migrant Centre dan Migrant Forum in Asia, Asian Migrant Yearbook 1999 Migration Facts, Analysis and Issues in 1998*, Hong Kong, AMC, 1999.

Kotak 5.15. Organisasi-organisasi berbasis masyarakat dan pemberdayaan diri-sendiri dari para pekerja migran yang kembali

Di Filipina, Suatu Ornop bernama *Kanlungan Centre Foundation* (KNL) membantu mengorganisir komunitas-komunitas yang memiliki populasi pekerja migran perempuan yang besar dengan apa yang dikenal sebagai "struktur pengasuhan". Struktur pengasuhan ini berfungsi sebagai kelompok dukungan bersama dari para migran perempuan yang selamat dari kekerasan di luar negeri atau dalam komunitas setempat. Pada awalnya KNL mengorganisir kelompok pendukung diantara para klien mereka yang datang, suatu strategi yang sulit karena para klien datang dari daerah yang berbeda dan jumlah staf terbatas. Banyak perempuan yang kembali tidak dapat menghadiri seminar atau kegiatan massal karena mereka mempunyai anak di rumah yang akan tidak terurus. Dengan demikian, KNL memutuskan untuk pindah ke daerah-daerah dimana para perempuan migran adalah mayoritas dalam populasi. Daerah kerja penyuluhan kemasyarakatan yang pertama adalah di Punta, di daerah Sta. Ana, Manila, dimana banyak perempuan migran yang kembali dari Jepang. KNL bekerjasama dengan dewan gereja Katolik yang telah meletakkan satu meja migrasi di dalam pusat tenaga kerja mereka, dalam rangka mengorganisir masyarakat. Semakin masyarakat menjadi terorganisir, masalah-masalah dibahas bersama dan ditanggulangi melalui usaha bersama. Di daerah lain, *Pugo Overseas Workers and Community Association* (POWCA—Asosiasi Pekerja Luar Negeri dan Masyarakat Pugo), yang terdiri dari para migran yang kembali dan masyarakat yang peduli, memberikan pelayanan dan bantuan kesejahteraan bagi para anggotanya, proyek-proyek mata pencaharian dan program-program kesehatan jiwa berbasis masyarakat karena jumlah para migran perempuan yang kembali yang memiliki masalah-masalah psikologis cukup banyak. POWCA juga menyelenggarakan seminar tentang perkembangan pertanian, tabungan dan pengelolaan keuangan. Usaha kecil dalam bidang peternakan babi dan pembuatan sapu, disamping usaha-usaha lainnya, muncul dari seminar-seminar tersebut. Pengorganisasian POWCA telah memungkinkan mereka yang kembali untuk memanfaatkan sumber daya yang ditawarkan oleh *Overseas Workers Welfare Administration* (OWWA—Administrasi Kesejahteraan Pekerja Luar negeri) milik pemerintah.

Sumber: Villalba, M.A.M.C., *Philippines: Good Practices for the Protection of Filipino Women Migrant Workers in Vulnerable Jobs*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002, hal.44

Di Sri Lanka, *Kegalle Migrant Worker Centre* (Pusat Pekerja Migran Kegalle) dibantu oleh *Forum on Development*, suatu Ornop/LSM berbasis di Kegalle yang memfokuskan pada pembangunan masyarakat, tabungan dan kredit skala kecil, dan menyediakan pendidikan pengembangan masyarakat serta ketrampilan kepemimpinan kepada para pemuka masyarakat. Didirikan pada tahun 1998 dan mengoperasikan dua cabang asosiasi pada tingkat desa. Setiap asosiasi desa memiliki keanggotaan 20 perempuan, para pekerja migran yang kembali dan juga para perempuan lainnya dari desa.

Tujuan utama dari asosiasi adalah untuk membantu program-program mata pencaharian alternatif untuk memotivasi para perempuan desa untuk mencari kesempatan mata pencaharian di desa

mereka tanpa harus mengambil jalan untuk bermigrasi. Para migran yang kembali tidak menyarankan migrasi karena kesulitan yang dihadapi di tempat kerja dan di rumah. Mereka yang kembali ini termasuk para perempuan yang telah beruntung secara ekonomi dari migrasi dan juga mereka yang tidak beruntung. Asosiasi melaksanakan skema tabungan dan kredit skala kecil yang memberikan pinjaman untuk berbagai kegiatan yang menghasilkan pendapatan seperti persiapan makanan, pembungkusan bumbu-bumbu, menjahit, salon kecantikan, beternak unggas, dan membuat mebel. Semua prakarsa yang dilakukan telah berhasil. Asosiasi-asosiasi ini telah memotivasi beberapa calon migran untuk mencari alternatif dari meninggalkan keluarga dan rumah untuk mencari penghasilan. Asosiasi juga menggunakan cara populer dari sandiwara jalanan yang menyampaikan pesan ke yang lebih luas. Pentas-pentas jalanan mengenai keuntungan dan kerugian dari migrasi (dengan lebih menitikberatkan pada kerugian-kerugian bermigrasi) ditulis dan diproduksi oleh para perempuan yang memainkan pentas-pentas ini. Salah satu keprihatinan utama dari asosiasi ini yang dipentaskan oleh pasukan teater jalanan adalah citra negatif pada pekerja migran perempuan yang oleh komunitasnya dianggap sebagai perempuan kurang bermoral dan tidak dapat dipercaya.

Sumber: M. Dias dan R. Jayasundere, Sri Lanka: *Good Practices to Prevent Women Migrant Workers from Going into Exploitative Forms of Labour* (Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration 2002), hal. 34.

5.5.3. Bantuan Logistik

Negara-negara asal cenderung kurang menawarkan bantuan kepada warga negara mereka dalam proses pemulangan dibandingkan pada saat keberangkatan awal ke negara tujuan. Banyak migran sementara pulang ke negara asal mereka tanpa diketahui dan tanpa bantuan dari pemerintah atau perusahaan-perusahaan jasa tenaga kerja swasta. Sedikit usaha yang telah dilakukan untuk mendaftar mereka pada saat kedatangan kembali. Bantuan logistik cenderung bersifat *'reaktif'* dibandingkan *'proaktif'*. Ini biasanya hanya reaksi atas krisis dalam skala besar—misalnya, karena perang, bencana alam atau ekonomi—atau krisis pada tingkat migran perseorangan yang telah dibuang oleh majikannya atau agennya, yang melarikan diri dari pelecehan atau ancaman fisik maupun seksual, atau mereka yang berada dalam keadaan darurat medis yang tidak ditanggung oleh majikan. Repatriasi korban perdagangan akan dibahas dalam Buku 6 [👁️ **Buku 6, Bagian 6.8**]



Untuk memberikan bantuan logistik demi mempermudah proses pemulangan dan repatriasi, pemerintah (dapat termasuk negara asal maupun negara tujuan) harus:

- Menjamin bahwa logistik dari kepulangan, termasuk biaya repatriasi, diatur dengan tegas dalam kontrak dengan majikan atau perusahaan jasa perekrutan [👁️ **Kotak 5.16**];
 - Mendaftar para pekerja migran dengan instansi pemerintah sebelum mereka meninggalkan negara asal mereka dan memasukkan kewajiban untuk asuransi kematian, cacat dan biaya transport dalam pendaftaran;
 - Membentuk perjanjian bilateral dan multilateral antara negara-negara pengirim dan penerima untuk menjamin pemulangan yang aman dari migran dan korban perlakuan sewenang-wenang dan eksploitasi. Tidak adanya perwakilan diplomatik negara pengirim di negara penerima, para migran bahkan lebih rentan terhadap perlakuan sewenang-wenang, eksploitasi dan kriminalisasi ketika mereka lari dari majikan atau agen yang kejam dan menjadi “tidak resmi”. Atase Perburuhan di konsulat-konsulat atau kedutaan-kedutaan memerankan peran yang semakin penting dalam merundingkan pembebasan para pekerja tidak tercatat, mereka yang berada di penjara atau tedampar di kedutaan-kedutaan.
- 👉 *Jangan mengkriminalisasikan para pekerja tidak tercatat. Perjanjian bilateral harus membahas perihal para pekerja tidak tercatat dan menyediakan mekanisme untuk menjamin pemulangan mereka secara aman dan menghormati HAM mereka.*
- 👍 *Mempromosikan penghormatan sepenuhnya, dan kepatuhan terhadap **Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler, tahun 1963**, yang mewajibkan Pihak-pihak Negara untuk memberitahukan orang asing yang ditangkap atau ditahan bahwa mereka mempunyai hak untuk memberitahukan perwakilan konsuler mereka; perwakilan-perwakilan ini mungkin dapat memberikan bantuan dalam proses yudisial kepada migran. Hak para pekerja migran untuk diberitahukan tentang haknya atas bantuan konsuler tidak boleh dikaitkan dengan situasi tercatat atau tidak tercatatnya mereka.*
- Sistem pendaftaran harus dibuat antara negara pengirim dan negara penerima untuk memantau migran yang kembali. Ini dapat melibatkan kedutaan, departemen imigrasi, departemen tenaga kerja dan perusahaan jasa perekrutan. Sistem informasi yang terkomputerisasikan dapat diterapkan untuk memantau dan mengidentifikasi mereka yang kembali;

- Membuat tempat penerimaan yang benar di pelabuhan-pelabuhan masuk demi menghindari pelecehan dan membantu para migran yang kembali agar dikirim pulang secepat mungkin ke desa mereka untuk menghindari bahaya tabungan mereka dirampok atau ditipu;
- Menyederhanakan prosedur proses pemulangan di bandara-bandara dan memberikan kepada para migran yang kembali paket informasi tentang sumber daya dan pelayanan yang tersedia bagi mereka, dan mendaftarkan mereka dalam database migran yang kembali;
- Dalam situasi krisis atau darurat, pastikan bahwa suatu rencana darurat tersedia untuk mengatasi repatriasi/deportasi massal mendadak para pekerja migran dari luar negeri. Rencana tersebut harus mengkoordinasikan berbagai usaha dari berbagai instansi pemerintah dan non-pemerintah untuk menjamin agar mereka yang kembali mendapatkan bantuan-bantuan kemanusiaan yang diperlukan, tempat berteduh, pengangkutan, keuangan seperlunya serta bantuan lain yang dibutuhkan [👁 Kotak 5.17].

Kotak 5.16. Repatriasi pekerja migran

Di **Singapura**, majikan bertanggungjawab untuk repatriasi pekerja yang dibawa masuk kedalam negara. Jaminan sekuritas senilai SING\$ 5,000 per pekerja ditempatkan oleh majikan di Departemen Ijin Kerja. Jika para majikan gagal merepatriasi pekerja pada saat pembatalan ijin kerja, maka deposito akan hilang.

Sumber: Ministry of Manpower, Singapore, *A Guide for Employers: Employing Foreign Domestic Workers*, Singapore, Ministry of Manpower, situs web: <http://www.mom.gov.sg>. Hal. 8.

Filipina telah menetapkan peraturan dan ketentuan berikut ini untuk repatriasi pekerja migran Filipina:

Tanggungjawab utama untuk repatriasi:

Repatriasi pekerja, atau jenazah, dan pengiriman barang-barang pribadinya merupakan tanggungjawab utama pimpinan atau perusahaan jasa tenaga kerja yang merekrut atau mengerahkan dia di luar negeri. Semua biaya yang menyertainya harus ditanggung oleh pimpinan atau perusahaan jasa tenaga kerja yang bersangkutan.

Repatriasi pekerja:

Tanggungjawab utama untuk merepatriasi merupakan kewajiban pihak pimpinan atau perusahaan jasa tenaga kerja untuk membayar dimuka ongkos tiket pesawat untuk repatriasi segera si pekerja jika keadaan membutuhkan, tanpa penentuan sebelumnya tentang alasan pengakhiran kontrak si pekerja. Namun demikian, setelah pekerja kembali ke negaranya, pimpinan atau perusahaan jasa tenaga kerja dapat memperoleh ganti biaya repatriasi dari si pekerja jika pengakhiran pekerjaan dikarenakan kesalahan si pekerja. Setiap kontrak untuk pekerjaan luar negeri harus menetapkan tanggung jawab utama untuk membayar dimuka ongkos tiket pesawat kepada perusahaan jasa tenaga kerja, dan kewajiban untuk mengganti rugi biaya kepada pekerja dalam hal kesalahan si pekerja ditentukan oleh Arbitrasi Tenaga kerja.

Prosedur Repatriasi:

Jika kebutuhan untuk repatriasi timbul dan majikan asing gagal menyediakan biayanya, pegawai di lapangan yang bertanggung jawab harus segera memberitahukan kepada OWWA dan *Philippine Overseas Employment Administration* (POEA — Adminstrasi Pekerjaan Luar negeri Filipina) mengenai kebutuhan akan biaya tersebut. POEA akan memberitahukan perusahaan jasa tenaga kerja yang bersangkutan tentang kebutuhan untuk repatriasi. Perusahaan jasa tenaga kerja harus menyediakan tiket pesawat atau *prepaid ticket advice* (PTA — berita tiket pra-bayar) kepada *Filipino Resources Centre* (Pusat Data/Sumberdaya Filipina) atau Kedutaan besar Filipina di negara dimana si pekerja berada, dan memberitahukan kepada POEA tentang permohonan termaksud. POEA harus memberitahukan kepada OWWA tentang tindakan dari perusahaan jasa tenaga kerja tersebut.

Tindakan terhadap ketidak-pemenuhan:

Jika perusahaan jasa tenaga kerja gagal menyediakan tiket atau PTA dalam waktu 48 jam setelah diterimanya pemberitahuan, POEA harus mencabut ijin dari perusahaan tersebut atau menjatuhkan sanksi jika dipandang perlu. Pada saat pemberitahuan dari POEA, OWWA harus membayar dahulu biaya repatriasi untuk membantu perusahaan jasa atau pimpinan. Sanksi administrasi tidak akan dicabut sampai perusahaan jasa tenaga kerja mengganti biaya repatriasi dengan suku bunga yang sah. kepada OWWA.

Repatriasi Darurat:

OWWA, berkoordinasi dengan *Department of Foreign Affairs* (DFA — Departemen Urusan Luar Negeri), dan dalam situasi yang tepat, dengan badan-badan internasional, harus melakukan repatriasi pekerja dalam keadaan peperangan, epidemi, atau bencana — baik alam maupun akibat ulah manusia, dan kejadian-kejadian yang serupa, tanpa prasangka akan penggantian oleh pimpinan atau perusahaan jasa tenaga kerja yang bertanggungjawab dalam kurun waktu selama enam puluh (60) hari sesudah pengumuman. Dalam keadaan demikian, POEA akan secara serempak mengidentifikasi dan memberitahukan kepada perusahaan-perusahaan jasa tenaga kerja yang bersangkutan.

Repatriasi wajib bagi para pekerja migran dibawah umur:

Pejabat yang bertanggungjawab yang berada di pos pelayanan luar negeri harus segera mengatur repatriasi bagi para pekerja migran Filipina dibawah umur. Biaya yang terlibat dalam tindakan ini harus ditanggung oleh perusahaan jasa tenaga kerja dan/atau pimpinan atau OWWA jika keadaan mengharuskan.

Keadaan-keadaan repatriasi lainnya:

Dalam semua kasus dimana pimpinan atau perusahaan jasa tenaga kerja dari si pekerja tidak dapat diidentifikasi, tidak dapat ditemukan atau berhenti beroperasi, dan si pekerja dalam keadaan membutuhkan dan tanpa sarana, maka pegawai OWWA di lokasi, berkoordinasi dengan DFA, harus mengadakan repatriasi. Semua biaya yang menyertai repatriasi yang ditanggung oleh OWWA dapat dibebankan pada *Emergency Repatriation Fund* (Dana Repatriasi Darurat) yang diatur dalam Undang-undang ini, tanpa merugikan OWWA —dalam kasus-kasus yang tepat — mengharuskan pada perusahaan/majikan atau pekerja agar mengganti biaya repatriasi

Sumber: Situs web: <http://babalikkarin.com/repatriation.htm>

Kotak 5.17. Progam-program repatriasi

Pada tahun 1998, setelah bencana badai topan *Mitch*, pemerintah Costa Rica memerintahkan deportasi massal orang-orang Nikaragua, yang membuat Kementrian Kesehatan dan Keluarga yang dikoordinasi oleh Sekretaris Aksi Sosial di Nikaragua memberikan tanggapan yang sangat dibutuhkan dalam menjamin populasi yang dideportasi mendapatkan kondisi-kondisi minimum sementara, misalnya tempat tinggal sementara dan dukungan keuangan, yang memungkinkan mereka untuk kembali ke desa-desa asal mereka. Pada tahun 1999, suatu rencana untuk keadaan darurat dibuat untuk membantu migrasi darurat terakhir, yang diperkirakan mungkin dilakukan setelah 1 Agustus dengan penutupan periode amnesti yang diperbolehkan oleh pemerintah Costa Rica. Rencana antar-kementrian ini, dikoordinasikan dengan bantuan dari pemerintahan setempat, memintakan penunjukkan tempat-tempat tinggal sementara di dekat perbatasan, bantuan kendaraan bagi mereka yang kembali untuk dapat pulang ke komunitas asal mereka, dan juga pasokan makanan selama satu bulan. Rencana ini juga memperkirakan bahwa bantuan kemanusiaan akan diberikan oleh CARITAS, suatu LSM penting di wilayah ini yang bekerja dalam masalah-masalah migran. Untungnya, deportasi massal dari Costa Rica tidak terjadi dan rencana ini tidak diberlakukan.

Sumber: A. D'Angelo dan M.P. Marciacq, *Nicaragua: Protecting Female Labour Migrants from Exploitative Working Conditions and Trafficking*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002, hal.33.

Sekitar 156 penduduk asing yang tinggal di Irak dan Kuwait diungsikan melalui pengangkutan udara yang diawasi oleh *International Organization for Migration* (IOM—Organisasi Internasional untuk Migrasi) sebagai konsekuensi dari Perang Teluk 1991. Para migran perseorangan dan keluarga mereka menderita kehilangan besar sebagai akibat dari keberangkatan massal yang dipaksakan. Perkiraan beragam tetapi berkisar sekitar ratusan juta dollar Amerika. Dari banyak negara pengirim yang terkena dampak dari hal ini, pemerintah Bangladesh muncul sebagai yang paling turut campur tangan; ia mendirikan komite pengelolaan krisis untuk mengawasi kesejahteraan para migran yang kembali. Pada saat kedatangan mereka didaftar dan diberikan perhatian medis serta kendaraan. Satuan tugas yang terdiri dari beberapa menteri pemerintah dibentuk untuk mengawasi proyek pekerjaan bagi para migran yang kembali. Suatu skema telah dimulai untuk mempromosikan pekerjaan-mandiri diantara 8.000 migran yang kembali, sebagian dibiayai oleh tabungan mereka sendiri, sebagian oleh sumbangan internasional. Dengan pemulihan pemerintah Kuwait, pemerintah Bangladesh memusatkan kembali upaya-upaya mereka pada migran yang kembali ke Teluk untuk mengambil kembali kekayaan dan pekerjaan mereka, atau untuk migrasi-ulang ke tujuan-tujuan lain. Sejumlah 90 persen migran yang disurvei menunjukkan keinginan untuk kembali bekerja di luar negeri.

Sumber: United Nations Research Institute for Social Development, 'Consequences of the Forced Mass Repatriation of Migrant Communities from West Africa and the Middle East'. www.unrisd.org/engindex/publ/list/dp/dp38/dp-38-07.htm

5.5.4. Bantuan hukum



Para migran yang kembali sering membutuhkan bantuan hukum untuk berbagai macam alasan yang berkaitan dengan, misalnya, proses perekrutan yang semula, pelanggaran yang dilakukan oleh para majikan, gaji yang tidak dibayar, pengakhiran kontrak secara tidak resmi, masalah-masalah yang berkenaan dengan kontrak, pelanggaran yang dilakukan oleh si migran itu sendiri, dan masalah-masalah hukum lainnya. Pemerintah dan organisasi-organisasi non-pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan nasehat hukum semacam ini dan akses ke bantuan hukum, serta melakukan pelatihan melek hukum, agar para migran yang kembali dapat menuntut restitusi atas setiap perlakuan sewenang-wenang atau eksploitasi yang terjadi selama proses migrasi:

- Program-program pemerintah dan non-pemerintah — baik program-program orientasi sebelum keberangkatan dan program penyatuan kembali pada saat kepulangan - harus menjamin agar para migran yang kembali mengetahui hak-hak mereka berdasarkan hukum melalui pelatihan melek hukum;
- Pemerintah harus menjamin agar bantuan hukum tersedia bagi para migran yang kembali yang ingin mengambil tindakan terhadap para majikan atau perusahaan-perusahaan jasa perekrutan yang eksploitatif. Bantuan hukum sedapat mungkin harus cuma-cuma - karena mereka yang sangat membutuhkannya mungkin tidak mampu membayar;
- Bantuan hukum harus peka gender. Harus tidak ada perlakuan yang merugikan terhadap para perempuan yang diperdagangkan ke dalam pelacuran. Kepekaan juga diperlukan karena banyak perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan mungkin yang mengalami trauma yang sangat berat, sehingga mereka mungkin akan lebih mudah berbicara dengan petugas bantuan hukum yang perempuan [👁 Buku 6];
- Serikat pekerja, Ornop/LSM, advokat, media, akademisi, dan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya dapat berkampanye untuk hak-hak pekerja migran dalam keadaan dimana pelanggaran besar-besaran telah terjadi;



Di beberapa negara konseling para-legal disediakan oleh Ornop/LSM untuk membantu para migran perempuan dan keluarganya. Salah satu organisasi semacam itu adalah *Kanlungan Centre Foundation* di Filipina yang menyediakan informasi kepada para pekerja yang dirugikan tentang bagaimana mereka dapat mengajukan tuntutan pada saat kepulangan mereka ke Filipina. Melek hukum adalah aspek penting dari pekerjaan yang dilakukan oleh LSM ini, menjamin bahwa para migran yang kembali sadar akan hak-hak mereka berdasarkan hukum. Banyak migran mungkin tidak mengetahui, misalnya, bahwa perusahaan jasa perekrutan di Filipina juga harus bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh majikan. Para pekerja dapat mengajukan tuntutan mengenai pelanggaran kontrak, pengakhiran kerja secara tidak resmi, pemberhentian tidak adil, tuntutan keuangan, kerusakan moral dan kerusakan yang sesungguhnya (seperti hilangnya gaji).²⁸



Di Sri Lanka, *Migrant Service Centre* (Pusat Pelayanan Migran) adalah Ornop/LSM utama yang terlibat dalam pemberian bantuan dan pelayanan kepada para pekerja migran, calon migran dan migran yang kembali. MSC mengelola pelayanan telepon *hotline* untuk menerima keluhan-keluhan mereka yang kembali, dan menyediakan berbagai pelayanan dan nasehat hukum.²⁹

5.5.5. Konseling sosio-psikologis dan pelayanan medis



Para pekerja migran perempuan yang kembali menghadapi berbagai penyesuaian psikologis dan trauma. Bahkan walaupun mereka tidak terlibat dalam situasi yang sewenang-wenang dan eksploitatif, atau menjadi korban perdagangan, setidaknya mereka mungkin membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan hubungan keluarga dan dengan pasangan, perubahan dalam hal identitas diri mereka, dan dalam banyak hal kejutan budaya dan keterasingan dari komunitas mereka:

- Para migran yang kembali harus mendapatkan penerangan mengenai pelayanan konseling apapun yang tersedia, baik di negara penerima dan pada saat kepulangan mereka. Mereka harus diberikan informasi dan nama kontak dan alamat yang dapat dihubungi untuk jenis dukungan dan bantuan yang tersedia melalui perusahaan jasa tenaga kerja milik pemerintah ataupun organisasi swasta lainnya;
- Kesehatan jiwa para migran yang kembali harus menjadi perhatian utama. Menjaga kesehatan mental mereka akan membantu dalam mengidentifikasi solusi-solusi yang positif dan berkelanjutan untuk penyatuan kembali mereka yang utuh. Pendekatan “psiko-sosial” dapat menjadi cara yang berguna dalam memahami dan berurusan dengan kesehatan jiwa. Pendekatan semacam itu mempengaruhi keadaan kesehatan jiwa seseorang dengan menghadapi faktor-faktor sosial yang menjadi penyebab. Selain kebutuhan psikologis, psikiatri atau campur-tangan medis langsung ataupun non-medis bagi para migran perseorangan, pelayanan berbasis masyarakat juga dibutuhkan untuk menghadapi faktor-faktor sosial. Contohnya, mungkin ada kebutuhan untuk berurusan dengan situasi keluarga si migran yang kembali dan membantunya untuk mendapatkan rumah atau pekerjaan;
- Konseling harus ditangani secara sangat peka, dan kerahasiaan dalam proses konseling harus dihargai. Persoalan jender dan praktek-praktek budaya serta sosial harus benar-benar dipertimbangkan. Khususnya bagi para korban perdagangan dan perlakuan sewenang-wenang, mereka mungkin tidak hanya sangat tertraumatisasi tetapi juga takut akan rasa malu dan stigma karena dicap sebagai pelacur oleh komunitas asal mereka;
- Jika dipandang tepat, pelayanan konseling harus melibatkan keluarga para migran yang kembali. Namun perlu dicatat bahwa hal ini tidak disarankan jika migran yang kembali pernah diperlakukan sewenang-wenang atau terlibat dalam pelacuran atau perdagangan, karena dia mungkin tidak memberitahukan pada keluarganya apa yang terjadi terhadap dirinya, karena takut akan stigmatisasi atau bahkan penolakan;
- Organisasi akar rumput atau organisasi berbasis masyarakat harus mempermudah pengembangan dari kelompok-kelompok gotong royong bagi para korban kekerasan dan perlakuan sewenang-wenang;
- Baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah harus melakukan kampanye penyadaran nasional tentang kesulitan-kesulitan dalam proses migrasi dan pemulangan, untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik terhadap pengalaman-pengalaman dari para migran yang kembali.

Para korban perlakuan sewenang-wenang atau perdagangan menghadapi trauma lebih besar lagi, khususnya jika mereka pernah mengalami kekerasan seksual dan fisik. Tetapi

konseling tidak tersedia-secara cuma-cuma di banyak negara, atau berdasarkan pada siapa yang sanggup membayarnya secara pribadi. Sering lembaga-lembaga keagamaan masuk untuk memberikan konseling dan perawatan bagi mereka yang kembali yang mengalami perlakuan sewenang-wenang dan mengupayakan rehabilitasi mereka. Organisasi seperti CARITA³⁰ menyediakan pelayanan konseling yang mirip di sejumlah negara, tetapi langkah-langkah ini bersifat *ad-hoc* daripada sistematis.



Di Filipina, prakarsa-prakarsa swasta maupun Pemerintah tersedia bagi mereka yang kembali untuk membantu mengatasi pengalaman-pengalaman dalam proses migrasi dan menerima kenyataan mengenai perubahan dalam kehidupan mereka pada saat kepulangan mereka. Contohnya, Kanlungan Centre Foundation (KNL) melakukan intervensi krisis dan pengelolaan kasus feminis. “Pengelola kasus KNL melakukan pendekatan feminis dan holistik, melihat korban perempuan migran sebagai seorang yang utuh— sebagai perempuan, ibu, anak perempuan, pekerja, istri atau penduduk... Analisa kasus melihat secara teliti terhadap masalah yang berlapis-lapis yang dihadapi oleh korban perempuan. Analisa ini memungkinkan perasaan-perasaan yang lama ditahan dari seorang perempuan yang menjadi korban - rasa malu, marah, tidak berdaya, dan niat untuk balas dendam - untuk terangkat ke permukaan dan dikeluarkan. Korban mengekspresikan dirinya dengan emosi, mengartikulasikan aspirasinya, mencurahkan beban-bebannya dan mencapai kebebasannya dengan mengambil keputusan”. KNL menangani keseluruhan masalah-masalah psikologis yang dihadapi oleh para perempuan yang kembali, dari soal penyesuaian sampai kehidupan keluarga, masalah perkawinan dan anak-anak, pemukulan istri, kenakalan remaja dan penyalah-gunaan obat bius oleh anak-anak, dan sejenisnya. KNL menyediakan pelayanan konseling untuk satu atau beberapa anggota keluarga pekerja migran. KNL membuat rujukan bagi masalah-masalah yang memerlukan perhatian profesional khusus. KNL juga mengembangkan apa yang disebutu “struktur pengasuhan.” Karena banyak perempuan yang kembali tidak dapat menghadiri seminar disebabkan oleh tanggungjawab keluarga, maka KNL membawa tugasnya ke dalam komunitas itu sendiri, membentuk kelompok-kelompok gotong royong bagi mereka yang selamat dari kekerasan di luar negeri.³¹



Pendekatan pemberdayaan-diri yang berbasis masyarakat [☞ Kotak 5.15 diatas] adalah salah satu cara yang paling berhasil dalam memberikan konseling dan perawatan kepada mereka yang kembali yang pernah mengalami perlakuan sewenang-wenang, dan mereka yang mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kehidupan mereka. Jika memungkinkan, penting untuk konseling jenis ini untuk melibatkan keluarga mereka. Keterlibatan keluarga membuka keterkucilan yang dialami oleh banyak migran yang kembali, dan bagi keluarga untuk lebih memahami kesulitan-kesulitan yang dialami para perempuan migran.



Di La Union, suatu wilayah di Filipina yang menyumbangkan jumlah ketiga terbesar dari migran luar negeri yang kebanyakana adalah perempuan, sejumlah “struktur pengasuhan” telah diorganisir. Salah satunya adalah Pugo Overseas Workers and Community Association (POWCA), yang terdiri dari para migran yang kembali dan warga negara yang peduli. Tujuan utama dari POWCA adalah untuk memberikan pelayanan kesejahteraan dan bantuan bagi para anggotanya, proyek-proyek mata pencaharian dan program kesehatan masyarakat berbasis masyarakat, karena jumlah migran perempuan yang kembali dengan masalah psikologis sangat tinggi.³²



Terdapat berbagai masalah yang terkait dengan medis yang dihadapi oleh para migran yang kembali, akan tetapi bantuan medis jarang diberikan dengan basis yang sistematis. Para korban perdagangan dan kekejaman seksual mungkin ditawarkan tes HIV/AIDS dan kehamilan, penting untuk menjamin bahwa pelayanan-pelayanan ini bersifat anonim dan sukarela daripada bersifat wajib:

- Pemerintah harus membuat struktur untuk menjamin agar migran yang kembali ditanggung oleh asuransi kesehatan;
- Pemerintah tidak boleh mendiskriminasi para pekerja migran dalam hal akses ke jaminan sosial karena alasan ketidakhadiran dalam waktu yang lama. Ini sangatlah penting karena biasanya para pekerja perempuan tidak menikmati akses yang sama ke jaminan sosial sebagaimana pekerja laki-laki;
- Pemeriksaan HIV/AIDS bagi para korban perlakuan sewenang-wenang harus bersifat sukarela dan sepenuhnya rahasia;
- Memberikan konseling dan perawatan medis bagi para migran yang kembali yang hamil.



Di Sri Lanka, pendaftaran wajib para pekerja migran berarti bahwa mereka dilindungi oleh asuransi kematian dan cacat, dan dana kesejahteraan yang disediakan melalui iuran pendaftaran sering digunakan untuk membantu dalam keadaan darurat medis.



Pemerintah Filipina telah mengadakan suatu paket Tunjangan Sosial yang memberikan bantuan jaminan sosial termasuk perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan pribadi yang sifatnya wajib, tunjangan kesejahteraan untuk sakit dan kesusahan, tunjangan cacat dan bantuan untuk penguburan.

5.5.6. Bantuan yang terkait dengan pekerjaan dan ketrampilan

Satu aspek yang menonjol dari kepulangan kembali adalah kemungkinan para migran yang kembali memilih usaha bisnis atau pekerjaan-mandiri dibandingkan masuk ke pekerjaan bergaji.

Memulai suatu usaha sering dipandang sebagai salah satu hasil yang diharapkan dari pekerjaan di luar negeri. Namun demikian, sering terjadi masalah yang serius berkenaan dengan kelangsungan dan keberlanjutan dari usaha-usaha bisnis ini.

Tergantung pada konteks, hal ini mungkin atau mungkin bukan akibat dari kurangnya pekerjaan resmi yang tersedia di negara asal. Memulai suatu usaha sering dipandang sebagai salah satu hasil yang diharapkan dari pekerjaan di luar negeri. Namun demikian, sering terjadi masalah yang serius berkenaan dengan kelangsungan dan keberlanjutan dari usaha-usaha bisnis ini³³ [Kotak 5.18]. Ketiadaan modal adalah salah satu masalah, terkait dengan kesulitan dalam mengakses kredit maupun kurangnya tabungan dari si calon pengusaha. Lebih lanjut lagi, banyak migran yang kembali kurang ketrampilan atau pengalaman, tetapi tidak mencari bantuan dari siapapun di luar lingkaran keluarga mereka untuk mendirikan usaha. Tidak sadar akan kemungkinan kesempatan untuk usaha yang dapat dimanfaatkan, para migran yang kembali sering memilih jenis usaha yang sudah dilakukan oleh orang lain, tidak peduli apakah usaha semacam ini mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka, dan tidak peduli terhadap potensi pasar.

Penyatuan kembali yang berhasil kedalam lapangan kerja domestik adalah mungkin aspek terpenting dari pemulangan. Di pihak perseorangan pekerja migran perempuan yang kembali, ini akan menentukan apakah dia sebagai perseorangan dapat tinggal di kampung atau harus bermigrasi-ulang, apakah pengorbanan yang dia lakukan dengan bekerja di luar negeri pada akhirnya berhasil, dan apakah dia mampu memanfaatkan secara produktif pengalaman migrasi dan sumber daya yang dia miliki. Di pihak pemerintah, penyatuan kembali yang berhasil kedalam lapangan kerja domestik akan berarti pemanfaatan yang lebih produktif dan penuh dari sumber daya manusia dan sumber daya keuangan negara - termasuk, yang sangat penting, ketrampilan dan tabungan yang diperoleh di luar negeri. Namun demikian, masuk kembali kedalam lapangan kerja tidak berarti hanya pekerjaan mandiri dan membuka usaha baru. Upaya yang lebih besar harus dilakukan dalam membantu para migran yang kembali, terutama mereka yang memiliki ketrampilan yang baru diperoleh, untuk mendapatkan pekerjaan berpenghasilan yang layak. Dengan demikian, Pemerintah harus:

Penyatuan kembali yang berhasil kedalam lapangan kerja domestik akan berarti pemanfaatan yang lebih produktif dan penuh dari sumber daya manusia dan keuangan negara, termasuk yang sangat penting, ketrampilan dan tabungan yang diperoleh di luar negeri

- Meningkatkan pelayanan lapangan kerja, agar dapat memberikan nasihat yang lebih baik kepada para pekerja migran yang kembali, dan membantu mereka untuk lebih realistis menilai kesempatan dalam pekerjaan berupah maupun pekerjaan mandiri;
- Melakukan pengujian ketrampilan dan pengetahuan yang lebih sistematis - termasuk ketrampilan teknis, teknologi baru, penanganan peralatan baru, organisasi, strategi pengelolaan atau bisnis, menyediakan pelayanan baru - yang telah didapat oleh mereka yang kembali pada saat mereka bekerja di luar negeri. Memberikan perhatian khusus pada program-program inovatif bagi mereka yang kembali agar dapat secara produktif memanfaatkan ketrampilan dan pengetahuan baru tersebut;
- Bagi mereka yang mengalami penghilangan-ketrampilan, atau *deskilling* ketika bekerja di luar negeri, memberikan pelatihan untuk mendapatkan kembali ketrampilan dan pengetahuan yang hilang, terutama jika mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dalam keahlian mereka;

- Memberikan pelatihan mata pencaharian sebagai bagian tak terpisahkan dari program penyatuan kembali - tidak hanya ketrampilan teknis yang baru untuk pekerjaan alternatif, tetapi juga dalam kewirausahaan, pengelolaan bisnis dan akunting keuangan;
- Membantu para migran yang kembali dalam mengidentifikasi kesempatan bisnis yang berkesinambungan. Banyak orang yang kembali mulai membuka toko-toko kecil yang pada akhirnya gagal karena kurangnya pasar yang berkesinambungan;
- Memberikan pelatihan bagi mereka yang kembali yang ingin memulai suatu usaha dan menjamin bahwa ini ditindak-lanjuti dengan dukungan dan konseling bisnis yang memadai;
- Menjamin agar para perempuan yang kembali memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan-serta dalam pelatihan semacam itu - ini mungkin termasuk mengatur sesi pelatihan pada saat yang cocok bagi para perempuan yang memiliki tanggungjawab keluarga;
- Menjamin skema keuangan sosial tersedia secara setara bagi para perempuan yang memerlukan modal tambahan untuk memulai atau memperluas usaha mereka;
- Mendorong pengusaha yang berhasil untuk mengembangkan jejaring bimbingan bagi para perempuan yang kembali yang telah memulai usaha;
- Menyediakan lingkungan untuk pengembangan usaha kecil, misalnya dengan menyederhanakan prosedur, memberikan akses ke keuangan mikro dan insentif pajak;
- Melakukan pemantauan dan penelitian terus menerus untuk mengevaluasi perkembangan dari permulaan-permulaan usaha dan mengidentifikasi intervensi untuk menanganni masalah.

Kotak 5.18. Program penyatuan kembali ekonomi yang gagal

Di Sri Lanka, *Peoples Bank* (Bank Rakyat), bekerja sama dengan UNICEF pada tahun 1992, meluncurkan Proyek Rehabilitasi Migran Teluk yang kembali ke dalam suatu usaha untuk mendorong penanaman modal di antara para migran yang kembali. Berkaitan dengan perjanjiannya dengan UNICEF, Bank Rakyat memberikan pinjaman untuk pekerjaan mandiri dan proyek usaha kecil kepada para migran yang kembali dari Kuwait, yang sebagian besar dari mereka adalah PRT. Skema ini juga tersedia bagi keluarga dari para migran yang kembali, dan pinjaman diberikan dengan bunga rendah sebesar 11% per tahun.

Skema ini gagal total karena beberapa alasan. Satu alasan adalah karena program ini bukan strategi untuk penyatuan kembali berkesinambungan yang disponsori oleh negara, dan dengan demikian menerima sambutan dan dukungan yang rendah. Tetapi alasan utamanya adalah para migran yang kembali tidak ada motivasi dan ketrampilan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan wirausaha jangka panjang, yang bagaimanapun juga tidak akan memberikan pendapatan yang sama dengan gaji dari menjadi PRT tidak trampil di luar negeri. Baik bank dan para migran yang kembali gagal dalam memperhitungkan faktor-faktor dasar yang penting untuk keberhasilan dalam usaha komersial, seperti kenyataan pasar, daya saing dan pengelolaan. Bank juga tidak memantau kegiatan dengan efektif. Banyak migran mendapatkan pinjaman dan menggunakannya untuk membayar biaya perusahaan jasa untuk tugas kembali di luar negeri atau menggunakan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang habis dipakai dan kebutuhan darurat.

Sumber: M. Dias dan R. Jayasundere, *Sri Lanka: Good Practices to Prevent Women Migrant Workers from Going into Exploitative Forms of Labour*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002, hal. 29

Kotak 5.19. Kewirausahaan dengan Pendapatan Migran di Filipina Hikmah dari proyek ILO

Pada awal tahun 1990an suatu proyek telah dilaksanakan oleh ILO, *Philippines Overseas Employment Administration* (POEA—Administrasi Pekerjaan Luar negeri Filipina) dan Komisi Masyarakat Eropa untuk memampukan sekitar 300 pekerja migran dan keluarganya untuk membangun kewirausahaan dan pekerjaan mandiri yang berkelanjutan sebagai sumber tetap untuk pekerjaan dan pendapatan di luar migrasi. Suatu penilaian dilakukan terhadap sumber daya, kebutuhan dan motivasi dari kelompok terpilih migran yang kembali. Kemudian berdasarkan hal ini, dikembangkanlah Kursus Kesadaran Bisnis, Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan, Seminar Peningkatan Ketrampilan Teknis, Pelayanan Nasehat Bisnis dan Akses ke Pembiayaan. Proyek ini juga membantu untuk mengembangkan suatu jejaring. Ornop/LSM—termasuk *Employers Confederation of the Philippines* (Konfederasi Pengusaha Filipina), *Cebu Chamber of Commerce* (Kamar Dagang Cebu) dan *Leyte-Samar Rural Development Workers Association* (Asosiasi Pekerja Pembangunan Pedesaan Leyte-Samar) — untuk memberikan pelayanan penunjang kewirausahaan dan pekerjaan mandiri kepada para pekerja migran dan keluarga mereka secara berkelanjutan. Sejumlah pelajaran yang berharga dikumpulkan dari hasil proyek ini:

-  Mungkin hikmah yang terpenting adalah bahwa meskipun pendekatan proyek ini dapat berjalan, keberlanjutan hanya akan terwujud dengan peningkatan kemampuan kelembagaan pada tingkat nasional untuk mempromosikan pengembangan usaha kecil berbasis pendapatan migran;
-  Para migran yang kembali tidak selalu lebih memiliki bakat wirausaha dibandingkan dengan yang lain. Tantangan dari memulai suatu usaha adalah berbeda dengan pengambilan risiko yang ada dalam migrasi ke luar negeri untuk pekerjaan;
-  Kira-kira separuh dari klien proyek ini merupakan tanggungan keluarga dari para pekerja migran yang masih di luar negeri. Kaum isteri terbukti sebagai pengusaha yang sesungguhnya, menyiapkan kepulauan pasangan mereka. Dengan demikian, peran yang dapat dilakukan oleh keluarga berkenaan dengan pilihan pekerjaan mandiri perlu mendapatkan perhatian khusus;
-  Keputusan untuk melakukan pekerjaan mandiri dibuat pada tahap dini, biasanya selama bermigrasi, atau bahkan dalam beberapa kasus dibuat jauh hari sebelumnya. Maka para migran dan keluarganya perlu diberitahu sedini mungkin mengenai pilihan dan kesempatan di luar migrasi;
-  Pekerjaan mandiri melibatkan investasi sumber daya hasil jerih payah; kebijaksanaan harus diterapkan sebelum memilih pilihan ini. Kursus Kesadaran Bisnis telah terbukti sebagai cara yang bagus untuk membantu mereka yang kembali dalam pembuatan keputusan;
-  Kursus pelatihan harus pendek - waktu adalah komoditi berharga, terutama bagi para perempuan yang juga harus berurusan dengan tanggungjawab rumah tangga;
-  Dalam merancang kursus pelatihan, gunakanlah pelatih yang memiliki pengalaman-pengalaman bisnis praktis, jangan membuat kursus yang terlalu bersifat “akademis”
-  Pelayanan penasehat dinilai sangat berguna bagi para klien, dalam beberapa kasus bahkan lebih berguna dibandingkan pelatihan kelompok. Klien terutama menghargai petunjuk-petunjuk berharga ke pasar potensial atau sumber-sumber peralatan dan masukan, juga nasehat tentang bagaimana berurusan dengan peraturan pemerintah;
-  Akses ke pembiayaan adalah penting. Para klien juga menghargai karena diberitahu mengenai syarat dan kondisi untuk fasilitas kredit dan penerimaan bantuan dalam permohonan paket pinjaman yang benar;
-  Dukungan untuk kewirausahaan adalah bidang yang membutuhkan ketrampilan, pengalaman dan kontak profesional. Dukungan dapat disediakan dengan sangat baik oleh perusahaan-perusahaan jasa yang mengkhususkan diri dalam bidang ini, organisasi-organisasi pengusaha dan Ornop/LSM khusus, dengan hubungan erat dengan komunitas bisnis;
-  Keberhasilan atau kegagalan dalam bisnis banyak tergantung pada iklim ekonomi, politik dan sosial yang menunjang. Pemerintah perlu menciptakan suasana ini melalui perangkat-perangkat kebijakan tingkat makro, ketentuan dan peraturan yang tepat, serta persediaan infrastruktur sosial yang pokok;
-  Organisasi-organisasi pemerintah yang terlibat dalam pengawasan pekerjaan luar negeri harus memantau arus migrasi balik untuk mempermudah penyatuan kembali. Untuk tujuan ini Organisasi pemerintah tsb. mungkin dapat membuka jendela kesempatan dimana para migran dan keluarganya dapat dirujuk ke organisasi profesional yang tepat dan sesuai dengan berbagai tahap pengalaman migrasi mereka.

Sumber: *Entrepreneurship on Migrant Earnings in the Philippines: Results and Experiences from an ILO Project*, brosur yang dibuat oleh International Labour Office, Philippine Overseas Employment Administration, Commission of the European Communities, 1991.

5.5.7. Pelayanan keuangan: pengelolaan pengiriman uang, tabungan dan investasi

*“Kenyataan bahwa baik pemerintah maupun lembaga keuangan tidak menganggap para pekerja migran yang kembali, khususnya PRT, sebagai investor potensial karena dia mereka tidak memiliki sumber daya keuangan untuk terlibat dalam skema investasi yang dianggap menguntungkan bagi lembaga keuangan manapun. Saat ini, tidak ada pinjaman bebas bunga atau pinjaman berbunga rendah yang tersedia melalui sumber-sumber pemerintah bagi kelompok yang kurang beruntung, dan Pemerintah masih belum membuat skema untuk menghapuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan hutang diantara mayoritas para pekerja migran. Untuk alasan inilah maka kebanyakan migran merasa perlunya untuk bermigrasi ulang”.*³⁴

Pengiriman uang para migran mewakili suatu sumber devisa yang penting bagi negara-negara yang warga negara banyak bekerja di luar negeri.

Perbedaan antara para migran yang kembali yang berhasil dan mereka yang terpaksa meneruskan lingkaran migrasi sementara sering terletak pada tabungan dan investasi mereka untuk tujuan-tujuan yang produktif.

Pengiriman uang para migran dapat melalui saluran bank resmi (dan dengan demikian direkam dalam statistik) atau melalui saluran-saluran tidak resmi atau informal (sistem kurir uang yang dijalankan oleh swasta, teman-teman atau saudara, atau dibawa sendiri oleh para migran yang bersangkutan). Pilihan antara saluran resmi dan informal ditentukan oleh kurs tukar mata uang asing, biaya bank untuk pengiriman, perkembangan sistem perbankan di negara asal, dan suku bunga yang sesungguhnya yang ditentukan oleh nilai inflasi di negara asal.

Mereka yang bergerak di dalam arus migrasi tenaga kerja tidak terampil dan semi-trampil (dimana kaum perempuan cenderung terkumpul) melakukan cara pengiriman uang yang berbeda dengan yang dilakukan oleh para migran *brain-drain*. Penelitian menunjukkan bahwa migran yang berpendidikan baik, dan bergaji baik biasanya menyimpan sebagian besar tabungan mereka di negara tuan rumah, dan mengirim sebagian kecil dari pendapatan mereka. Sedangkan migran yang kurang berpendidikan dan bergaji lebih rendah biasanya mengirimkan sebagian besar dari pendapatan mereka ke kampungnya, terutama karena ketergantungan sanak keluarga mereka di kampung halaman.³⁵

Yang pertama dan terpenting, bahwa rasio dari sumber daya keuangan yang dikirim secara resmi harus ditingkatkan - untuk dua hal, yakni menjamin bahwa kiriman uang para migran itu aman, dan juga meningkatkan pembangunan efisiensi pengiriman uang di negara asal. “Penghasilan yang di kirim dari luar negeri hanya mempengaruhi pembangunan ekonomi jika mereka mengakses sistem keuangan nasional. Selama pengiriman uang dilakukan secara informal dan “disimpan di lemari dapur”, maka kiriman ini tidak akan menyumbangkan apa-apa kepada pembangunan daerah dan nasional. Tabungan hanya dapat menciptakan efek pengali jika dapat diakses oleh pelaku ekonomi lainnya.”³⁶ Hal yang terpenting disini adalah harus ada mekanisme pengiriman resmi yang efisien yang menawarkan pelayanan dengan harga yang dapat diterima. Peraturan valuta asing tidak boleh terlalu ketat, atau sistem perbankan tidak boleh terlalu merepotkan yang membuat para migran lebih memilih saluran informal.

Juga penting untuk menjamin agar pengiriman dan tabungan yang dibawa pulang oleh para migran yang kembali diinvestasikan secara produktif. Perbedaan antara migran yang kembali yang berhasil dan mereka yang terpaksa meneruskan lingkaran migrasi sementara adalah sering terletak pada tabungan dan investasi mereka untuk tujuan-tujuan yang produktif. Pemerintah, serikat pekerja, organisasi-organisasi

pengusaha, dan Ornop/LSM dapat membantu, dimulai dengan konseling keuangan pada tahap awal proses migrasi.

- Membentuk kesadaran untuk menabung pada tahap pra-keberangkatan: Calon-calon migran harus sadar akan pentingnya menabung untuk kepulangan mereka. Sebagai bagian dari program pelatihan pra-keberangkatan, masukan informasi mengenai pentingnya tabungan, dan saluran-saluran keuangan yang tersedia bagi para pekerja migran untuk menabung atau mengirimkan uang ke rumah. [☉Buku 2], dan pentingnya perencanaan ke depan untuk investasi yang produktif dari tabungan mereka ketika mereka pulang;
- Lembaga-lembaga keuangan dan pengelolaan keuangan yang benar untuk pengiriman dan tabungan pekerja migran adalah sangat penting. Walaupun saluran paling aman untuk pengiriman uang biasanya adalah bank-bank komersial, mereka jarang sekali rendah biaya atau paling gampang dan cepat. Peraturan-peraturan bank pusat yang mengatur transaksi valuta asing bank sering memberlakukan prosedur yang berbelit-belit menghabiskan waktu (dan sering membutuhkan banyak kesabaran) untuk pelaksanaannya, sementara makelar valuta asing informasi sering jauh lebih cepat dan lebih ramah. Yang terakhir ini juga sering lebih bersaing, menawarkan pelayanan khusus yang tidak dapat disediakan oleh bank-bank komersial, seperti mengirimkan uang kiriman langsung ke rumah. Adalah sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah seperti meliberalisasikan pasar valuta asing dan sistem perbankan, serta meningkatkan pelayanan perbankan bagi para migran, termasuk menjamin adanya prasarana-prasarana di komunitas pedesaan asal migran;
- Mendorong dan membantu kelompok migran untuk membentuk koperasi tabungan dan kredit, serta menjamin bahwa semua migran — mereka yang pergi dan mereka yang kembali — memiliki informasi yang dapat dipercaya tentang koperasi-koperasi ini;
- Bank-bank setempat juga dapat menawarkan insentif bagi para migran, migran yang kembali dan keluarga mereka untuk menjaga uang kelebihan mereka sesudah pembelanjaan yang pokok diselamatkan di rekening bank resmi agar dana ini dapat diakses oleh para pelaku ekonomi lainnya. Mereka dapat juga menganjurkan tabungan migran dengan menaikkan suku bunga untuk rekening mata uang asing, serta keuntungan pinjaman lainnya. Ini juga penting untuk mengkaitkan prakarsa-prakarsa dengan sistem dukungan yang diperlukan, seperti ketrampilan dalam pengelolaan keuangan.

Kotak 5.20. Mobilisasi dan investasi tabungan para migran

Untuk dapat pulang selama-lamanya, para migran harus siap secara ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki — penghasilan mereka. Oleh karenanya, *Asian Migrant Centre* (AMC—(Pusat Migran Asia) mengembangkan dan meluncurkan program penyatuan kembali pada bulan September 1995, yang memusatkan perhatian awalnya pada pengorganisasian para PRT Filipina, Thailand dan Indonesia di Hong Kong ke dalam kelompok-kelompok tabungan yang terpisah. Langkah-langkah penting dari Program Penyatuan Kembali AMC termasuk:

- 1. Pengorganisasian, pendidikan dan pelatihan migran:** untuk membangun kelompok akar-rumput dengan sudut pandang HAM yang kuat, penyatuan kembali, kelas dan jender melalui organisasi-organisasi yang sudah ada, atau membentuk organisasi yang sama sekali baru untuk memelopori proyek-proyek tabungan dan penyatuan kembali. Salah satu strategi yang paling pokok adalah membentuk serikat pekerja migran. Berdasarkan pada pengalaman, biasanya lebih mudah menarik perhatian para migran untuk bergabung dengan menggarisbawahi persoalan-persoalan yang dekat dengan hati mereka, e.g. kebutuhan untuk pulang ke keluarga mereka, dampak sosial migrasi, kekuatan ekonomi para migran, mempelajari ketrampilan-ketrampilan baru, membangun kekuatan kolektif dan politik mereka. Tabungan adalah titik masuk yang efektif untuk pengorganisasian. Penekanan pada urusan ekonomi bukan berarti menghitung uang dan mengumpulkan tabungan bulanan. Sejak tahun 1998, AMC telah mengembangkan dan mewajibkan semua anggota tabungan kelompok untuk menjalani kursus dasar dalam penyatuan kembali, yang termasuk diantaranya situasi nasional, situasi migran, hak-hak migran, sifat dari pekerjaan migran, mengapa para migran dieksploitasi, peran pemerintah, globalisasi dan dampaknya, pengiriman uang dan potensi ekonomi migran, mengapa pilihan-pilihan lain diperlukan.
- 2. Mobilisasi tabungan:** Penyatuan kembali menjadi tidak berarti jika para pekerja migran tidak memiliki mata pencaharian untuk mereka dapat kembali. Para migran juga akan lebih berdaya dan tegas atas hak-haknya jika mereka secara ekonomi siap untuk pulang. Dengan demikian, fungsi pokok dari setiap “Kelompok penyatuan kembali dan Tabungan” (RSG—*Reintegration and Savings Group*) adalah memobilisasi tabungan anggota. RSG harus melatih dan menyiapkan para migran untuk pulang dengan memanfaatkan sumber daya utama yang mereka miliki - penghasilan mereka. Dalam prakteknya, setiap RSG setuju dengan sumbangan tabungan minimum dan kebijakan-kebijakan kerja yang pokok. Setiap RSG mengelola program tabungannya masing-masing. Mitra Ornop/LSM bertindak selaku auditor eksternal, pengawas dan pelatih.
- 3. Transformasi, kampanye dan advokasi sosial:** Para migran harus bekerja dengan gerakan masyarakat di negara mereka masing-masing untuk merubah situasi dan struktur yang eksploitatif yang mendorong mereka bekerja di luar negeri. Kecuali jika keadaan-keadaan ini berubah, maka para migran yang kembali tidak akan mampu untuk bersatu secara penuh. Para migran harus memulai proses ini ketika mereka masih di luar negeri.
- 4. Investasi alternatif/kewirausahaan:** Salah satu prinsip-prinsip kunci dari program penyatuan kembali dari AMC adalah MSAI (*Migrant Savings for Alternative Investments*—Tabungan Migran untuk Investasi Alternatif). Tabungan para migran dibangun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai modal untuk memulai investasi alternatif di negara asal para migran. Ketika para migran pulang, adalah tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang memberikan penghasilan sebanyak pekerjaan mereka di luar negeri. Dengan demikian, pilihan penyatuan kembali ekonomi mereka terbatas: mereka mengambil pekerjaan apa saja yang tersedia pada saat pulang dan/atau melakukan investasi alternatif. Proyek-proyek investasi atau mata pencaharian membutuhkan modal. Meski pemerintah atau sumber lokal mungkin dapat meminjamkan modal, tapi ini membutuhkan jaminan, bunga yang tinggi dan penundaan berbulan-bulan. Sesungguhnya, sumber komersial harus lebih oportunistik dibandingkan membantu. Sebagai penghasil upah, jelas bahwa pilihan terbaik bagi para migran adalah

memobilisasi tabungan mereka dan memanfaatkannya untuk investasi yang produktif. Begitu migran memulai proyek-proyek ekonomi mereka, program penyatuan kembali harus berurusan dengan persoalan sulit mengenai usaha-usaha alternatif, kenyataan pasar, keberlanjutan, risiko, dan sejenisnya. Maka peran mitra Ornop/LSM adalah untuk memberikan nasehat ahli dan melatih para migran untuk menghadapi persoalan-persoalan ini.

- 5. Hubungan dengan kelompok-kelompok di negara tuan rumah dan negara asal:** Ini adalah unsur penting. Berbagai aspek penyatuan kembali membutuhkan ketrampilan-ketrampilan yang khusus. Mengingat keterbatasan para migran (seperti memiliki ketrampilan-ketrampilan yang terbatas, hanya memiliki satu hari libur setiap minggu), adalah penting bagi RSG untuk membangun hubungan yang kuat dengan mitra Ornop/LSM dan kelompok-kelompok lainnya yang dapat menyediakan pelayanan spesialis. Contohnya, RSG Thailand di Hong Kong membutuhkan mitra penyatuan kembali di Thailand untuk menjalankan proses penyatuan kembali. Di negara asal, pekerjaan lebih berupa pengelolaan investasi, pengorganisasian keluarga migran dan komunitas, melakukan penelitian pasar dan pelatihan kewirausahaan.

Sumber: B. Molina, Jr. dan R. Varona, *"Migrant reintegration: towards a more empowering and liberating strategy"* in Asian Migrant Centre and Migrant Forum in Asia, *Asian Migrant Yearbook 1999 Migration Facts, Analysis and Issues in 1998*, Hong Kong, AMC, 1999.

Kotak 5.21. Investasi-investasi alternatif migran

Bagong Bayani sa Hong Kong (BBHK) dibentuk pada bulan Mei 1998 setelah serangkaian seminar-seminar orientasi tentang program penyatuan kembali AMC. BBHK awalnya beranggotakan tujuh perempuan migran, yang kebanyakan berasal dari kota yang sama di Filipina. Kelompok ini setuju untuk membuat tabungan bulanan bagi setiap anggotanya sejumlah USD25, atau 5 persen dari gaji bulanan mereka. Untuk membayar biaya operasi organisasi ini, mereka juga menyumbangkan sejumlah USD1.30 sebagai iuran bulanan. Pada bulan Desember 1998, kelompok ini telah mengumpulkan lebih dari USD5,400 dalam bentuk tabungan, dan memutuskan untuk memulai suatu proyek penyatuan kembali di kota asal mereka di Filipina. BBHK melakukan perjanjian dengan satu mitra organisasi di Filipina, *Unlad Kabayan*, untuk membantu mengawasi proyek mereka ketika para migran terus bekerja di Hong Kong. Unlad Kabayan melakukan studi kelayakan dan proyek ini (toko pemasok alat sekolah dan kantor) dimulai. Toko ini dikelola oleh para anggota keluarga dari migran tersebut. Proyek ini secara resmi dibuka pada bulan April 1999, sebelas bulan setelah kelompok ini dimulai di Hong Kong. Berdasarkan kesepakatan kelompok, salah satu anggota BBHK setelah menyelesaikan kontraknya di Hong Kong dan pulang ke Filipina untuk menjalankan proyek dan menjamin bahwa para keluarga mereka terlibat dalam proses. Sejak bulan Juli 1999, toko pemasok alat sekolah dan kantor milik BBHK ini terdaftar sebagai koperasi, dimana dewan direktornya adalah perwakilan dari anggota-anggota yang masih berada di Hong Kong. Rencana koperasi ini termasuk mengorganisir pedagang-pedagang kaki lima dan petani di daerah kota praja, serta mendorong mereka menjadi anggota koperasi dan juga memperluas kredit yang mudah dan dapat diakses, serta pelayanan-pelayanan pemberdayaan-diri kepada para anggotanya. Pada waktu yang bersamaan, BBHK di Hong Kong terus mengumpulkan sumber daya mereka bersama sambil menyiapkan diri untuk pulang ke rumah dan bersatu kembali kedalam komunitas mereka.

Sumber: B. Molina, Jr. dan R. Varona, *"Migrant reintegration: towards a more empowering and liberating strategy"* di Asian Migrant Centre and Migrant Forum in Asia, *Asian Migrant Yearbook 1999 Migration Facts, Analysis and Issues in 1998*, Hong Kong, AMC, 1999.

Kotak 5.22. Pengumpulan pengiriman uang dan menciptakan insentif untuk investasi yang produktif

Penyatuan kembali ekonomi dapat ditingkatkan melalui pengumpulan pengiriman uang dan penciptaan program untuk kegiatan-kegiatan ekonomi seperti koperasi kredit lokal atau skema investasi khusus. Juga mungkin dengan memberikan insentif untuk investasi-investasi yang produktif. Di Afrika, sisa dari sumber daya keuangan para keluarga migran biasanya diinvestasikan dalam aset-aset yang tidak produktif, seperti barang/milik tetap, tanah dan barang-barang mewah impor, karena investasi-investasi ini tampaknya aman. Tetapi begitu koperasi-koperasi kredit lokal membuktikan bahwa investasi dalam kegiatan yang produktif memberikan penghasilan, beresiko kecil dan mencetuskan efek pengali, maka perilaku investasi secara umum akan mungkin berubah. Namun, di Afrika koperasi-koperasi kredit lokal bukanlah satu-satunya saluran produktif untuk pengiriman uang. Deposito bank yang aman dalam mata uang asing dan lokal dengan bunga yang menarik tentu menjadi suatu pilihan yang menarik. Selama bertahun-tahun asosiasi migran, atau tepatnya 'asosiasi jejaring para migran dan sebagai non-migran', seperti "arisan perbaikan rumah" di Nigeria dan "asosiasi kesejahteraan sosial" di Kenya dan negara-negara lain menghasilkan kiriman uang yang terkumpul dari sumbangan anggota masyarakat.

Sumber: International Organization for Migration, *World Migration 2003 Managing Migration Challenges and Responses for People on the Move*, Geneva, IOM, 2003, hal.231.

Bahan Rujukan dan Bacaan Tambahan

- Abella, M.I., *Sending Workers Abroad A Manual for Low- And Middle-Income Countries*, Geneva, ILO, 1997.
- Asian and Pacific Development Centre, *Regional Policy Dialogue Foreign Women Domestic Workers: International Migration, Employment and National Policies*, Kuala Lumpur: APDC, 1992
- Asian Migrant Centre, Asia South Pacific Bureau for Adult Education dan Migrant Forum in Asia: *Clearing a Hurried Path: Study on Education Programs for Migrant Workers in Six Asian Countries*, Hong Kong, 2001.
- Asian Migrant Centre dan Migrant Forum in Asia, *Asian Migrant Yearbook Migration Facts, Analysis and Issues* (berbagai tahun), Hong Kong, Asian Migrant Centre.
- Asian Migrant Centre dan Coalition for Migrants' Rights, "Strategies, Experiences and Lessons: Protecting the Rights and Empowering Asian Migrant Domestic Workers", Presentasi PowerPoint yang diberikan pada Pertemuan Konsultasi ILO mengenai Perlindungan terhadap para PRT dari ancaman kerja paksa dan perdagangan manusia (*Programme Consultation Meeting on the Protection of Domestic Workers against the Threat of Forced Labour and Trafficking*) 17-19 Februari, 2003, Hong Kong.
- Asian Migrant Centre dan Mekong Migration Network, *Migration Needs, Issues and Responses in the Greater Mekong Subregion A Resource Book*, Hong Kong, Asian Migrant Centre (dengan bantuan dari Rockefeller Foundation), December 2002
- Asia-Pacific Migration Research Network, *Female Labour Migration in South East Asia: Changes and Continuities*, Bangkok, Asian Research Centre for Migration Institute of Asian Studies, 2001.
- Asis, M. M.B., "Filipino women at the journey's end: exploring gender issues in return migration". Makalah yang disajikan pada Workshop Internasional tentang Migrasi Tenaga Kerja Internasional dan Perubahan Sosial Ekonomi di Asia Tenggara dan Asia Timur (*International Workshop on International Labour Migration and Socio-Economic Change in Southeast and East Asia*), Scalabrini Migration Centre, 2001
- Bohning, W.R., *Employing Foreign Workers A Manual on Policies and Procedures of Special Interest to Middle and Low-Income Countries*, Geneva, ILO, 1996.
- D'Angelo, A. dan M.P. Marciacq, *Nicaragua: Protecting Female Labour Migrants from Exploitative Working Conditions and Trafficking*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002
- Dias, M. and R. Jayasundere, *Sri Lanka: Good Practices to Prevent Women Migrant Workers from Going into Exploitative Forms of Labour*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002.
- Foundation against Trafficking in Women, International Human Rights Law Group, Global Alliance against Traffic in Women, *Human Rights Standards for the Treatment of Trafficked Persons*, Bangkok, Global Alliance against Traffic in Women, 1999.
- Gullaprawit, Chirapun, *Planning for Return Migration: Case Studies of Six Villages in Thailand*, Bangkok, National Economic and Social Development Board, 1991.
- International Labour Office, *Migrant Workers General Survey on reports*, Geneva, ILO, 1999.

- International Organization for Migration: *World Migration 2003 Managing Migration Challenges and Responses for People on the Move*, Geneva, IOM, 2003.
- International Organization of Migration, *Best practices concerning migrant workers and their families*. Workshop Internasional dengan bantuan Pemerintah Amerika Serikat, memenuhi permintaan dari *Plan of Action of the Summit of the Americas*, Santiago de Chile, 19-20 Juni 2000.
- Kanlungan Centre Foundation, Inc, *Destination: Middle East, A handbook for Filipino women domestic workers*, Quezon City, Kanlungan Centre Foundation, Inc. dengan bantuan dari ILO, Desember 1997.
- Kebede, E. *Ethiopia: An Assessment of the International Labour Migration Situation The Case of Female Labour Migrants*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002.
- Molina, B. Jr. dan R. Varona, "Migrant reintegration: towards a more empowering and liberating strategy" di Asian Migrant Centre and Migrant Forum in Asia, *Asian Migrant Yearbook 1999 Migration Facts, Analysis and Issues in 1998*, Hong Kong, AMC, 1999
- Nightingale, F., *Nigeria: An Assessment of the International Labour Migration Situation The Case of Female Labour Migrants*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002.
- UNLAD Kabayan Migrant Services Foundation, *Migrant Services Foundation, Planning your Re-Entry, Filipino Migrant Workers Orientation Course*, Philippines, Unlad Kabayan, 2001.
- Verghis, S. and I. Fernandez (eds.), *Regional Summit on Pre-Departure, Post Arrival and Reintegration Programs for Migrant Workers*, 11-13 September, 2000, Genting Highlands, Malaysia, Kuala Lumpur, CARAM Asia, 2000.
- Villalba, M.A.M.C., *Philippines: Good Practices for the Protection of Filipino Women Migrant Workers in Vulnerable Jobs*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002.
- Wijers, M. and L.L. Chew, *Trafficking in women, Forced Labour and Slavery-like Practices in Marriage, Domestic Labour and Prostitution*, Netherlands, Foundation Against Trafficking in Women, 1999.

Beberapa situs web yang bermanfaat:

Amnesty International

<http://www.web.amnesty.org>

Anti-Slavery International

<http://www.antislavery.org>

Asian Migrant Centre

<http://www.asian-migrants.org>

Asian Monitor Resource Centre

<http://www.amrc.org.hk/>

Asian Pacific Forum on Women, Law and Development

<http://www.apwld.org/lm.htm>

Asia-Pacific Migration Research Network

<http://www.unesco.org/most/apmrn.htm>

Asian Partnership on International Migration

<http://apim.apdip.net>

Asian Research Centre for Migration

<http://www.chula.ac.th/INSTITUTE/ARCM/main.htm>

Bangkok Declaration on Irregular Migration

<http://www.thaiembdc.org/info/bdim.html>

CARITAS

<http://www.caritas.org>

Coalition Against Trafficking in Women (CATW)

<http://www.catwinternational.org/>

Charter for the Rights of Migrant Domestic Workers in Europe

<http://www.philsol.nl/of/charter-domestics-oct99.htm>

Collection of resource and links on initiatives against trafficking in persons

http://www.hrlawgroup.org/initiatives/trafficking_persons/

Coordination of Action Research on AIDS and Mobility – Asia (CARAM Asia)

<http://www.caramasia.gn.apc.org>

Council of Europe

http://www.coe.int/T/E/Committee_of_Ministers/Home/

Domestic Workers

<http://www.asylumsupport.info/news/domesticworkers.htm>

Economic Commission for Europe (ECE)

<http://www.unece.org>

European Commission Justice and Home Affairs

http://europa.eu.int/comm/justice_home

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia

http://europa.eu.int/agencies/eumc/index_en.htm

European Strategy on Trafficking in Women

http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/8mars_en.htm

European Union policy documents

http://europa.eu.int/index_fi.htm

Femmigration

<http://www.femmigration.net/>

Filipino laws and Overseas Employment

<http://www.chanrobles.com/republicactno8042.htm>

Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW)

<http://www.thai.net/gaatw>

Global Campaign for the Ratification of the Convention on the Rights of Migrants

<http://www.migrantsrights.org>

Global Programme against Trafficking in Human Beings, UN Office for Drug and Crime Control Prevention, Vienna

http://www.odccp.org/trafficking_human_beings.html

International Human Rights Law Group

<http://www.hrlawgroup.org/>

Human Rights Watch (HRW)

<http://www.hrw.org>

Information for Domestic Workers Arriving in UK – Government Website

<http://www.ind.homeoffice.gov.uk/>

International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU)

<http://www.icftu.org/>

International Labour Office (ILO)

<http://www.ilo.org>

<http://www.ilo.org/public/english/standards/decl/>

<http://www.ilo.org/genprom>

<http://www.ilo.org/childlabour>

<http://www.ilo.org/asia/child/trafficking>

<http://ilolex.ilo.ch:1567>

<http://natlex.ilo.org>

International Movement Against Discrimination and Racism

<http://imadr.org>

International Organization for Migration (IOM)

<http://www.iom.int>

Kalayaan. Justice for Overseas Domestic Workers

<http://ourworld.compuserve.com/homepages/kalayaan/home.htm>

Kanlungan Centre Foundation Inc.

<http://www.kanlungan.ngo.ph>

Link to anti-trafficking websites

<http://stop-traffic.org/Countries.html>

Migration Forum in Asia (MFA)

<http://www.migrantnet.pair.com>

Migrant Rights International

<http://migrantwatch.org>

Mission for Filipino Migrant Workers (MFMW)

<http://www.migrants.net>

Network of Migrant Workers Organisations

<http://www.solidar.org>

Network Women's Program (La Strada Foundation)

http://www.soros.org/women/html/info_trafficking.htm

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

<http://www.unhchr.ch/women/focus-trafficking.html>

<http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/mwom.htm>

Office of the UN High Commissioner for Refugees (OUNHCR)

<http://www.unhcr.ch>

Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE): Europe Against Trafficking in Persons

www.osce.org/europe-against-trafficking

Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)

<http://www.osce.org/odihr/democratization/trafficking>

Palermo Convention on Transnational Organized Crime and its Protocols

<http://www.unodc.org/palermo/convmain.html>

Promotion of the rights of migrants (December 18)

<http://www.December18.net/intro.htm>

Scalabrini Migration Center

<http://www.scalabrini.asn.au/philsmc.htm>

STOP-TRAFFIC

<http://www.stop-traffic.org>

Stop traffic listserv and archives

<http://www.friends-partners.org/partners/stop-traffic/>

Trafficking Directory

http://www.yorku.ca/iwrrp/trafficking_directory.htm

United Nations Crime Commission documents on the Trafficking Protocol

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents/index.htm

United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)

<http://www.unifem.org>

United Nations Division for the Advancement of Women (UNDAW)

<http://www.un.org/womenwatch/daw>

United Nations Interregional Crime Prevention Institute (UNICRI)

<http://www.unicri.it>

United Nations Secretariat

<http://www.un.org>

United Nations Treaty Collection

<http://www.un.org/Depts/Treaty/>

USA Government

<http://usinfo.state.gov/topical/global/traffic/>

<http://www.state.gov/g/tip>

<http://cia.gov/csi/monograph/women/trafficking>

US Anti-trafficking initiatives

<http://www.state.gov/documents/organization/21555.pdf>

<http://secretary.state.gov/www/picw/trafficking/region.htm>

UNICRI Global Programme Against Trafficking in Human Beings

http://www.unicri.it/trafficking_in_human_beings.htm

Women's Aid Organisation, Malaysia (WAO)

<http://wao.org.my>

World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance

<http://www.unhchr.ch/html/racism/>

World Wide Web Virtual Library (WWWVL)- Migration and Ethnic Relations

<http://www.ercomer.org/wwwvl/>

Catatan Akhir

¹ Lihat, sebagai contoh, P. Boonpala dan J.Kane, *Trafficking of children: the problem and responses worldwide*, Geneva, ILO, *International Programme on the Elimination of Child Labour*, 2001. Juga ILO, *Unbearable to the human heart Child trafficking and action to eliminate it*, Geneva, ILO, *International Programme on the Elimination of Child Labour*, 2002.

² Beberapa materi latar belakang yang digunakan untuk mengembangkan Pedoman ini diambil dari studi kasus di negara-negara pengirim dan penerima tentang situasi para pekerja migran perempuan dalam keluarga, tempat kerja, komunitas dan masyarakat. Studi kasus juga melihat pada beberapa inisiatif, kebijakan dan program, praktek “baik” dan “buruk” yang diimplementasikan oleh pemerintah-pemerintah, perusahaan-perusahaan perekrutan dan jasa tenaga kerja swasta dan berbagai macam pelaku sosial lainnya untuk membantu dan melindungi para pekerja migran perempuan dari diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, dan membantu mereka yang rentan untuk diperdagangkan. Lihat GENPROM (*Gender Promotion Programme* — Program Promosi Jender) dari ILO, *Working Paper Series on Women and Migration* (Seri Makalah Kerja mengenai Kaum Perempuan dan Migrasi).

³ B. Molina, Jr. dan R. Varona, “*Migrant reintegration: towards a more empowering and liberating strategy*” dalam Asian Migrant Centre and Migrant Forum in Asia, *Asian Migrant Yearbook 1999 Migration Facts, Analysis and Issues in 1998*, Hong Kong, AMC, hal. 56.

⁴ Asia-Pacific Migration Research Network dan Asian Research Centre for Migration, *Female Labour Migration in South East Asia: Changes and Continuities*, Bangkok, Institute of Asian Studies, 2001, hal.63.

⁵ International Labour Office, *Migrant Workers General Survey on reports*, Geneva, ILO, 1999, hal. 113.

⁶ M. Dias dan R. Jayasundere, Sri Lanka: *Good Practices to Prevent Women Migrant Workers from Going into Exploitative Forms of Labour*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002, hal. 32.

⁷ Lihat M. Wijers dan Lin Lap Chew, *Trafficking in women, Forced Labour and Slavery-like Practices in Marriage, Domestic Labour and Prostitution*, Netherlands, Foundation Against Trafficking in Women, 1999, hal.106. Juga Asian Migrant Centre dan Coalition for Migrants’ Rights, “*Strategies, Experiences and Lessons: Protecting the Rights and Empowering Asian Migrant Domestic Workers*”, presentasi power point yang disajikan pada ILO Programme Consultation Meeting on the Protection of Domestic Workers against the Threat of Forced Labour and Trafficking (Rapat Konsultasi Program ILO mengenai Perlindungan bagi PRT dari ancaman Kerja Paksa dan Perdagangan), 17-19 Februari, 2003, Hong Kong.

⁸ Asia-Pacific Migration Research Network dan Asian Research Centre for Migration, *Female Labour Migration in South East Asia: Changes and Continuities*, Bangkok, Institute of Asian Studies, 2001), hal. 63 dan 245.

⁹ Ibid.

¹⁰ Asia-Pacific Migration Research Network dan Asian Research Centre for Migration, *Females Labour Migration in South East Asia: Changes and Continuities*, Bangkok, Institute of

¹¹ B. Molina, Jr dan R. Varona, "Migrant reintegration: towards a more empowering and liberating strategy" dalam Asian Migration Centre and Migrant Forum in Asia, *Asian Migrant Yearbook 1999 Migration Facts, Analysis and Issues in 1998*, Hong Kong, AMC, hal.60.

¹² Asia-Pacific Migration Research Network dan Asian Research Centre for Migration, *Female Labour Migration in South East Asia: Changes and Continuities*, Bangkok, Institute of Asian Studies, 2001, hal. 17.

¹³ B. Molina, Jr dan R. Varona, "Migrant reintegration: towards a more empowering and liberating strategy" dalam Asian Migration Centre and Migrant Forum in Asia, *Asian Migrant Yearbook 1999 Migration Facts, Analysis and Issues in 1998*, Hong Kong, AMC, hal.57.

¹⁴ Ibid. hal. 66.

¹⁵ Masalah 'Brain Drain', atau hijrahnya sarjana keluar negeri, telah lama dibahas dalam debat-debat mengenai migrasi dan pembangunan. Suatu makalah Kerja IMF memperkirakan bahwa jumlah total *brain drain* dari negara-negara sedang berkembang (Least Developed Countries atau LCDs) ke negara-negara OECD bernilai saham sekitar 12.9 juta (dikutip dalam Olesen hal.12). Tetapi juga terdapat "Brain Gain" serentak dimana para migran dengan giat pulang kembali ke negara-negara asal mereka dengan kemampuan dan potensi yang meningkat. Lihat makalah dari Henrik Olesen 'Migration, Return and Development: An Institutional Perspective' Tidak diterbitkan.

¹⁶ Asia-Pacific Migration Research Network dan Asian Research Centre for Migration, *Female Labour Migration in South East Asia: Changes and Continuities*, Bangkok, Institute of Asian Studies, 2001, hal. 64.

¹⁷ Asian Migrant Centre dan Mekong Migration Network "Cambodia" dalam *Migration Needs, Issues and Responses in the Greater Mekong Subregion A Resource Book*, Hong Kong, Asian Migrant Centre, dengan dukungan dari Rockefeller Foundation, Desember 2002), hal.75.

¹⁸ Disadur sebagian dari *HUMAN RIGHTS STANDARDS FOR THE TREATMENT OF TRAFFICKED PERSONS* Januari 1999 yang ditemukan di www.hrlawgroup.org

¹⁹ F. Nightingale, *Nigeria: An Assessment of the International Labour Migration Situation The Case of Female Labour Migrants*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002, hal.20.

²⁰ E. Kebede, *Ethiopia: An Assessment of the International Labour Migration Situation The Case of Female Labour Migrants*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002, hal.37-39.

²¹ Sebagai contoh, selama Perang Teluk, banyak pemerintah mengambil langkah-langkah luar biasa melalui udara dan laut, mengungsikan warganegara mereka dari daerah berbahaya di Kuwait, Irak dan Arab Saudi.

²² Lihat Abella, M.I., *Sending Workers Abroad A Manual for Low- And Middle-Income Countries*, Geneva, ILO, 1997, hal.95.

-
- ²³ Disadur sebagian dari *HUMAN RIGHTS STANDARDS FOR THE TREATMENT OF TRAFFICKED PERSONS* Januari 1999 yang ditemukan di www.hrlawgroup.org
- ²⁴ M. Dias dan R. Jayasundere, *Sri Lanka: Good Practices to Prevent Women Migrant Workers from Going into Exploitative Forms of Labour*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002, hal. 34.
- ²⁵ Villalba, M.A.M.C., *Philippines: Good Practices for the Protection of Filipino Women Migrant Workers in Vulnerable Jobs*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002, hal.45.
- ²⁶ F. Nightingale, *Nigeria: An Assessment of the International Labour Migration Situation The Case of Female Labour Migrants*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002.
- ²⁷ Lihat situs web: www.warbe@bangla.net
- ²⁸ Villalba, M.A.M.C., *Philippines: Good Practices for the Protection of Filipino Women Migrant Workers in Vulnerable Jobs*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002, hal.45.
- ²⁹ Dias dan R. Jayasundere, *Sri Lanka: Good Practices to Prevent Women Migrant Workers from Going into Exploitative Forms of Labour*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002, hal. 35.
- ³⁰ Lihat situs web CARITAS: <http://www.caritas.org/>
- ³¹ Villalba, M.A.M.C., *Philippines: Good Practices for the Protection of Filipino Women Migrant Workers in Vulnerable Jobs*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002, hal.43.
- ³² Ibid, hal.44.
- ³³ Asia-Pacific Migration Research Network and Asian Research Centre for Migration, *Female Labour Migration in South East Asia: Changes and Continuities* (Bangkok, Institute of Asian Studies, 2001), hal. 61.
- ³⁴ M. Dias dan R. Jayasundere, *Sri Lanka: Good Practices to Prevent Women Migrant Workers from Going into Exploitative Forms of Labour*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002, hal.30-31.
- ³⁵ International Organization for Migration, *World Migration 2003 Managing Migration Challenges and Responses for People on the Move*, Geneva, IOM, 2003, hal.228-229.
- ³⁶ Ibid, hal.230.



PULANG: PEMULANGAN DAN PENYATUAN KEMBALI



TUJUAN BUKU 5

- ☐ Menggambarkan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh mereka yang kembali;
- ☐ Mengidentifikasi dukungan-dukungan untuk penyatuan kembali yang berhasil: logistik, hukum, sosio-psikologis, pekerjaan, tabungan, pengelolaan pengiriman, investasi yang produktif, dan dukungan yang terkait dengan ketrampilan;
- ☐ Menyoroti peran pemerintah, mitra-mitra sosial dan Ornop/LSM dalam penyatuan kembali;
- ☐ Menekankan kesempatan-kesempatan untuk pekerjaan yang menghasilkan uang sebagai kunci untuk penyatuan kembali yang berhasil



JENIS-JENIS PEMULANGAN

- ❑ Pemulangan yang dipaksakan atau di luar kemauan:
 - Pengakhiran kerja yang tidak resmi, pengakhiran kerja yang tiba-tiba dan tidak adil oleh majikan/agen; akibat eksploitasi atau perlakuan sewenang-wenang, dibuang oleh majikan, ijin kerja/visa yang kadaluwarsa dan tidak dapat diperbaharui;
- ❑ Deportasi:
 - Tingkat perseorangan: pekerja tidak terdaftar; akibat tindak kejahatan yang dilakukan oleh migran, akibat dari perdagangan;
 - Tingkat masal: karena peperangan, konflik, masalah-masalah diplomatik; deportasi masal pekerja tidak terdaftar; krisis ekonomi; program lokalisasi; perubahan politik atau kebijakan dari pemerintah tuan rumah;
- ❑ Pemulangan Sukarela
 - Program-program Pemulangan Sukarela yang Dibantu (AVR—Assisted Voluntary Programs)



PEMULANGAN SUKARELA

ILO selalu menganjurkan untuk pemulangan sukarela para pekerja migran.

Konvensi No. 143 mengenai Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), tahun 1975

Pasal 8: Dalam kasus bahwa dia telah tinggal secara sah di dalam wilayah untuk tujuan pekerjaan, pekerja migran tidak boleh diperlakukan sebagai berada dalam situasi tidak sah atau tidak teratur hanya karena mereka telah kehilangan pekerjaannya, yang dengan sendirinya tidak boleh diartikan secara tidak langsung pencabutan otoritas untuk tinggalnya, atau, sebagaimana mungkin kasusnya, adalah ijin kerjanya.

Pasal 9: Dalam hal pengusiran si pekerja atau keluarganya, biaya tidak boleh dibebankan pada mereka. Tidak satupun dalam Konvensi ini akan mencegah para Anggota untuk memberikan pada orang-orang yang tinggal atau bekerja secara tidak resmi didalam negara hak untuk tinggal dan mengambil pekerjaan yang sah.



MENGAPA PEMULANGAN DAN PENYATUAN KEMBALI BEGITU BERMASALAH BAGI PARA MIGRAN YANG KEMBALI?

- ☐ Efek-efek sosio-psikologis;
- ☐ Masalah-masalah dalam penyatuan kembali dengan keluarga dan dengan masyarakat;
- ☐ Kesulitan-kesulitan keuangan;
- ☐ Masalah-masalah pekerjaan dan yang berkaitan dengan ketrampilan;
- ☐ Mengajukan gugatan atas eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang.



KEBUTUHAN PENYATUAN KEMBALI YANG HARUS DIHADAPI

- ☐ Dari tahap pra-keberangkatan sampai ke seluruh siklus migrasi;
- ☐ Baik oleh negara asal maupun negara tujuan;
- ☐ Tidak hanya pada tingkat perseorangan tetapi juga pada tingkat makro;
- ☐ Dengan memberikan perhatian khusus kepada para migran yang kembali yang pernah diperdagangkan, diperlakukan sewenang-wenang dan dieksploitasi.



MEMBANTU PENYATUAN KEMBALI YANG BERHASIL: APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH NEGARA ASAL?

- ☐ Menetapkan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang jelas berkenaan tanggungjawab untuk repatriasi;
- ☐ Menyediakan insentif bagi para migran untuk kembali pada saat berakhirnya kontrak pekerjaan;
- ☐ Menyediakan bantuan repatriasi bagi mereka yang membutuhkannya, termasuk pelayanan-pelayanan konsuler, bantuan hukum, konseling dan rujukan ke pelayanan sosial;
- ☐ Membuat pendaftaran dan *database* dari para migran yang kembali;
- ☐ Menyediakan saluran-saluran yang dapat dipercaya bagi para migran untuk mengirimkan uang;
- ☐ Memberikan nasehat mengenai kesempatan-kesempatan investasi dan pekerjaan;
- ☐ Meningkatkan akses ke jaminan sosial;
- ☐ Menyediakan pelayanan dan dukungan khusus bagi para korban perdagangan manusia.



APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH NEGARA TUJUAN?

- ☐ Mengupayakan sistem migrasi untuk pekerjaan yang penuh pemahaman, transparan, teratur, tertib dan manusiawi;
- ☐ Menyediakan Program-program Pemulangan Sukarela yang Dibantu (AVR);
- ☐ Menyediakan struktur yang mendorong para pekerja migran untuk menabung;
- ☐ Membuat perjanjian bilateral dengan negara-negara asal untuk memberikan bagi para migran saluran-saluran yang benar dan aman untuk pengiriman uang dan juga untuk mengatur prosedur-prosedur pemulangan;
- ☐ Menjamin *transferability* atau dapat ditransferkannya sumbangan tunjangan jaminan sosial;
- ☐ Memperlakukan para pekerja migran tidak teratur semanusiawi mungkin; dengan repatriasi aman yang terjamin;
- ☐ Menjamin perlindungan yang memadai bagi orang-orang yang telah diperdagangkan;
- ☐ Mendukung program-program pembangunan di negara-negara tujuan untuk memperkuat kepulangan yang berkelanjutan.



APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ASOSIASI PARA MIGRAN?

Asosiasi pekerja migran yang kembali di tingkat lokal adalah salah satu jalan yang paling efektif dalam mengorganisir dukungan gotong royong diantara sesama migran yang kembali, melibatkan masyarakat dan anggota keluarga, serta memperbaiki akses ke pelayanan dan sarana-sarana dengan cara:

- ☐ Memberikan kesempatan bagi para migran perempuan yang kembali untuk berjejaring dengan yang lain, termasuk saling mendukung bagi mereka yang telah mengalami perlakuan sewenang-wenang;
- ☐ Meningkatkan akses ke sumber daya dan dukungan keuangan, termasuk skema kredit untuk reintegrasi ekonomi mereka;
- ☐ Memperkuat pembagian informasi mengenai jenis-jenis dukungan yang tersedia;
- ☐ Menyediakan informasi tangan pertama untuk para calon migran;
- ☐ Meningkatkan persiapan-persiapan dalam hal migrasi yang berikut;
- ☐ Melobi untuk bertindak menanggulangi masalah-masalah para migran yang kembali.



APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SERIKAT PEKERJA?

- ☐ Membantu para migran yang kembali untuk membentuk organisasi mereka sendiri atau bergabung dengan serikat pekerja yang sudah ada;
- ☐ Membantu para migran yang kembali untuk memiliki suara, mengadvokasi atas nama mereka;
- ☐ Berhubungan dengan serikat-serikat pekerja di negara tujuan untuk memberikan informasi kepada para migran yang ingin kembali mengenai kondisi dan kesempatan yang ada di negara asal;
- ☐ Membuat pelayanan-pelayanan dan sarana-sarana yang berkenaan dengan pusat penempatan kerja, bantuan hukum, dan sejenisnya tersedia bagi para migran yang kembali. Para Migran yang kembali (mantan migran) yang dibantu dengan cara-cara yang praktis akan lebih mungkin untuk bergabung dengan serikat pekerja.



APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ORGANISASI MAJIKAN/PENGUSAHA?

- ☐ Menyebarkan informasi mengenai kesempatan-kesempatan dan lowongan-lowongan kerja, bekerja sama dengan program-program penerimaan bagi para migran yang kembali dan dengan kantor-kantor jasa tenaga kerja;
- ☐ Melalui hubungan dengan organisasi-organisasi majikan/pengusaha di negara-negara tujuan, menyediakan informasi kepada para migran yang memiliki kemungkinan untuk kembali mengenai kesempatan kerja di negara asal;
- ☐ Menyediakan jasa-jasa penasehat, jasa-jasa bantuan pelayanan-pelayanan dukungan dan bimbingan bagi para migran yang kembali dalam mendirikan usaha sendiri.



BANTUAN DAN DUKUNGAN BAGI PEKERJA MIGRAN YANG KEMBALI

- ☐ Bantuan logistik
- ☐ Bantuan hukum
- ☐ Konseling sosio-psikologis dan pelayanan medis
- ☐ Bantuan yang terkait dengan pekerjaan dan ketrampilan
- ☐ Pelayanan keuangan: pengelolaan pengiriman, tabungan dan investasi

*Proyek ILO mengenai
Penggalangan Aksi
untuk Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga
dari Kerja Paksa dan
Perdagangan Manusia*

Kantor ILO Jakarta
Menara Thamrin Lt. 22
Jl. M. H. Thamrin Kav.3
Jakarta 10250
Tel.: 6221 - 3913112
Faks.: 6221 - 3100766
E-mail: jakarta@ilojkt.or.id

**The Gender
Promotion Programme
(GENPROM)**

International Labour Office
4, route des Morillons
CH-1211, Geneva 22
Switzerland
Tel.: (+41) 022 799 6090
Fax: (+41) 022 799 7657

E-Mail: genrom@ilo.org
Web site: www.ilo.org/genrom

